DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN AKHIR

PENGUKURAN PEMANFAATAN INTERNET PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

PENGUKURAN PEMANFATAN INTERNET PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

LAPORAN AKHIR

PENGUKURAN PEMANFAATAN INTERNET PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan pesat, diantaranta penggunaan media aplikasi dan internet. Dalam instansi pemerintah, internet dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dalam proses pengolahan data yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan ataupun untuk pengambilan suatu keputusan kebijakan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan bantuan teknologi berupa internet dapat memberikan pelayanan yang baik. Selain itu dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan masyarakat terlibat secara aktif dalam suatu perumusan kebijakan.

Untuk bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang ada, maka harus diimbangi pula dengan kesiapan dan keberadaan media atau alat yang dibutuhkan sebagai penunjang. Seperti halnya keberadaan komputer, jaringan internet yang luas dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan dengan cara pengukuran dan pemanfaatan internet pada Organisasi Perangkat Daerah. Dengan melakukan pengukuran dan pemanfaatan internet ini maka pemerintah dapat mengetahui sejauhmana tingkat pemanfaatan internet yang telah diterapkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo.

MeIalui hasil kajian ini, diharapkan agar menjadi motivasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pemanfaatan internet pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masukan atau kritikan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak terhadap hasil kajian ini sangat diharapkan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan serupa pada masa- masa mendatang.

Sidoarjo, Juli 2022
Tim Pelaksana
Pengukuran dan
Pemanfaatan Internet pada
Organisasi Perangkat Daerah
di Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **v**

Daftar Gambar ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Keluaran 6

1.5 Ruang Lingkup 6

1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan 6

1.7 Sistematika Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kebijakan Berdasarkan Undang-Undang 9

2.2 Tinjauan Teoritis 16

2.2.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi 16

2.2.2 Pengertian dan Penerapan E-Government 22

2.2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 33

BAB III METODE KAJIAN

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian 39

3.2 Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.. 39

3.3 Jenis dan Sumber Data 41

3.4 Teknik Pengumpulan Data 42

3.5 Penganalisisan Data 43

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENGUKURAN PEMANFAATAN INTERNET PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

4.1 Pengukuran dan Pemanfaatan Internet.. 45

4.2 Ketersediaan Bandwidth Lokal 60

4.3 Ketersediaan Bandwidth Internet 63

4.4 Ketersediaan Internet Lainnya 66

4.5 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022 91

4.6 Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo 142

4.7 Analisis Penggunaan Televisi Sebagai Alat Bantu Kegiatan Kantor Ataupun Pelayanan Publik 164

4.8 Analisis Penggunaan Radio Sebagai Alat Bantu Kegiatan Kantor Ataupun Pelayanan Publik 165

4.9 Analisis Penggunaan Telepon Sebagai Alat Bantu Kegiatan Pekerjaan Dan Pelayanan 166

4.10 Analisis Penggunaan Komputer dan Internet Untuk Kegiatan Pekerjaan dan Pelayanan 166

4.11 Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet Untuk Kegiatan Kantor.. 167

4.12 Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet untuk Kegiatan Pelayanan Publik 169

4.13 Jumlah Laptop Yang Terkoneksi Internet 171

4.14 Jumlah Handphone Terkoneksi Internet 173

4.15 Kebutuhan Bandwidth 175

4.16 Penggunaan Internet OPD untuk Membangun Masyarakat Informasi 176

4.17 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Iklim Investasi dan Kompetisi 176

4.18 Penggunaan Internet OPD untuk Transparansi, Akuntabilitas dan Good Governance 177

4.19 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 178

4.20 Penggunaan Internet OPD untuk Pembuatan Kebijakan dan Manajemen Pengetahuan..... 178

4.21 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Informasi Publik 179

4.22 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 180

4.23 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Efisiensi dan Manajemen Sumber 180

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan 182

5.2. Rekomendasi 183

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan 7

Tabel 2.1 Dimensi dan Atribut SPBE 36

Tabel 3.1 Lokasi Kajian di Kabupaten Sidoarjo 38

Tabel 3.2 Dimensi Penggunaan dan Pemanfaatan Internet. 40

Tabel 4.1 Nomor Internet Protocol (IP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten SidoarjoDaftar Nama OPD di Kabupaten Sidoarjo 49

Tabel 4.2 Ketersediaan Fasilitas Bandwidth Lokal Pada OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 58

Tabel 4.3 Ketersediaan Fasilitas Bandwidth Internet Pada OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 61

Tabel 4.4 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 64

Tabel 4.5 Penempatan Access Point (AP) yang Digunakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo 65

Tabel 4.6 Penempatan Access Point (AP) yang Digunakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo 65

Tabel 4.7 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo 66

Tabel 4.8 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo 66

Tabel 4.9 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo 67

Tabel 4.10 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo 67

Tabel 4.11 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo..... 68

Tabel 4.12 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo..... 68

Tabel 4.13 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo 69

Tabel 4.14 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 69

Tabel 4.15 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo..... 70

Tabel 4.16 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 70

Tabel 4.17 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perhubungan..... 71

Tabel 4.18 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Candi 72

Tabel 4.19 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tanggulangin 72

Tabel 4.20 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Jabon 73

Tabel 4.21 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Porong 73

Tabel 4.22 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Krembung 73

Tabel 4.23 Penempatan Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tulangan..... 74

Tabel 4.24 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan 74

Tabel 4.25 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP 75

Tabel 4.26 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pangan dan Pertanian 75

Tabel 4.27 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Sosial 76

Tabel 4.28 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 76

Tabel 4.29 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Tenaga Kerja 77

Tabel 4.30 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perumahan, Permukiman, CK Dan TR 78

Tabel 4.31 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di TPA Jabon 78

Tabel 4.32 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tarik 79

Tabel 4.33 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Balongbendo 79

Tabel 4.34 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Wonoayu 80

Tabel 4.35 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Krian 80

Tabel 4.36 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Waru 81

Tabel 4.37 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Sedati 81

Tabel 4.38 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Taman 82

Tabel 4.39 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Sukodono 82

Tabel 4.40 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 83

Tabel 4.41 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan..... 83

Tabel 4.42 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja 84

Tabel 4.43 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah..... 84

Tabel 4.44 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Komunikasi dan Informatika 85

Tabel 4.45 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Inspektorat Daerah 85

Tabel 4.46 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 86

Tabel 4.47 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 86

Tabel 4.48 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas PPPA dan KB 87

Tabel 4.49 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pelayanan Pajak Daerah..... 87

Tabel 4.50 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah... 88

Tabel 4.51 Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Mall Pelayanan Publik 88

Tabel 4.52 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari 2021 89

Tabel 4.53 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Februari 2021 91

Tabel 4.54 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Maret 2021 94

Tabel 4.55 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2021 96

Tabel 4.56 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Mei 2021 98

Tabel 4.57 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Juni 2021 101

Tabel 4.58 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Juli 2021 103

Tabel 4.59 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Agustus 2021 104

Tabel 4.60 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan September 2021 108

Tabel 4.61 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Oktober 2021 111

Tabel 4.62 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan November 2021 114

Tabel 4.63 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Desember 2021 116

Tabel 4.64 Rata-Rata Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 119

Tabel 4.65 Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 120

Tabel 4.66 Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 122

Tabel 4.67 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari 2022 125

Tabel 4.68 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Maret 2022 127

Tabel 4.69 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Agustus 2021 130

Tabel 4.70 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2022 132

Tabel 4.71 Rata-Rata Penggunaan Badwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Per April) 135

Tabel 4.72 Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 136

Tabel 4.73 Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 138

Tabel 4.74 Aplikasi Pada OPD Kabupaten Sidoarjo 148

Tabel 4.75 Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet Untuk Kegiatan Kantor 168

Tabel 4.76 Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet Untuk Kegiatan Pelayanan Publik 170

Tabel 4.77 Jumlah Laptop Yang Terkoneksi Internet 172

Tabel 4.78 Jumlah Handphone Terkoneksi Internet 174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistematika Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 8
Gambar 2.1 Kelompok Sasaran Penggunaan E-Governmnet 26
Gambar 4.1 Bagian Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan Internet 43
Gambar 4.2 Jumlah Staf Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan Internet 44
Gambar 4.3 Gangguan Jaringan Internet 6 bulan terakhir 45
Gambar 4.4 Macam-Macam Gangguan Internet 46
Gambar 4.5 Infrastruktur Menara Jaringan Telekomunikasi 47
Gambar 4.6 Pusat Data dan Pemulihan Data 47
Gambar 4.7 Jaringan Intranet Antar-OPD 48
Gambar 4.8 Internet Protocol Public 51
Gambar 4.9 Routing 51
Gambar 4.10 Sistem Pengamanan Informasi 52
Gambar 4.11 Bandwidth Internet 53
Gambar 4.12 Penempatan Server 53
Gambar 4.13 Repository Data 54
Gambar 4.14 Fixed Narrowband 55
Gambar 4.15 Fixed Narrowband 56
Gambar 4.16 Mobile Broadband 56
Gambar 4.17 Fiber Optic 57
Gambar 4.18 Satelit 58
Gambar 4.19 Website Dinas 141
Gambar 4.20 Youtube Dinas 141
Gambar 4.21 Instagram Dinas 142

Gambar 4.22 Facebook Dinas 143
Gambar 4.23 Tiktok Dinas 143
Gambar 4.24 Kegiatan Kerja 144
Gambar 4.25 Kegiatan Pelayanan 144
Gambar 4.26 Aplikasi Pelayanan 145
Gambar 4.27 Wifi Publik 160
Gambar 4.28 Streaming Video 161
Gambar 4.29 Streaming Musik 161
Gambar 4.30 Gaming 162
Gambar 4.31 Google Meet 163
Gambar 4.32 Zoom 163
Gambar 4.33 Koran on-line 164
Gambar 4.34 Penggunaan Televisi Sebagai Alat Bantu Kegiatan Atau Pelayanan Publik 165
Gambar 4.35 Penggunaan Radio sebagai Alat Bantu Kegiatan atau Pelayanan Publik 165
Gambar 4.36 Penggunaan Telepon sebagai Alat Bantu Kegiatan Pekerjaan dan Pelayanan 166
Gambar 4.37 Penggunaan komputer dan internet untuk Kegiatan Pekerjaan dan Pelayanan 167
Gambar 4.38 Kebutuhan Bandwidth 175
Gambar 4.39 Membangun Masyarakat Informasi 176
Gambar 4.40 Meningkatkan Iklim Investasi dan Kompetisi 177
Gambar 4.41 Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance 177
Gambar 4.42 Partisipasi Masyarakat 178
Gambar 4.43 Pembuatan Kebijakan dan Manajemen Pengetahuan 179
Gambar 4.44 Meningkatkan Informasi Publik 179
Gambar 4.45 Meningkatkan Pelayanan Publik 180
Gambar 4.46 Meningkatkan Efisiensi dan Manajemen Sumber 181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan determinasi perubahan sosial yang dapat terjadi pada individu, organisasi, pemerintahan, dan masyarakat. Pesatnya perkembangan TIK beserta jaringan internetnya banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dan menunjang pembuatan keputusan baik pada organisasi modern maupun pemerintahan dalam waktu yang relatif cepat, akurat, dan efisien. Karenanya, perkembangan teknologi informasi komunikasi perlu direspon oleh organisasi modern maupun pemerintahan dengan mendesain sistem informasi berbasis komputer dan website.

Keberadaan organisasi yang berfungsi, berwenang, dan bertanggung dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting dalam menjalankan tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, dan penyediaan layanan TIK. Selain fungsi tersebut, organisasi juga mampu merencanakan, mengkaji, menyediakan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan TIK mulai hardware, software, jaringan komunikasinya, serta fasilitas pendukung lainnya yang relevan. Ketersediaanya tersebut bertujuan untuk memberikan layanan yang mendukung *e-government*, pelayanan publik yang optimal, serta birokrasi pemerintahan yang transparan. Dalam beberapa kajian menjelaskan bahwa investasi teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi pemerintahan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Bandi, 2006; Rahadi, 2007; Jayanti, 2008; Mardjiono, 2009; Nasir & Ranti, 2011), penganggaran dan pertanggungjawaban (Rahmawati, 2010; Darno, 2012), pelayanan publik yang transparan,

efektif, efisien, dan akuntabel (Lestari, 2020); partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyusunan kebijakan (Abadi, 2015).

Dalam instansi pemerintah, internet dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dalam proses pengolahan data yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan ataupun untuk pengambilan suatu keputusan kebijakan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan bantuan teknologi berupa internet dapat memberikan pelayanan yang baik. Selain itu dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan masyarakat terlibat secara aktif dalam suatu perumusan kebijakan. Dikarenakan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat memberikan respon dengan cepat terhadap pelayanan pemerintah; masyarakat dapat merasakan pelayanan pemerintah secara gratis; dan masyarakat dapat pula menghindari terjadinya penyimpangan pelayanan seperti pungutan liar. Masyarakat juga merasa aman dan terlayani oleh pemerintah. Selain itu dengan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat juga dapat mengakses suatu pelayanan melalui website di mana saja dan kapan saja (Coates, 2001).

Dengan begitu pemerintah dituntut agar bisa *survive* di tengah revolusi teknologi informasi komunikasi. Pemerintah harus bisa bertransformasi dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan di era *disruption* dan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang di dalam Pasal 28B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bahwasanya untuk bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang ada, organisasi pemerintah daerah harus mengimbanginya dengan kesiapan dan keberadaan media atau alat yang dibutuhkan sebagai penunjang. Seperti halnya keberadaan komputer, jaringan internet yang luas dan lain sebagainya. Selain itu hal yang terpenting adalah sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengoprasionalkan media tersebut. Jika adanya media tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang mempuni maka kesenjangan dalam penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan menjadi kendala atau penghambat dalam perkembangannya di era ini.

Tidak hanya sumber daya manusia (SDM) yang sangat penting untuk saat ini. Pandemi Covid-19 yang terjadi, telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia. Akibat *social distancing* dan *phsyical distancing* menjadikan istilah *working from home* menejadi keniscayaan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peranan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut. Jaringan internet beserta teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai akses pelayanan kepada masyarakat, interaksi antar OPD dan lain sebagainya. Sebagai contoh teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai sosialisasi dan seminar bagi pemerintah; teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai video converence dan banyak manfaat lainnya. Kejadian itu menjadikan tambahan bagi tingkat kesiapan dalam jaringan internet melalui pemanfaatan penggunaan teknologi dan komunikasi sangat diperlukan.

Upaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan dengan cara pengukuran pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya pengukuran tersebut, maka dapat diketahui kesiapan, kelengkapan dan kebutuhan yang diperlukan di Kabupaten Sidoarjo yang berguna mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada kondisi saat ini, bahkan di waktu yang akan datang. Selain itu dengan pengukuran yang dilakukan dapat mengukur tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga nantinya sumber daya manusia yang terukur menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu melakukan perbaikan terhadap kondisi yang masih kurang dan bermasalah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam kegiatan Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan Dan Strategi Nasional pengembangan E-government
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud kegiatan penyusunan dokumen Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah menyusun dokumen pemanfaatan internet Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

2) Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan dokumen Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 meliputi:

1. Untuk mengukur pemanfaatan internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai perencana pembangunan daerah.
2. Untuk memperoleh informasi pemanfaatan internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
3. Untuk memperoleh suatu ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Untuk mengetahui dan mengukur proyeksi pemanfaatan internet di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di waktu yang akan datang.

1.4 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dalam penyusunan dokumen Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah dokumen Pengukuran Pemanfaatan Internet Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo tahun 2022.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Materi yang akan dibahas dalam Kegiatan penyusunan dokumen Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Orqanisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 antara lain:

1. Mengidentifikasi pemanfaatan internet di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengukur proyeksi angka/nilai yang ideal pada perhitungan pemanfaatan internet Kabupaten Sidoarjo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari, yaitu bulan April hingga bulan Juni. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari diantaranya adalah melakukan persiapan selama 1 (satu) bulan di bulan April; Turun lapangan atau survei data ke OPD selama 2 (dua) bulan di bulan April dan Mei; Memberikan laporan pendahuluan di bulan Mei; Menginput data di bulan Mei dan Juni; Memberikan laporan antara di bulan Mei dan Juni; Mengadakan koreksi atas perbaikan dan masukkan di

bulan Mei dan Juni; Melaksanakan laporan akhir di bulan Mei dan Juni. Berikut tabel jangka waktu pelaksanaan:

Tabel 1.1: Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	April	Mei	Juni
1.	Persiapan			
2.	Survei data ke OPD			
3.	Laporan Pendahuluan			
4.	Input Data			
5.	Laporan Antara			
6.	Mengadakan koreksi atas perbaikan dan masukkan			
7.	Laporan Akhir			

1.7 Sistematika Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

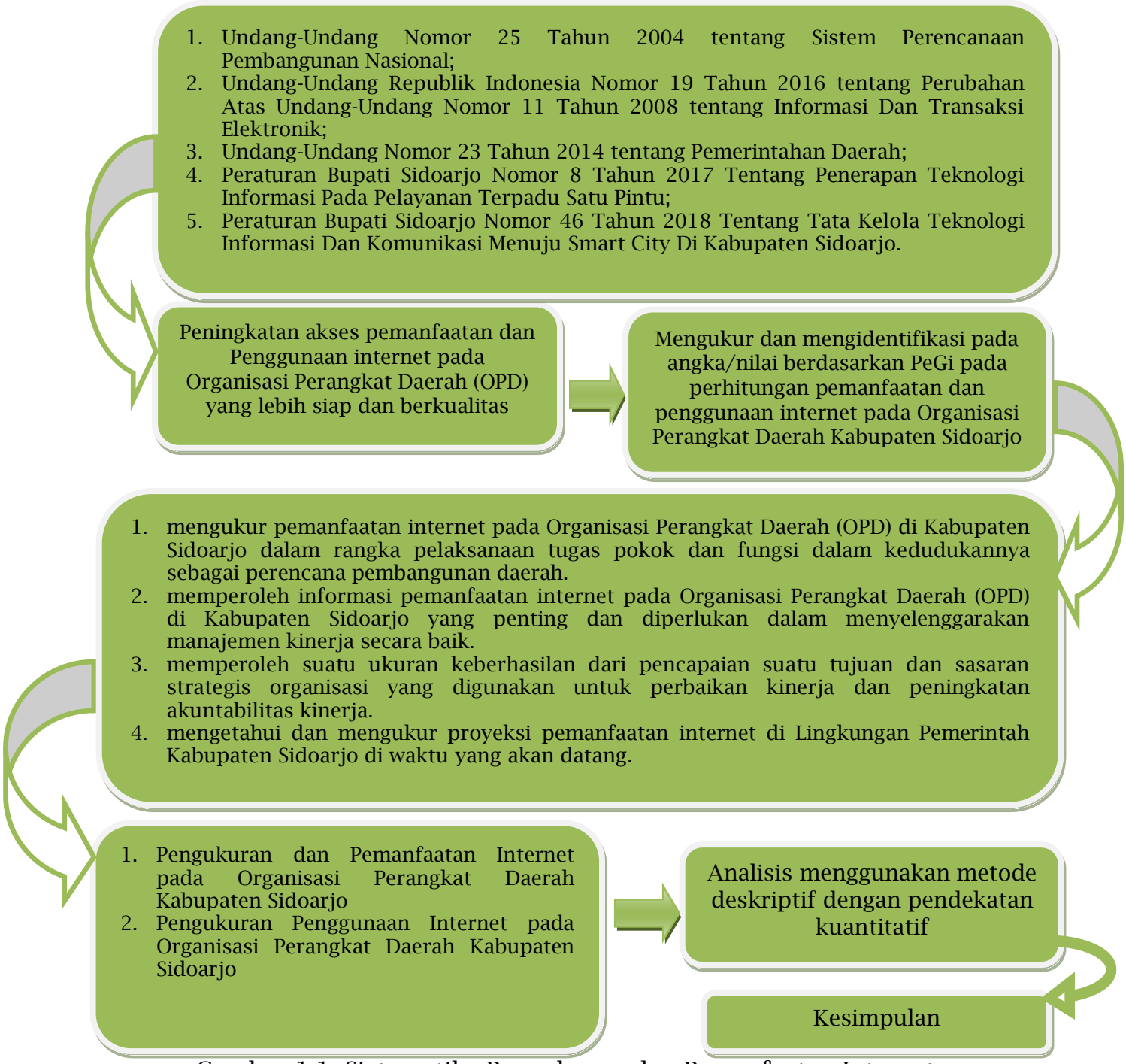

Gambar 1.1: Sistematika Pengukuran dan Pemanfaatan Internet pada Operasinal Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kebijakan Berdasarkan Undang-Undang

2.1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Selanjutnya pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pasal 3 menjelaskan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik bertujuan diantaranya:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan;
5. dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

2.1.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan perundangan ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Setiap orang juga berhak meliputi:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini;

d. dan atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Kemudian Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2.1.3 Instruksi Presiden Republik Indonesianomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan Dan Strategi Nasional pengembangan e-Government

Peraturan ini menjelaskan bahwa Indonesia dituntut untuk melaksnaakan perubahan sesuai perkembangan zaman. Dikarenakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *E-government* diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-government* lebih rinci dan jelas.

Agar dapat mencapai tujuan dari *E-government* diperlukan langkah-langkah strategis, yakni:

1) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

2) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. (6) Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

2.1.4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Peraturan ini menjelaskan bahwa penerapan Tata Kelola TIK di institusi-institusi pemerintahan dapat dimanfaatkan dalam 3 perspektif yaitu nasional, institusional, dan publik. Manfaat bagi Nasional yang dapat dirasakan diantaranya:

1. Koordinasi dan integrasi Rencana TIK Nasional.
2. Standar rujukan kualitas penyelenggaraan TIK di seluruh institusi pemerintahan dapat didapatkan.
3. Dapat memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di seluruh institusi pemerintahan.

Sedangkan manfaat bagi institusional adalah setiap institusi pemerintahan akan:

1. Mendapatkan batasan dan panduan sesuai *best practice* dalam penyelenggaraan TIK-nya di lingkungan masing-masing.
2. Mengoptimalkan ketercapaian *value* dari penyelenggaraan TIK di lingkungan kerjanya masing-masing: internal manajemen & pelayanan publik.

Selanjutnya manfaat bagi Publik yaitu masyarakat diharapakan mendapat manfaat seperti:

4.1. Kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

4.2. Transparansi kriteria batasan penyelenggaraan TIK oleh institusi pemerintah, sehingga dapat melakukan fungsi social control.

2.1.5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan ini dibuat bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk mensinergikan pemanfaatan dan pengembangan TIK menuju Sidoarjo Smart City yang meliputi:

a. Terciptanya mekanisme penyediaan dan akses informasi, dan pelayanan publik berbasis TIK secara online;
b. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan;
c. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan TIK;
e. menjamin terlaksananya pemanfaatan hardware, software maupun sumber daya manusia TIK dilingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara terstruktur, transparan dan akuntabel;

f. menjamin terlaksananya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi sistem informasi data di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
g. menjamin terlaksananya mutu layanan publik dan pemerintahan melalui pemanfaatan TIK.

Mengenai penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo berasaskan:

1. Kemanfaatan, bahwa penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Keproduktivitasan, bahwa penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan standarisasi dalam pengolahan data dan penyediaan informasi;
3. Keterbukaan, bahwa penyelenggaraan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
4. Kevaliditasan, bahwa penyelenggaraan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian secara akurat, dan mutakhir;
5. Kesinergisitasan, bahwa penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
6. Keintegritasan, bahwa penyelenggaraan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pelayanan publik melalui sistem jaringan;
7. Keefektivitasan dan keefisiensian, bahwa penyelenggaraan TIK dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun penunjang secara efektif (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya);

8. Keterpaduan, bahwa penyelenggaraan TIK merupakan satu kesatuan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional;
9. Keotorisasian, bahwa penyelenggaraan TIK terkait pemilikan dan penyajian informasi harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
10. Keamanan dan keandalan, bahwa penyelenggaraan TIK harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi, menjamin keamanan dan keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan;
11. Kestandarisasian, bahwa penyelenggaraan TIK memiliki enam standar sebagai landasan integrasi sistem aplikasi atau sistem informasi, yaitu: 1) Standarisasi perangkat keras; 2) Standarisasi perangkat lunak; 3) Standarisasi data induk (master data); 4) Standarisasi media jaringan komunikasi; 5) Standarisasi keamanan informasi; 6) Standarisasi sumber daya manusia.

Selanjutnya dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa terdapat sinergi antara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan smart City yang dijelaskan dalam Pasal 14 bahwa:

a. Setiap Perangkat Daerah mengutamakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK.
b. Hal-hal yang dapat disinergikan adalah proses bisnis, teknologi, dan sumber daya manusia.
c. Pelaksanaan sinergi TIK dilakukan atas asas manfaat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance dan sesuai dengan Rencana Induk Smart City.
d. Dalam hal sinergi TIK antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta, setiap perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

untuk penyediaan infrastruktur pendukung, keamanan informasi, dan integrasi data.

Dan peraturan ini juga menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai GCIO yang mengkoordinasikan pengelolaan Smart City dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Dewan TIK/Smart City. Pengelolaan Smart City melibatkan seluruh stakeholder yang menggunakan sistem dan transaksi elektronik. Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam membentuk tim pelaksana kegiatan Pengelolaan Smart City.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengacu pada penggunaan peralatan elektronik (terutama komputer) untuk memproses suatu kegiatan tertentu. TIK mempunyai kontribusi yang potensial untuk berperan dalam mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Di Indonesia, bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu dari enam bidang fokus utama pengembangan iptek (Ristek, 2005), yaitu: [1] ketahanan pangan, [2] sumber energi baru dan terbarukan; [3] teknologi dan manajemen transportasi, [4] teknologi informasi dan komunikasi, [5] teknologi pertahanan, dan [6] teknologi kesehatan dan obat-obatan. Dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, TIK memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung tersedianya informasi pembangunan yang relevan dan tepat waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi adalah wadah peralatan teknis yang digunakan dalam proses penyampaian

informasi. Secara lebih terinci, maka terdapat dua bagian dalam teknologi yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi beraneka ragam hal yang memiliki hubungan dengan suatu proses, penggunaan alat bantu. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara menggunakan alat bantu guna melakukan proses penyampai-an informasi atau data ke publik.

Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam KBBI tidak mengarah pada pengertian TIK di bidang teknologi dan informasi. Namun, di dalam KBBI terdapat pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Asosiasi Teknologi Informasi Amerika (ITTA/*Information Technology Association of America*) menjelaskan pengertian TIK sebagai studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi. Hal-hal tersebut berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan juga perangkat lunak pada komputer.

Rusman, dkk (2013) berpendapat bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan serangkaian tahapan mengenai penanganan informasi. Tahapan tersebut meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan mengenai saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi yang dilakukan secara selektif, penyimpanan serta penelusuran informasi dan penggunaan-penggunaan informasi. Oleh karena itu, pengertian TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, serta pemindahan informasi dari satu media ke media lainnya (Haag dan Keen, 1996; Keown,

2001; Susanto, 2002; Williams & Sawyer, 2003; Laudon, 2004; Brown, 2005; Warsita, 2008; Rusman, 2013; Pasaribu, 2017).

TIK didasarkan pada informasi digital antara 1 dan 0 serta mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringannya. TIK tidak hanya mencakup teknologi yang terkait dengan alat-alat informasi, tetapi informasi adalah titik awal memahami TIK. TIK dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme baru dari sumber daya yang sudah ada yaitu informasi.

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran dan manfaat di bidang pemerintahan. Peran dan manfaatnya adalah menjadikan masyarakat mampu mengakses kebijakan pemerintah lebih mudah dan efisien. Masyarakat dapat memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Karenanya, penguatan instansi pemerintahan melalui visi misi yang mengarah kebijakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dan dioptimalkan. Optimalisasi penggunaan TIK perlu adanya *knowledge support* pengguna agar dapat memahami arti penting ketercapaian *targeting* penerapan teknologi informasi.

Berikut peran teknologi infomasi dan komunikasi pada bidang pemerintahan:

1. Memberikan Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, seluruh pelayanan penyelenggara pelayanan publik dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya tempat kerja. Informasi dapat diakses di kantor, atau rumah tanpa harus secara fisik tiba ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat luas. TIK berperan sebagai sarana keterbukaan (transparansi) yang dapat menghilangkan ketidakpercayaan pada semua pihak.
3. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Peran TIK dalam segi ini dapat dicontohkan dengan cara semua penyelenggara ataupun pelaksana pelayanan pada pemerintahan dapat berkoordinasi dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan.
4. Teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat bagi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah pusat ataupun daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mewujudkan tujuannya.

Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Setiap daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis.

Berikut manfaat dari adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

1. Sebagai media untuk bertukar informasi.

   Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang sangat berdampak bagi media baik cetak maupun online. Media-media tersebut dapat digunakan dengan mudah berkat perkembangan teknologi tersebut. Contoh sederhananya seperti media cetak yang kini sudah mulai beralih menjadi media online. Umumnya, dulu orang akan mem-baca media cetak

berupa koran untuk mengetahui berita-berita yang sedang terjadi, namun kini sudah berganti, media cetak berinovasi menjadi media online.

2. Sarana Komunikasi

   Teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang luar biasa pada sarana komunikasi. Komunikasi yang dari orang ke orang tidak hanya terjadi dalam jangkauan luas dalam satu wilayah, tetapi sudah menembus batas-batas negara.

3. Mempermudah pekerjaan, aktivitas, produktivitas manusia

   Berkat adanya TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, seseorang bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mudah. Selain itu, mereka juga dapat melakukan pekerjaan dengan cepat. Hal itu meningkatkan produktivitas seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

4. Menghemat biaya

   Menghemat biaya juga merupakan salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti di dalam bidang pemerintahan, masyarakat dapat mengantri melalui online, masyarakat dapat melengkapi syarat administrastif kependudukan secara online, masyarakat dapat memiliki dokumen yang dibutuhkan secara online dan lain lain. Semua yang serba online menjadikan masyarakat tidak perlu keluar rumah, sehingga tidak perlu adanya tambahan biaya lainnya yang tidak dibutuhkan.

Kelengkapan TIK yang ketiga adalah jaringan atau internet. Internet merupakan singkatan dari *Interconected Network*. Ada yang memperpanjangkan internet dengan istilah *International Network*. Interkoneksitas jaringan tersebut disusun dengan menggunakan perangkat *software* (perangkat lunak jaringan komputer) dan *hardware* (perangkat keras jaringan komputer).

Internet acapkali didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang terhubungkan dengan komputer lainnya secara global (Sibero,2011; Lee, 2009) melalui sebuah protocol yang disebut *Transmision Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP). Jaringan ini sangat luas areanya sehingga dapat dipandang dan dipahami sebagai sumber informasi (Snell, 2011), hiburan (Sidharta,1996; Sarwono,2012), media bisnis, politik (Sidharta,1996), pendidikan/akademik, pemerintahan, organisasi, hingga perorangan (O'Brian,2003; Ramdhani,2003).

Ada tiga keistimewaan penggunaan internet (Kayo, Mori, & Takana, 1996). **Pertama** bahwa internet dapat memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk saling memberikan dan menerima informasi secara bebas. **Kedua**, internet bersifat lebih dinamis dan dapat mengikuti perkembangan waktu. Sebagai media informasi, internet dapat memberikan akses informasi-informasi terbaru jika dibandingkan dengan informasi di media cetak. Ketiga, internet merupakan jaringan yang berkarakter interaktif. Melalui internet, setiap penggunanya dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya di dunia setiap saat.

Pengukuran pemanfaatan internet telah banyak dilakukan, diantaranya adalah oleh Abdujalilov (2014) dengan mengamati trafik pada HTTP protocol selama 2 jam, yaitu pukul 10.00 dan 22.00 dengan menggunakan *NetFlow.* Hal sama juga dilakukan oleh Amron (2014). Selain *NetFlow,* pengukuran pemanfaatan dapat dilakukan dengan menggunakan SNMP (Henderson,2014) dan PRTG (Andyka, 2016). Penggunaan apalikasi itu dapat membantu mengetahui permintaan akses internet saat ini dan yang akan datang karena penggunaan internet telah berevolusi dari *browsing,* file transfer, dan email menjadi multimedia *content* seperti web tv, *streaming, youtube.com*, *facebook.com*, dan *game online*. Kecuali itu hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa 88% trafik

internet digunakan oleh *TCP protocol* sebesar 88% dan sisanya 11% digunakan oleh *UDP protocol*.

2.2.2 Pengertian dan Penerapan E-government

Hasil dari adanya teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan lahirnya *E-government.* Nag Yeon Lie (2010), berpendapat bahwa *E-government* secara umum didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Menurutnya E-government mempunyai tujuan sebagai penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Dan pelaksanaan *E-government* dikatakan sukses, jika memberikan layanan pemerintah secara *online*, tanpa kertas, berbasis pengetahuan dan transparan.

Sedangkan Worldbank (2011) berpendapat bahwa *e-governement* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Network, internet dan *mobile computing* yang mengubah pola hubungan antar pemerintah, masyarakat dan kalangan bisnis. Sehingga dalam penerapan *E-government* bertujuan memberikan layanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi dan hubungan dengan bisnis serta industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan lebih efisien.

Pacific Council International Policy (2002) menyatakan bahwa *E-government* didefinisikan sebagai penggunaan TIK yang membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, memberikan akses informasi lebih luas kepada masyarakat, dan menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. e-Government juga dapat meningkatkan meningkatkan

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, bisnis, dan instansi pemerintah lainnya, memungkinkan masyarakat melakukan interaksi dan menerima layanan/jasa dari pemerintah federal, negara bagian, atau lokal selama dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu (Palvia, dkk, 2007).

Keberhasilan implementasi e-government sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada baik modal, alam, dan manusia, budaya, pendidikan, sejarah, kondisi ekonomi, dan pandangan politikdari negara yang bersangkutan (Safitri, 2016). Karenanya, sebelum melaksanakan sistem informasi yang berbasis komputer, terlebih dahulu membenahi sistem informasi yang belum berbasis komputer. Jadi, secara spontan takkan memberikan pengaruh yang signifikan jika sistem informasi yang tidak berbasiskan komputer kurang baik. Tidak heran jika hanya negara maju yang sudah dapat melaksanakan *e-government* (pada konteks *e-government* yang sepenuhnya, tidak semata-mata hanya situs informasi dari pemerintah).

Dari pengertian-pengertian *e-government* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa E-government adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisnis, dan sesama pemerintah agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Implementasi atau penerapan E-government bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan memeprbaiki layanan yang diberikan pemerintah, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta mengurangi biaya administrasi dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat bisnis, dan sesama pemerintah.

1. Pengukuran E-government

Ada beberapa aspek yang terdapat pada aplikasi E-government menurut Rianto dan Lestari (2012):

a) Hardware

Dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi tak terpisahkan dari keperluan sumber daya perangkat keras komputer (hardware). Aplikasi E-government sebenarnya dapat menggunakan komputer yang berdiri sendiri tanpa perlu tersambung dengan komputer lainnya, namun aplikasi lain cenderung menginginkan sebuah jaringan LAN (Local Area Networking) yaitu jaringan memakai kabel, dapat dipakai secara intern. Jenis aplikasi biasanya perlu banyak komputer seperti database server, application server, proxy server, firewall server, email server, domain server, dan lainnya. Ada beberapa fungsi server yang dapat disatukan, tergantung pada beban kerja yang dimiliki karyawan. Bagi server yang mempunyai beban kerja cukup berat sebaliknya terpisah dan disediakan tersendiri.

b) Software

Dalam aspek penerapan E-government yang cukup penting dalam mendukung perangkat keras komputer yaitu perangkat lunak komputer (Software). Dimana software pisah kedalam dua bagian yakni software aplikasi dan software operasi.

c) Data dan Informasi

Komponen berikut ini merupakan data dan informasi. Aspek ini sering kurang mendapatkan perhatian oleh pelaksana E-government. Padahal ketersedian data masukan, baik berupa lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi bahan utama proses E-government guna mendukung tujuan penyebarluasan informasi.

d) Struktur Organisasi

Dari berbagai referensi mengatakan jika idealnya implementor E- Government ialah lembaga struktural yang posisinya satu tingkat di bawah top leader. Dengan kondisi ini, besar kemungkinan kebijakan E- Government dilaksanakan oleh lembaga struktur yang berada dua atau bahkan tiga tingkat dibawah top leader. Yang penting ada kesesuaian antara kegiatan E-government dengan tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan.

e) Komunikasi

Kebijakan E-government adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga pemerintah termasuk institusi-institusi di daerah. Antara pemerintah pusat dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana tentunya harus mempunyai persepsi yang sama. Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan E-government. Proses komunikasi digunakan dalam bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui acara rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau dalam pertemuan lainnya. Tujuannya untuk menumbuhkan perspesi yang sama antara pembuat kebijakan dengan implementasinya. Aspek komunikasi bisa dikatakan berhasil jika dimana para pelaksana mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam bidang E-government.

f) Sikap Pelaksana

Seharusnya suatu kebijakan ditanggapi dengan benar oleh para pelaksananya. Sikap tanggap sangat bersifat subjektif, karena berkaitan dengan motivasi, keinginan atau niat. Terkadang tanggap dapat tumbuh dalam bentuk sikap kurang aktif tetapi ada juga

yang bersifat resistensi. Tanggapan dari pelaksana ini dapat diketahui dari aktivitasnya. Jika para pelaksana melaksanakan kebijakan E-government secara tetap maka respon positif. Lembaga atau individu lainnya yang diposisikan sebagai costumer, dapat diukur tingkat kepuasannya terhadap produk-produk E-Government, misalkan produk pusat data, aplikasi pendukung pekerjaan kantor, aplikasi pelayanan publik, email, SMS dan lainnya.

2. Kegunaan E-government

Naggy K. Hanna dalam bukunya yang berjudul Transforming Government and Building The Information Society menjelaskan bahwa sasaran dalam penggunaan E-government adalah peningkat-an layanan pemerintah kepada warga (G2C); peningkatan transaksi antara pemerintah dan bisnis (G2B), yang mengarah pada perbaikan lingkungan bisnis dan sektor UKM yang layak; dan peningkatan manajemen internal pemerintah melalui integrasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah (G2G) dan pegawai yang terinformasi dan berdaya dalam pelayanan publik (G2E). Jika digambarkan akan terlihat seperti gambar di bawah ini:

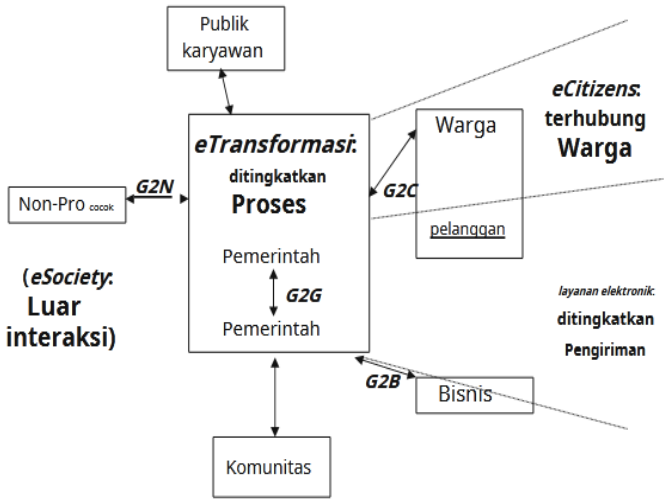

Gambar 2.1: Kelompok Sasaran Penggunaan E-government

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari adanya E-government diantaranya:

1. mempromosikan penggunaan TIK yang didorong oleh permintaan, bukan oleh teknologi atau pasokan dalam pemerintahan;
2. berfokus pada tujuan yang luas dan tantangan umum reformasi sektor publik, serta membantu memobilisasi tuntutan politik dan sosial untuk penggunaan TIK yang efektif dalam pemerintahan;
3. mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang berpotensi dapat mendukung berbagai tujuan reformasi publik, sehingga dapat memanfaatkan penggunaannya secara bersamaan untuk tujuan ini. (misalnya, untuk menggunakan pengadaan E-government, untuk meningkatkan manajemen sumber daya, meningkatkan daya saing, memberikan harga yang transparan, mengurangi korupsi, meningkatkan lingkungan bisnis, dan memungkinkan partisipasi oleh sejumlah besar perusahaan lokal dan UKM);
4. mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan TIK saat ini dan dukungan untuk tujuan reformasi utama, dan peluang untuk memperluas kemungkinan dan pilihan strategis penggunaan TIK untuk memberikan layanan baru dan nilai tambah yang lebih tinggi;
5. menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan di bidang manajemen sektor publik, dan spesialis e- government dan TIK, sehingga arah pembangunan kedepannya dapat lebih jelas dan terarah serta terukur.

Adanya kerangka kelompok sasaran dan kegunaan dari pemanfaatan E-government menjadikan lahirnya tujuan dari mereformasi E-government dalam pemerintahan diantaranya:

1. E-governement dapat mengubah pola pelayanan pemerintah agar kebijakan yang selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat
2. peningkatan efisiensi dan sumber pengelolaan
3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
4. Peningkatan pembuatan kebijakan
5. Peningkatan Investasi iklim dan daya saing
6. Peningkatan pemerintahan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan
7. serta peningkatan pasrtisipasi pada masyarakat.

Dari tujuan reformasi tersebut yang paling tren di negara berkembang termasuk Indonesia adalah E-government yang digunakan sebagai ukuran peningkatan akses pelayanan dan penilai kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dimengerti mengingat meningkatnya harapan untuk layanan publik yang lebih baik, defisit besar dalam akses dan kualitas layanan semacam itu di negara-negara berkembang, dan tingginya biaya transaksi untuk berurusan dengan birokrasi yang berat. Pemberian layanan, terutama jika disampaikan secara langsung, merupakan bagian yang mahal dari pekerjaan pemerintah. Pemerintah sering menghadapi *trade-off* yang sulit antara meningkatkan kualitas layanan kepada mereka yang lebih mampu, terutama di daerah perkotaan, dan memperluas akses kepada mereka yang memiliki akses terbatas atau tidak memiliki akses, khususnya masyarakat miskin, pedesaan, dan UKM. Aplikasi E-government dapat memberikan kualitas dan akses.

Ada juga keharusan politik bagi para pemimpin sektor publik untuk menggunakan peningkatan layanan yang terlihat untuk membangun dukungan eksternal bagi reformasi pemerintah yang lebih luas. Dukungan ini bisa datang dari asosiasi bisnis,

kelompok swasta, masyarakat terorganisir atau, lebih luas lagi, pemilih. Tidak seperti penggunaan E-government untuk transparansi, demokrasi partisipatif, dan visi lainnya, fokus awal pada peningkatan layanan adalah yang paling tidak mengancam status quo sosial dan politik. Penekanan pada pemberian layanan dapat menjadi titik masuk netral untuk membangun dukungan politik jangka panjang untuk peningkatan kinerja dan transformasi pemerintah (West, 2005).

Ini adalah kategori karya dengan banyak contoh aplikasi inovatif untuk (1) meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik dasar ke daerah pedesaan dan populasi yang kurang terlayani termasuk sertifikat tanah, izin, lisensi, izin, sertifikat; (2) mendukung kesehatan, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang hayat; (3) memberikan pilihan dan persaingan dalam penyampaian layanan melalui perantara informasi dan penggunaan kemitraan publik-swasta; dan (4) secara substansial mengurangi biaya transaksi kepada warga dengan menyediakan pusat layanan satu atap, jendela tunggal, dan portal yang berpusat pada warga, antara lain.

Di seluruh dunia, portal pemerintah menyediakan titik masuk untuk membentuk kembali, mengatur ulang, dan menciptakan kembali pemerintahan—secara virtual. Diorganisasikan dengan tepat di sekitar kebutuhan warga dan semakin dibuat setuju untuk personalisasi berbasis warga, portal ini mengantar era pemerintahan yang mulus, atau "pemerintah tanpa dinding" (Eggers, 2005). Oleh karena itu, warga dan bisnis dapat bertransaksi dengan berbagai lembaga dan berbagai tingkat pemerintahan di satu tempat atau portal. Kehadiran web pemerintah diatur di sekitar istilah yang akrab bagi warga, seperti peristiwa kehidupan atau kelompok sasaran, sehingga

menghilangkan kebutuhan warga untuk menguraikan organisasi pemerintah yang semakin kompleks dan tidak dapat dipahami.

E-government juga dapat membantu warga membuat keputusan berdasarkan informasi dengan berbagi dan mendistribusikan secara luas informasi yang mereka kumpulkan tentang sektor publik dan sektor swasta. Salah satu peran penting pemerintah dalam masyarakat informasi adalah sebagai perantara informasi. Internet, dan pusat informasi dalam kasus negara berkembang, dapat memfasilitasi peran ini dengan mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang akses, kualitas, dan harga layanan apa pun, publik atau swasta.

3. Hubungan E-government dengan Smart City

Smart city di Indonesia dikenal dengan istilah kota pintar, adalah kosep dengan mengembangkan, menerapkan dan melaksanakan teknologi yang digunakan dalam sebuah wilayah perkotaan menjadi hubungan yang kompleks didalam sebuah system yang ada. Sedangkan menurut Giffinger, dkk (2007) menganggap smart city sebagai kota yang cerdas dalam melaksanakan pembangunan melalui menoleh ke masa depan. Pendekatan pembangunan kota menuju smart city memperhatikan isu-isu, yakni kemandiria, keikutsertaan, ketegasan diri, dan kesadaran. Isu kesadaran dapat berpotensi pada mobilisasi jika masyarakat, swasta, dan pemerintahan mengetahui ruag lingkup kota, dengan memperhatikan kota melalui didalam saja tapi juga tahu terhadap lingkungan sekitarnya. Pembangunan kota dilihat dari 6 karakteristik yaitu ekonomi, masyarakat kota, mobilitas, lingkungan, pemerintahan, dan kehidupan.

Menurut Cohen (2012), yang mengemukakan tentang kota cerdas merupakan pendekatan yang luas agar bertambahnya

efisiensi dari operasi kota, kualitas hidup warga kotanya, dan memunculkan perekonomian lokal. Konsep smart city dalam kehidupan sehari-hari lebih memanfaatan teknologi modern. Tidak hanya dalam teknologi informasi dan komunikasi saja, tetapi termasuk teknologi transportasi modern. Dan bermacam-macam unsur disetiap kehidupan di kota juga berkaitan dalam konsep smart city, contohnya efisiensi keberlanjutan, keamanan, dan penghijauan, energi, serta lainnya. Diharapkan dengan adanya upaya pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi itu bisa menunjang manajemen sumber daya, peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya, dan meningkanya kualitas kehidupan masyarakat kota, akan tetapi masih menelaah unsur-unsur keberlanjutan, keamanan, dan penghijauan kotanya. Smart city dibagi kedalam enam jenis yang terdiri dari smart governance, smart people, smart economy, smart living, smart mobility, serta smart environment (Pratama, 2014).

Smart governance memiliki aspek diantarnya partisipasi politik dan layanan untuk masyarakat sebaik fungsi administrasi. Ada beberapa faktor-faktor yang terdapat dalam smart governance, seperti keikut sertaan dalam pengambilan keputusan, pelayanan umum dan sosial, pemerintahan yang terbuka, layanan berbasis elektronik, sarana dan prasaran. Salah satu dimensi dalam smart city adalah smart governance yang mengfokuskan pada tata kelola pemerintahan. Smart governance memiliki tujuan, syarat dan kriteria dalam tahapan pemberdayaan (*empowerment*) dan partisipasi (*participation)* dari masyarakat dengan pemerintah secara bersamaan. Di dalam *smart governance* ada kerjasama melalui pemerintah serta masyarakat dan semoga kedepannya hal tersebut bisa terciptanya tata kelola pemerintah jauh lebih baik. *Smart governance* terbagi ke dalam tiga penjabaran, yakni:

1) Adanya partisipasi masyarakat untuk mengambil keputusan secara langsung maupun online. Implementasi smart city dalam tahapan ini menggunakan teknologi informasi bisa diterapkan menggunakan sistem *decision maker system* (sistem penentu keputusan).
2) Kenaikan jumlah dan kualitas layanan publik. Pelaksanaan *smart city* menggunakan teknologi informasi yang bisa digunakan melalui berikut ini:

a. Menyediakan sistem informasi berbasi web dan mobile untuk pelayanan publik seperti membuat wajib pajak, KTP, SIM dan lainnya.
b. Menyediakan layanan administrasi keuangan/pembayaran jauh lebih efektif, efisien dan otomatis. Contohnya membayar air, telepon, listrik, (PDAM), PBB (Pajak Bumi Bangunan) menggunakan *e-banking* juga transparansi keuangan serta biaya untuk masyarakat.
c. Tersedianya database yang terstruktur dan tertata dengan bagus dalam menyimpan informasi dan data berhubungan dalam layanan publik.

3) Pemerintah yang transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan lebih cerdas dalam menanggapi kebijakan publik yang ada. Penerapan smart city pada smart governance dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu:

a. Tersedianya portal yang berhubngan dengan informasi terbaru tentang pemerintahan yang bisa digunakan oleh masyarakat baik dalam komputer maupun mobile.
b. Informasi serta data yang dipaparkan dikelola secara digital juga tidak ada tekanan dari pihak manapun.

c. Tersedianya sistem informasi yang menunjukan hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah/kota, presiden dan lain-lain.
d. Tersediannya penyajian informasi terkait kebijakan dan masukan pemerintah, serta masyarakat bisa ikut dalam berpartisipasi di dalamnya melalui ide, saran, usul dan kritik.

Dengan adanya smart governance, dapat memperbaiki tatanan pemerintah di Indonesia, terciptanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang harmonis serta proses pemerintahan yang dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin efektif pemanfaatan dan penggunanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diimplementasikan melalui *e-government* maka kota tersebut semakin pintar.

2.2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

1. Prinsip-prinsip SPBE
   a. Efektivitas, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
   b. Keterpaduan, pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
   c. Kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

d. Efisiensi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
e. Akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
f. Interoperabilitas, koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
g. Keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

2. Unsur-unsur SPBE

a. Rencana Induk SPBE Nasional

Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat: a) visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE; b) arah kebijakan SPBE; c) strategi SPBE; d.) peta rencana strategis SPBE. Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkanhasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau perubahan kebijakan strategis nasional. Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

b. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE terdiri atas Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

c. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE terdiri atas Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

d. Rencana dan anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing. Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi Fusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

e. Proses Bisnis

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

f. Data dan informasi

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,

dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

g. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE terdiri atas Infrastruktur SPBE Nasional, serta Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

h. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

h. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

i. Layanan SPBE

Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik

merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1: Dimensi dan Atribut SPBE

No	Dimensi	Atribut
1.	**Rencana Induk SPBE**	Manajemen/Proses Kebijakan TIK Visi dan Misi TIK Strategi Penerapan Kebijakan Pedoman Peraturan
2.	**Arsitektur SPBE**	Data Center Jaringan Data Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK Inventaris Peralatan TIK
3.	**Peta Rencana SPBE**	Pembuatan kebijakan Keputusan Instansi Skala Prioritas TIK Evaluasi/Manajemen Risiko TIK
4.	**Rencana dan Anggaran SPBE**	Pengorganisasian/Fungsi Sistem Perencanaan Dokumentasi *Masterplan* Implementasi *Masterplan* Anggaran/Pembiayaan
5.	**Proses Bisnis**	Investasi iklim dan daya saing
6	**Data dan Informasi**	Akses informasi Sumber pengelolaan Pelayanan publik Transparansi, partisipasi publik
7	**Aplikasi SPBE**	Situs Wajib (Homepage) Aplikasi Fungsional Utama (Pelayanan) Aplikasi Fungsional Utama (Administrasi dan Manajemen) Aplikasi Fungsional Utama (Legislasi) Aplikasi Fungsional Utama (Pembangunan) Aplikasi Fungsional Utama (Keuangan) Aplikasi Fungsional Utama (Kepegawaian) Manual Petunjuk Aplikasi TIK Inventaris Aplikasi TIK Interoperabilitas

8	**Keamanan SPBE**	Keamanan Disaster Recovery Center Pemeliharaan TIK
9	**Layanan SPBE**	Keberadaan Organisasi Tupoksi SOP SDM Pengembangan SDM

Sumber : Perpres SPBE, 2018

BAB III
METODE KAJIAN

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian

Jenis kajian pemanfaatan internet ini adalah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah penyajian data statistik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik. Data angka-angka tersebut mendeskripsikan pengukuran pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) beserta jaringan internet pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

3.2 Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Lokasi penelitian ini berada di 31 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di masing-masing organisasi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam kajian

Sampel penelitian sejumlah 31 responden yang dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kemampuan dan kapasitas responden dalam menjawab semua pertanyaan dalam angket penelitian yang telah disusun. Responden penelitian ini adalah aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi beserta jaringannya di organisasi tempat responden berdinas.

Aparatur sipil negara yang dijadikan responden dalam kajian ini hanya satu orang di masing-masing organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo. Total keseluruhan responden adalah 31 orang yang ada di 31 OPD di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.1: Lokasi Kajian di Kabupaten Sidoarjo

No	Lokasi Kajian	Responden
1.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	1
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	1
3.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo	1
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	1
5.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	1
6.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	1
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	1
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
12.	Dinas Tenaga Kerja	1
13.	Dinas Kesehatan	1
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB	1
15.	Dinas Sosial	1
16.	Dinas Perumahan, Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	1
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1
18.	Dinas Pangan dan Pertanian	1
19.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1
20.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
21.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1
22.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	1
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
25.	Dinas Perhubungan	1
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
27.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1
28.	Dinas Perikanan	1
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	1
30.	Rumah Sakit Umum Daerah	1
31.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta	1

Sumber : Hasil Olah (2022)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer diperoleh melalui pendistribusian angket terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta jaringan internetnya di organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Data mengenai pengukuran penggunaan dan pemanfaatan internet di OPD Kabupaten Sidoarjo menggunakan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE pada kajian penggunaan dan pemanfatan TIK Tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan melibatkan sembilan unsur antara lain rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Untuk mengukur pemanfaatan TIK beserta jaringannya, penelitian juga menggunakan dimensi pemanfaatan, diantaranya adalah:

1. E-governement dapat mengubah pola pelayanan pemerintah agar kebijakan yang selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat
2. peningkatan efisiensi dan sumber pengelolaan
3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
4. Peningkatan pembuatan kebijakan
5. Peningkatan Investasi iklim dan daya saing
6. Peningkatan pemerintahan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan serta peningkatan pasrtisipasi pada masyarakat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disusun dengan menggunakan unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2: Dimensi dan Atribut SPBE

No	Dimensi	Atribut
1.	**Rencana Induk SPBE**	Manajemen/Proses Kebijakan TIK Visi dan Misi TIK Strategi Penerapan Kebijakan Pedoman Peraturan
2.	**Arsitektur SPBE**	Data Center Jaringan Data Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK Inventaris Peralatan TIK
3.	**Peta Rencana SPBE**	Pembuatan kebijakan Keputusan Instansi Skala Prioritas TIK Evaluasi/Manajemen Risiko TIK
4.	**Rencana dan Anggaran SPBE**	Pengorganisasian/Fungsi Sistem Perencanaan Dokumentasi *Masterplan* Implementasi *Masterplan* Anggaran/Pembiayaan
5.	**Proses Bisnis**	Investasi iklim dan daya saing
6	**Data dan Informasi**	Akses informasi Sumber pengelolaan Pelayanan publik Transparansi, partisipasi publik
7	**Aplikasi SPBE**	Situs Wajib (Homepage) Aplikasi Fungsional Utama (Pelayanan) Aplikasi Fungsional Utama (Administrasi dan Manajemen) Aplikasi Fungsional Utama (Legislasi) Aplikasi Fungsional Utama (Pembangunan) Aplikasi Fungsional Utama (Keuangan) Aplikasi Fungsional Utama (Kepegawaian) Manual Petunjuk Aplikasi TIK Inventaris Aplikasi TIK Interoperabilitas
8	**Keamanan SPBE**	Keamanan Disaster Recovery Center Pemeliharaan TIK

9	**Layanan SPBE**	Keberadaan Organisasi Tupoksi SOP SDM Pengembangan SDM

Sumber: Perpres SPBE, 2018

3.5 Penganalisisan Data

Data yang terkumpul selanjutnya dikoding dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah kumpulan data yang berupa angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif dan relatif serta grafik. Data berupa angka-angka tersebut kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang mudah untuk dipahami.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENGUKURAN DAN PEMANFAATAN INTERNET PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pada era digitalisasi saat ini, organisasi perangkat daerah sebagai salah satu garda terdepan pelayanan publik kepada masyarakat di lingkungan daerah memerlukan dan membutuhkan keberadaan internet sebagai sarana prasarana penunjang peningkatan layanan publik. Internet dimanfaatkan dalam proses pengolahan data; perencanaan pembangunan; serta dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan bagi kepentingan masyarakat. Keberadaan sarana prasarana penunjang internet ini, juga harus diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia di masing-masing OPD Kabupaten Sidoarjo, sehinggan pelayanan publik berbasis digitalisasi dapat dilakukan dengan optimal.

Kajian terkait pengukuran dan pemanfaatan internet oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo telah didistribusikan di 31 instansi/OPD dengan jumlah kuesioner sebanyak 31 kuesioner. Kuesioner yang tersebar diisi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah dengan beberapa indikator yang telah disusun diantaranya berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi dan jaringan internet; infrastruktur jaringan internet; sistem pengamanan informasi; repository data/informasi; produk internet; dsb. Hasil perhitungan pada kuesioner pengukuran dan pemanfaatan internet di Kabupaten Sidoarjo dipaparkan dalam data frekuensi sebagai berikut.

4.1 Pengukuran dan Pemanfaatan Internet

4.1.1 Analisis Pengelolaan Sistem Informasi dan Jaringan Internet

1) Bagian Yang Mengelola Sistem Informasi dan Jaringan Internet

Analisis pada karakteristik pengelola sistem informasi dan jaringan internet, dari 31 OPD sebanyak 20 OPD memiliki staf untuk bagian pengelola sistem informasi dan jaringan internet dengan persentase sebesar 64,52%; dan 11 OPD tidak memiliki staf pada bagian pengelola sistem informasi dan jaringan internet dengan persentase sebesar 35,48%. Untuk persentase bagian pengelola sistem informasi dan jaringan internet dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

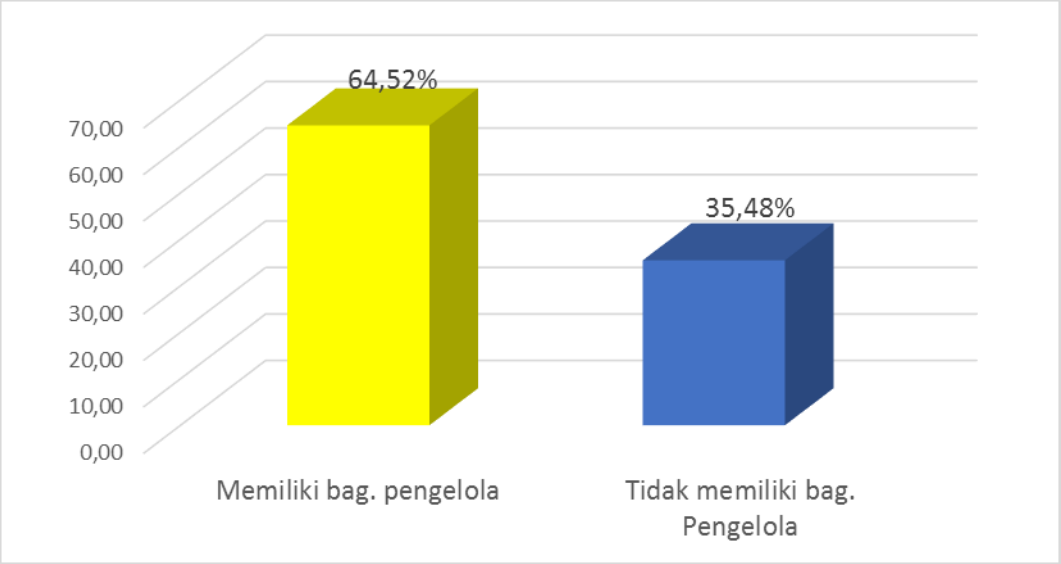

Gambar 4.1 : Bagian Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan Internet

Dari 31 OPD, 11 OPD diantaranya tidak memiliki bagian yang mengelola sistem informasi dan jaringan internet di antaranya: (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang dikelola oleh bagian Pranata Komputer; (2) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang dikelola oleh bagian Sekretariat (Umum); (3) Dinas

Sosial dikelola oleh bagian umum dan kepegawaian; (4) Dinas Perhubungan dikelola oleh Bidang Lalu lintas; (5) Inspektorat Daerah untuk bagian pengelolanya adalah Bidang Administrasi Umum Sekretariat; (6) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dikelola oleh bagian Administrasi Perkantoran; (7) Dinas Pangan dan Pertanian dikelola oleh bagian Pranata Komputer; (8) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dikelola oleh bagian umum dan kepegawaian; (9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan (10) Dinas Tenaga Kerja dikelola oleh bagian Pranata Komputer; (11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dikelola oleh bagian Bidang TLPP dan Sekretariat.

2) Jumlah Staf Yang Mengelola Sistem Informasi dan Jaringan Internet

Jumlah staf pengelola sistem informasi dan jaringan internet berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 76 orang (77,55%). Untuk jenis kelamin perempuan, jumlah stafnya sebanyak 22 orang (22,45%). Untuk persentase jumlah staf pengelola sistem informasi dan Jaringan Internet dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

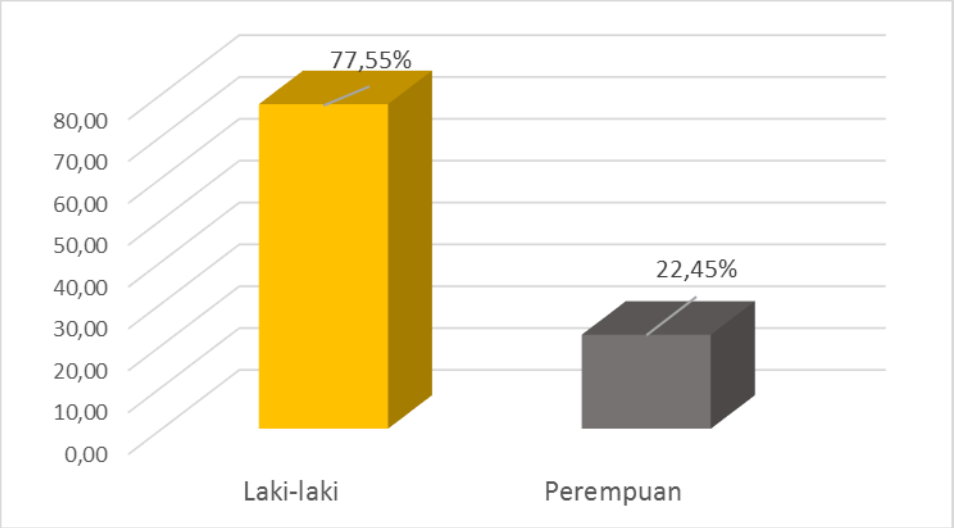

Gambar 4.2: Jumlah Staf Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan Internet

4.1.2 Gangguan Jaringan Internet dalam 6 Bulan Terakhir

Analisis pada gangguan jaringan internet dalam 6 bulan terakhir terjadi di 31 OPD di Kabupaten Sidoarjo. Dari 31 OPD sebanyak 26 OPD (83,87%) mengalami gangguan jaringan internet dan hanya 5 OPD (16,13%) yang tidak mengalami gangguan. Untuk persentase gangguan jaringan internet dapat dilihat melalui Gambar 4.3.

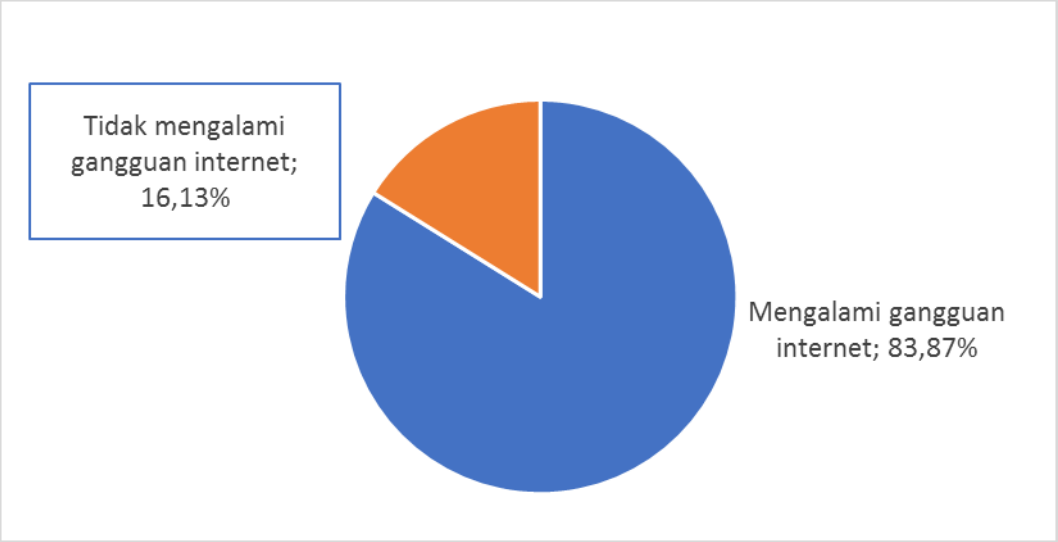

Gambar 4.3: Gangguan Jaringan Internet 6 bulan terakhir

Penyebab gangguan jaringan internet di OPD Kabupaten Sidoarjo antara lain karena adanya koneksi jaringan yang terputus dan kurang lancar; gangguan yang berasal dari provider, dan kabel terputus. Untuk gangguan karena faktor koneksi jaringan terputus dan kurang lancar sebanyak 42,31%. Kemudian sebanyak 38,46% dikarenakan gangguan dari provider. Dan faktor gangguan yang ketiga dikarenakan kabel internet terputus sebanyak 19,23%. Untuk persentase ketiga faktor gangguan koneksi jaringan internet dapat dilihat pada Gambar 4.4.

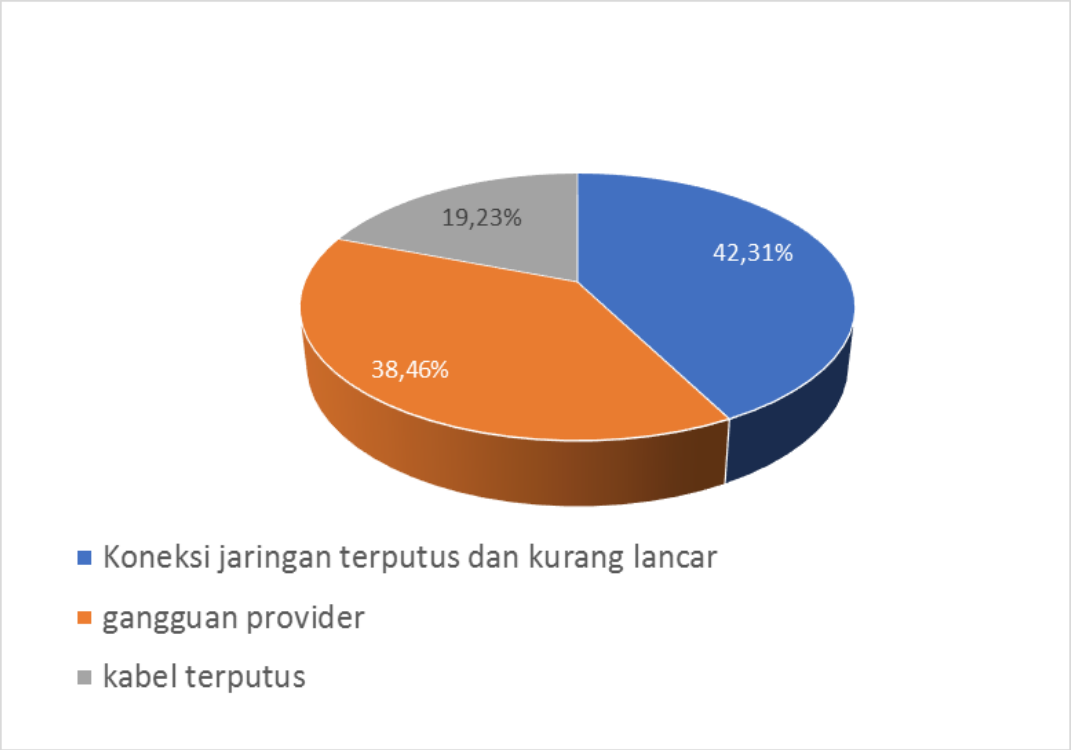

Gambar 4.4: Macam-Macam Gangguan Internet

4.1.3 Infrastruktur Jaringan OPD yang Difasilitasi Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan fasilitas berupa infrastruktur jaringan kepada 31 OPD diantaranya fasilitas infrastruktur berupa menara jaringan telekomunikasi, pusat data dan pemulihan data, jaringan intranet antar-OPD, internet protokol publik, routing, sistem pengamanan informasi, bandwidth internet, server sistem informasi, dan repository data/informasi.

1) Menara Jaringan Telekomunikasi

Menara Jaringan Telekomunikasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari 31 OPD sebanyak 19 OPD (61,29%) difasilitasi oleh Diskominfo dan 12 OPD (38,71%) tidak difasilitasi infrastruktur menara jaringan telekomunikasi oleh Diskominfo. Untuk hasil persentase infrastruktur menara jaringan telekomunikasi terdapat pada Gambar 4.5.

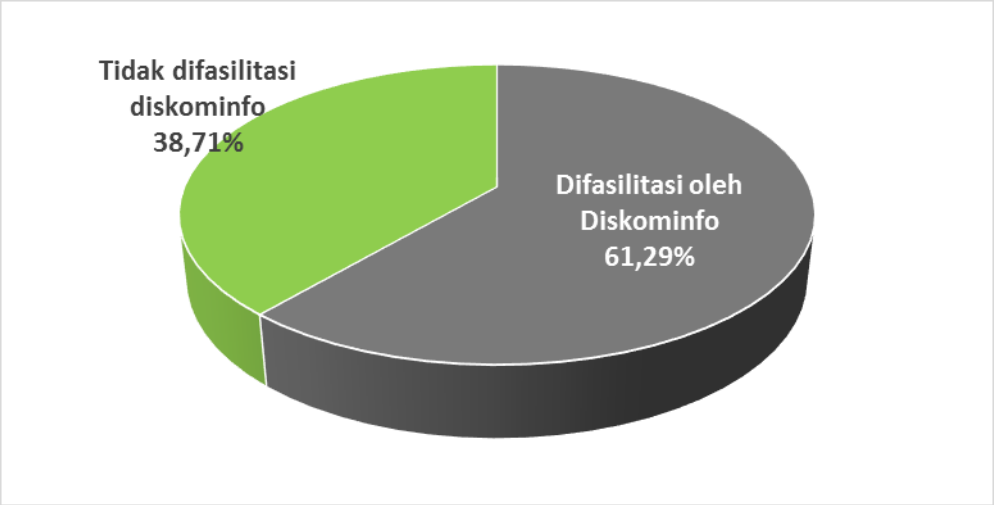

Gambar 4.5: Infrastruktur Menara Jaringan Telekomunikasi

2) Pusat Data dan Pemulihan Data

Infrastruktur yang kedua yaitu fasilitas berupa Pusat Data dan Pemulihan Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebanyak 41,94% Diskominfo telah memberikan fasilitas berupa pusat data dan pemulihan data. Sedangkan banyak yang tidak difasilitasi oleh Diskominfo berupa infrastruktur pusat data dan pemulihan data dengan persentase 58,06%. Untuk hasil persentase infrastruktur pusat data dan pemulihan data dapat dilihat dari gambar dibawah.

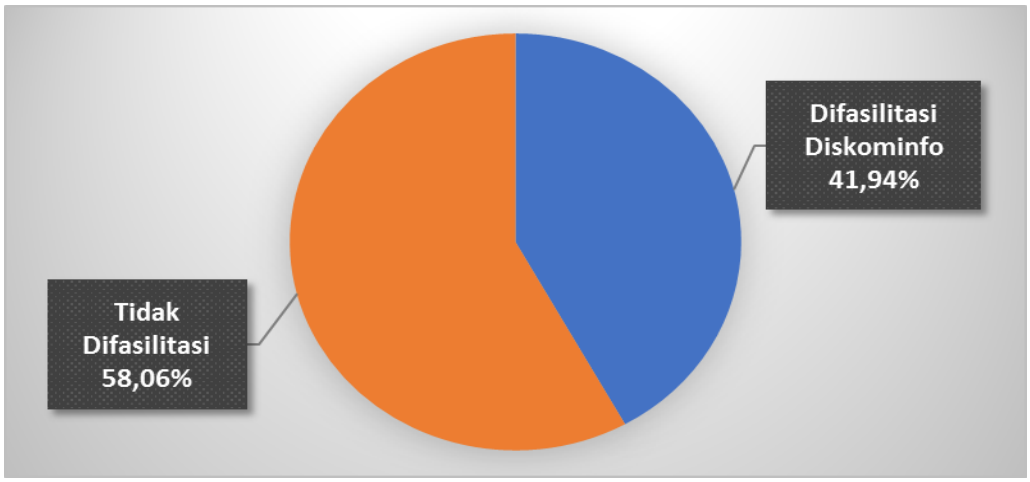

Gambar 4.6: Pusat Data dan Pemulihan Data

3) Jaringan Intranet Antar-OPD

Infrastruktur ketiga yaitu jaringan intranet antar-OPD yang difasilitasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebanyak 58,06% infrastruktur berupa jaringan intranet telah difasilitasi oleh Diskominfo. Dan 41,94% infrastruktur berupa jaringan intranet tidak difasilitasi oleh Diskominfo. Untuk hasil persentase bisa dilihat pada Gambar 4.7.

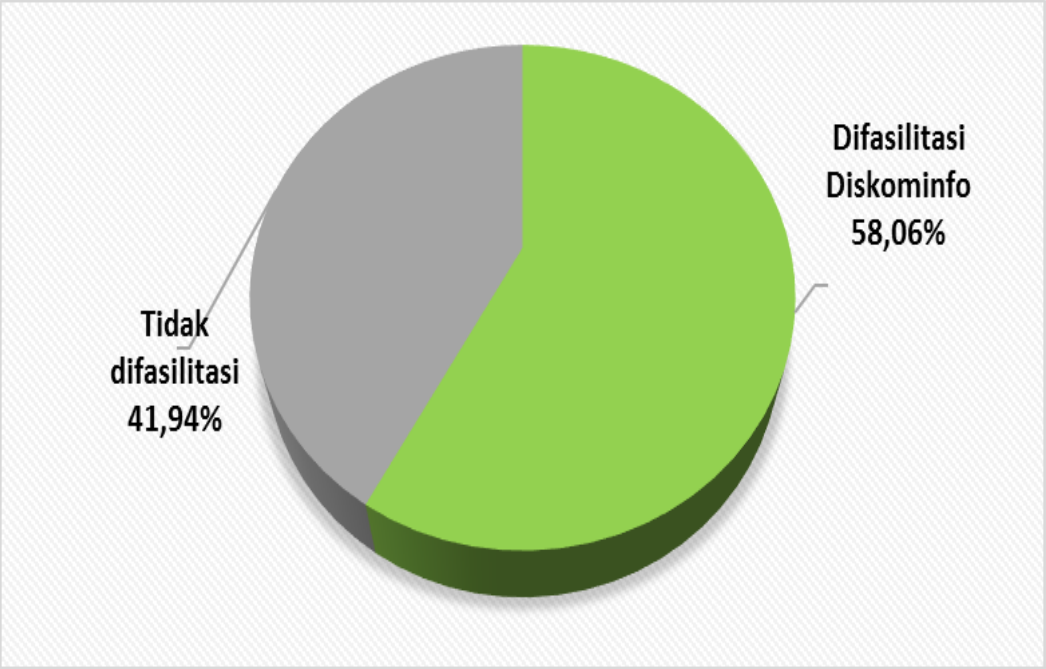

Gambar 4.7: Jaringan Intranet Antar-OPD

4) Internet Protokol Publik

Infrastruktur keempat adalah infrastruktur berupa internet protokol publik yang difasilitasi oleh Diskominfo. Berikut kepemilikan Nomor IP pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1: Nomor Internet Protocol (IP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

No	OPD/Lokasi FO	IP
1	Sekretariat Daerah	172.16.200.200
2	Sekretariat DPRD	172.16.200.12
3	Inspektorat	172.16.200.63
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	172.16.200.40
5	Dinas Kesehatan	172.16.200.41
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	172.16.200.55
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	172.16.200.47
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	172.16.200.51
9	Dinas Sosial	172.16.200.33
10	Dinas Tenaga Kerja	172.16.200.54
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	172.16.200.36
12	Dinas Pangan dan Pertanian	172.16.200.44
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	172.16.200.53
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	172.16.200.64
15	Dinas Perhubungan	172.16.200.43
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	172.16.200.50
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	172.16.200.59
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	172.16.200.31
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	172.16.200.42
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	172.16.200.52
21	Dinas Perikanan	172.16.200.45
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	172.16.200.58
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	172.16.200.35
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	172.16.200.56
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	172.16.200.57
26	Badan Kepegawaian Daerah	172.16.200.30
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	172.16.200.34
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	172.16.200.46
29	Rumah Sakit Umum Daerah	172.16.200.70
30	Kecamatan Sidoarjo	172.16.200.112

Lanjutan Tabel 4.1

No	OPD/Lokasi FO	IP
31	Kecamatan Candi	172.16.200.103
32	Kecamatan Buduran	172.16.200.102
33	Kecamatan Tanggulangin	172.16.200.113
34	Kecamatan Wonoayu	172.16.200.118
35	Kecamatan Tarik	172.16.200.115
36	Kecamatan Gedangan	172.16.200.104
37	Kecamatan Krian	172.16.200.107
38	Kecamatan Prambon	172.16.200.108
39	Kecamatan Porong	172.16.200.109
40	Kecamatan Sedati	172.16.200.110
41	Kecamatan Waru	172.16.200.117
42	Kecamatan Krembung	172.16.200.106
43	Kecamatan Balongbendo	172.16.200.101
44	Kecamatan Taman	172.16.200.114
45	Kecamatan Tulangan	172.16.200.116
46	Kecamatan Jabon	172.16.200.105
47	Puskesmas Sidoarjo	172.16.200.120
48	MPP Sukodono	172.16.200.119
49	PASEBAN	172.16.200.71
50	Mall Pelayanan Publik	172.16.200.62
51	Sidoarjo Command Center	172.16.200.3
52	GOR Delta	172.16.200.61
53	Wifi Alun-alun	172.16.200.100
54	Kejaksaan RI	172.16.200.150
55	KPU	172.16.200.65
56	SMPN 4 Sidoarjo	172.16.202.7
57	SMPN 5 Sidoarjo	172.16.202.6
58	POLRES	172.16.201.3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Sebanyak 61,29% infrastruktur berupa internet protokol publik difasilitasi oleh Diskominfo. Dan untuk OPD yang tidak difasilitasi oleh Diskominfo sebanyak 38,71%. Untuk hasil persentase unsur infrastruktur internet protokol publik dapat dilihat pada Gambar 4.8 .

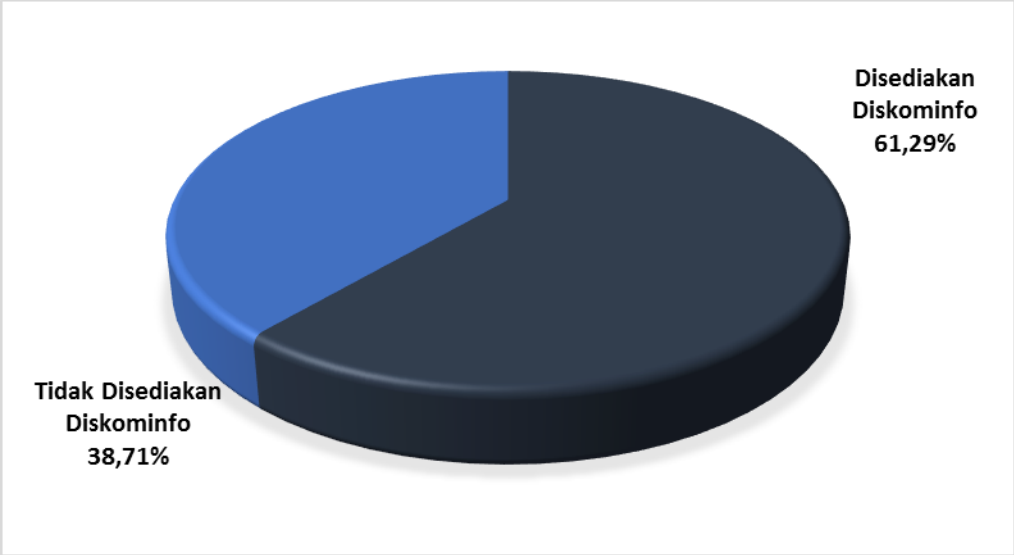

Gambar 4.8: Internet Protocol Public

5) Routing

Infrastruktur kelima adalah infrastruktur berupa routing yang difasilitasi oleh Diskominfo. Sebanyak 70,97% infrastruktur berupa routing difasilitasi oleh Diskominfo. Dan untuk OPD yang tidak difasilitasi oleh Diskominfo sebanyak 29,03%. Untuk hasil persentase unsur infrastruktur routing dapat dilihat pada Gambar 4.9.

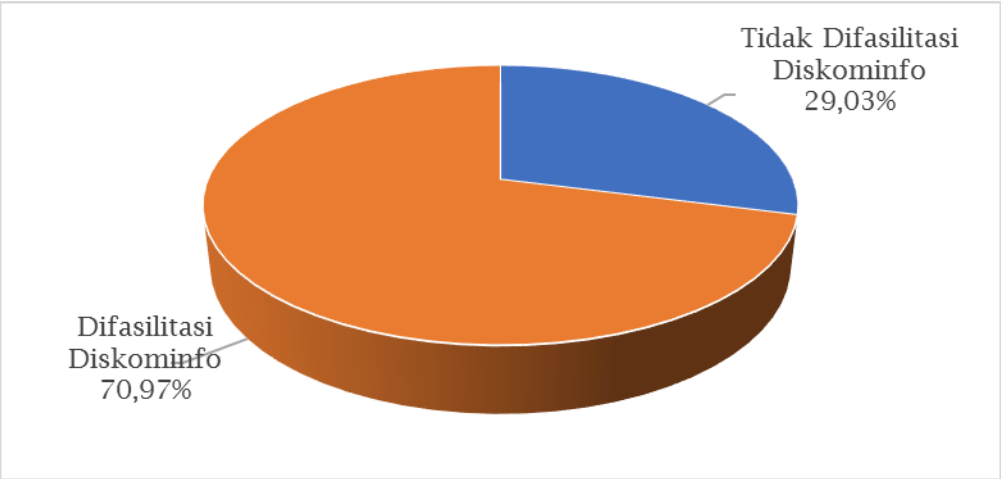

Gambar 4.9: Routing

6) Sistem Pengamanan Informasi

Infrastruktur keenam adalah infrastruktur berupa sistem pengamanan informasi yang difasilitasi oleh Diskominfo. Sebanyak 61,29% infrastruktur berupa sistem pengamanan informasi difasilitasi oleh Diskominfo. Dan untuk OPD yang tidak difasilitasi oleh Diskominfo sebanyak 38,71%. Untuk hasil persentase unsur infrastruktur sistem pengamanan informasi dapat dilihat pada Gambar 4.10.

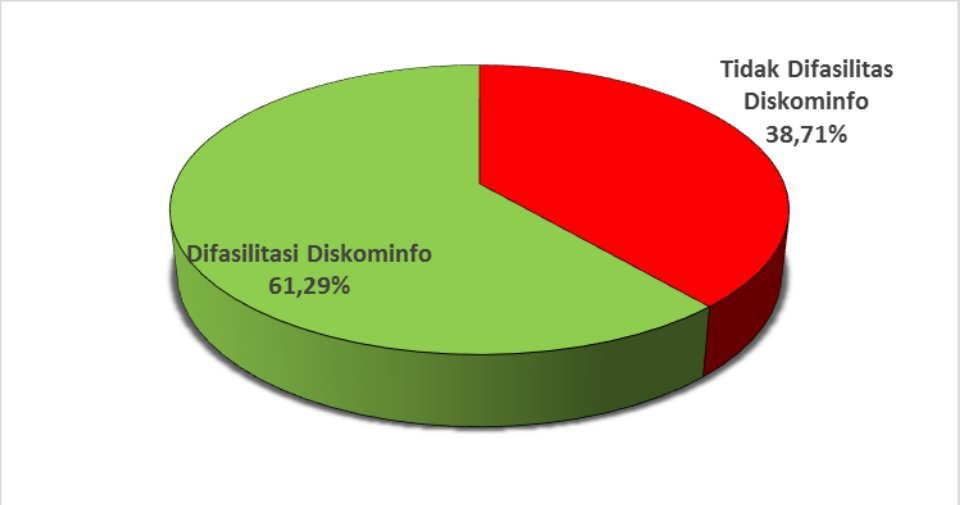

Gambar 4.10: Sistem Pengamanan Informasi

7) Bandwidth Internet

Infrastruktur ketujuh adalah infrastruktur berupa Bandwidth Internet yang difasilitasi oleh Diskominfo. Sebanyak 96,77% infrastruktur berupa bandwidth internet difasilitasi oleh Diskominfo. Dan yang tidak difasilitasi oleh Diskominfo sebanyak 3,23%. Untuk hasil persentase unsur infrastruktur bandwidth internet dapat dilihat pada Gambar 4.11.

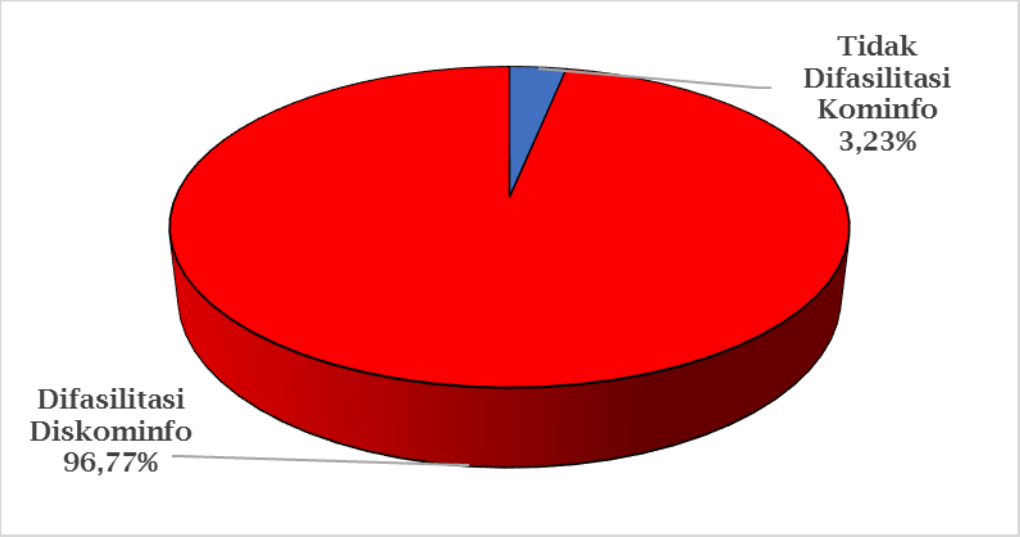

Gambar 4.11: Bandwidth Internet

8) Penempatan Server Sistem Informasi

Infrastruktur kedelapan adalah infrastruktur berupa Penempatan Server yang difasilitasi oleh Diskominfo. Sebanyak 58,06% infrastruktur berupa penempatan server difasilitasi oleh Diskominfo. Dan yang tidak difasilitasi oleh Diskominfo sebanyak 41,94%. Untuk hasil persentase unsur infrastruktur penempatan server dapat dilihat pada Gambar 4.12.

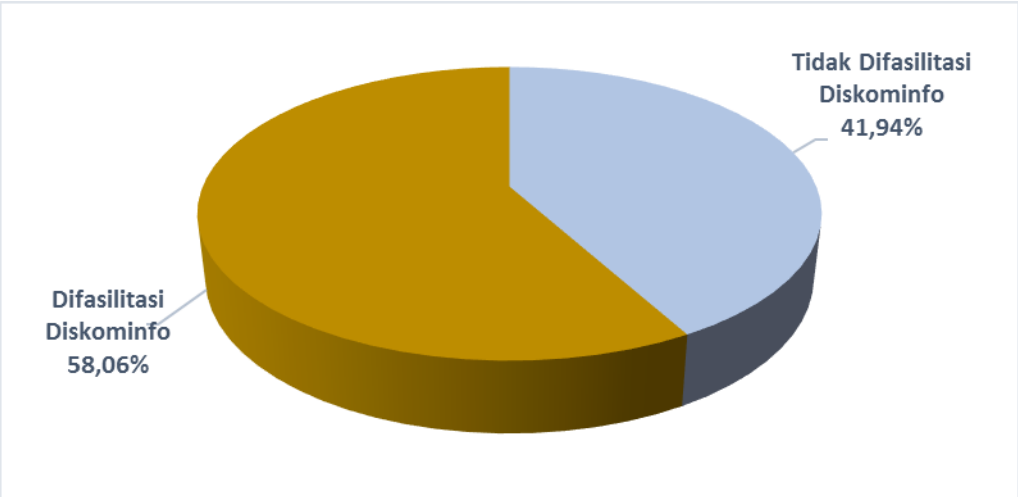

Gambar 4.12: Penempatan Server

9) Repository Data/Informasi

Infrastruktur kesembilan adalah infrastruktur berupa Repository Data/Informasi yang difasilitasi oleh Diskominfo. Sebanyak 45,16% infrastruktur berupa repository data difasilitasi oleh Diskominfo. Dan yang tidak difasilitasi oleh Diskominfo sebanyak 54,84%. Untuk hasil persentase unsur infrastruktur repository data dapat dilihat pada Gambar 4.13.

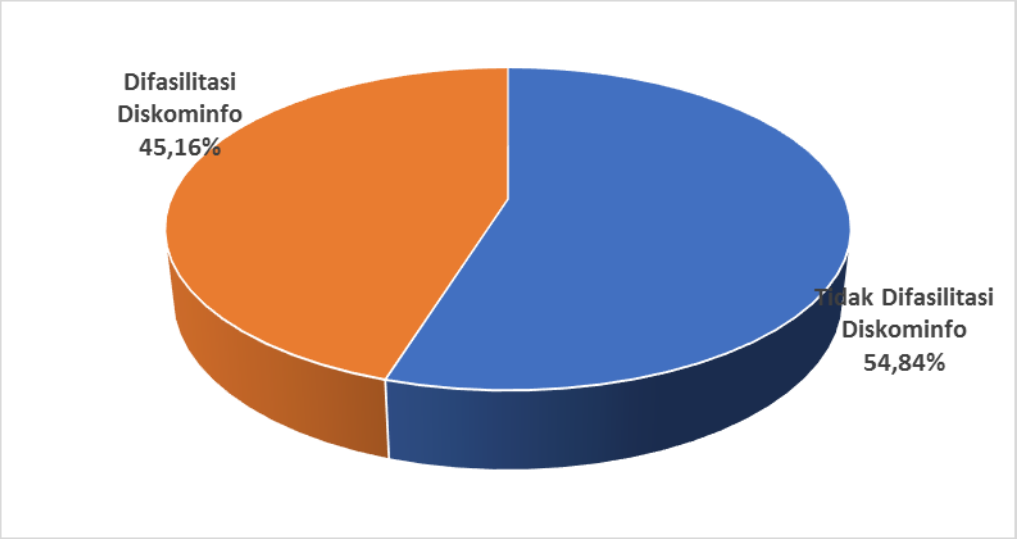

Gambar 4.13: Repository Data

4.1.4 Pemanfaatan Bandwidth

1) Koneksi Internet Yang Digunakan

Hasil analisis untuk koneksi internet yang digunakan oleh masing-masing Dinas terdiri dari unsur Fixed Narrowband, Fixed Broadband, Mobile Broadband (selular), Fiber Optic, dan Satelit. Unsur pertama adalah Fixed Narrowband yang merupakan jalur komunikasi tetap (tidak dapat dipindah-pindah) dengan bandwidth < 256 kbps seperti: dial up (Kabel telepon yang digunakan untuk Telkomnet Instan), ISDN (Telkomnet), DSL dengan bandwidth < 256 kbps (Telkom Speedy). Hasil persentase menunjukkan bahwa koneksi internet dengan menggunakan fixed narrowband sebanyak

6,45% dan yang tidak menggunakan fixed narrowband sebanyak 93,55%. Hasil Persentase dapat dilihat pada Gambar 4.14.

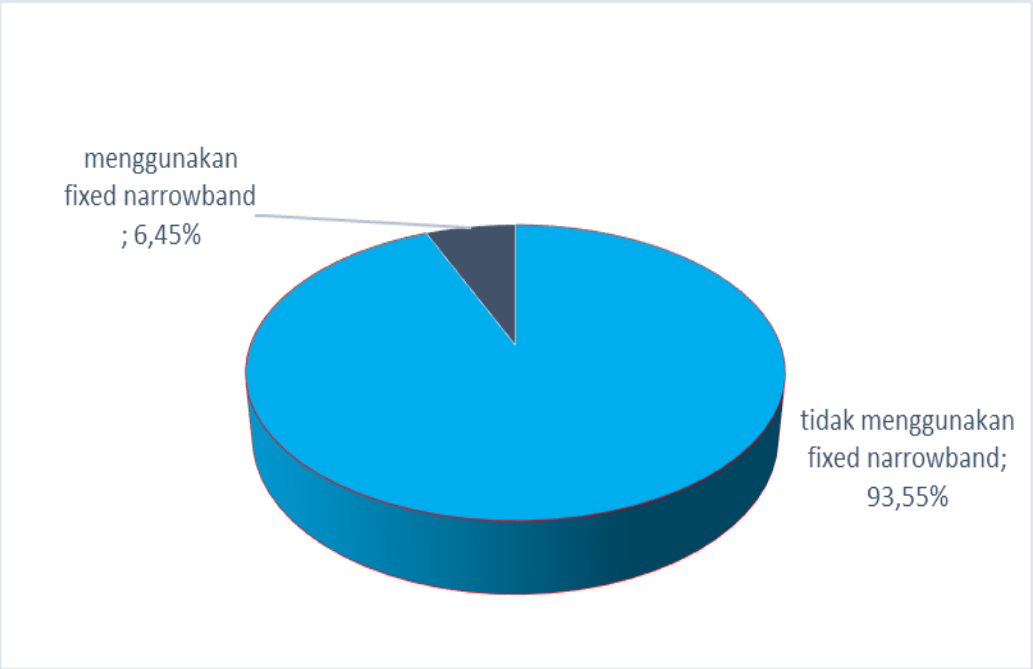

Gambar 4.14: Fixed Narrowband

Unsur kedua yaitu Fixed Broadband yang merupakan jalur komunikasi tetap (tidak dapat dipindah-pindah) dengan bandwidth ≥ 256 kbps seperti: DSL dengan bandwidth ≥ 256 kbps (Telkom Speedy), cable modem, fixed wireless (Radio link). Hasil persentase menunjukkan bahwa koneksi internet dengan menggunakan fixed broadband sebanyak 9,68% dan yang tidak menggunakan fixed broadband sebanyak 90,32%. Hasil Persentase dapat dilihat pada gambar dibawah.

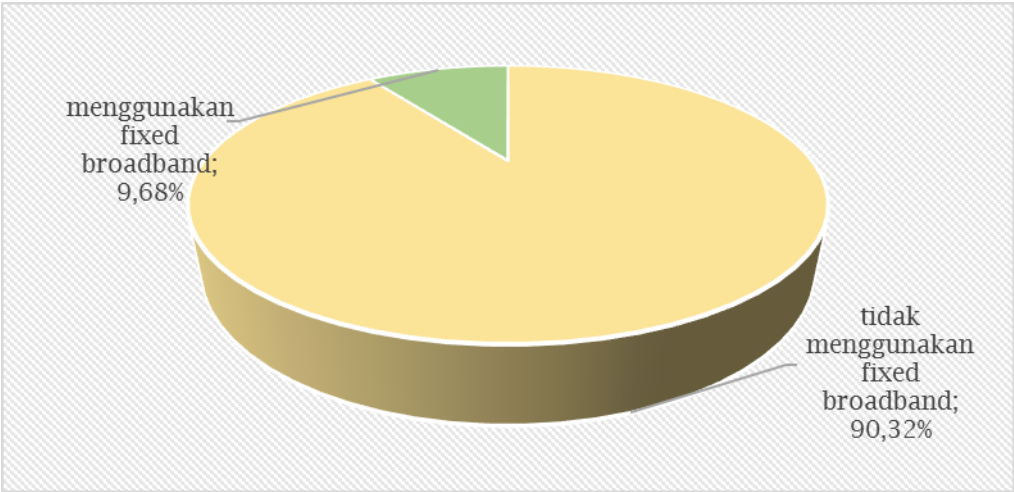

Gambar 4.15: Fixed Narrowband

Unsur ketiga yaitu Mobile Broadband yang merupakan koneksi internet seperti seperti: GSM (GPRS, HSDPA, EDGE, 3G, 3,5G), CDMA (CDMA 1X, EV-DO, EV-DV). Hasil persentase menunjukkan bahwa koneksi internet dengan menggunakan mobile broadband sebanyak 3,23% dan yang tidak menggunakan mobile broadband sebanyak 96,77%. Hasil Persentase dapat dilihat pada Gambar 4.16.

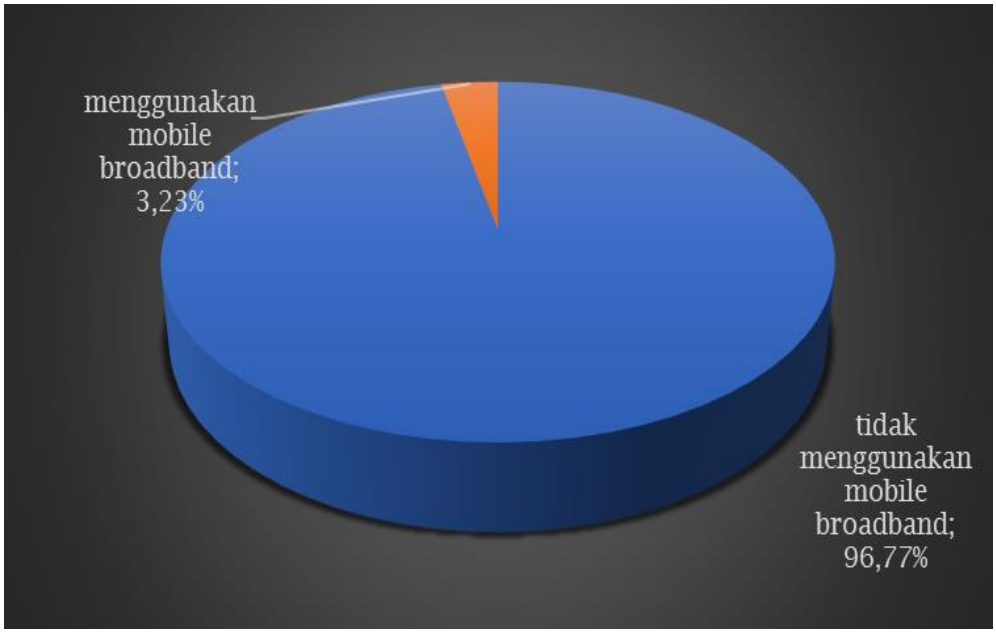

Gambar 4.16: Mobile Broadband

Unsur keempat yaitu Fiber Optic yang merupakan metode transmisi data dengan mengirim gelombang cahaya melalui serat optic. Hasil persentase menunjukkan bahwa koneksi internet dengan menggunakan fiber optic sebanyak 93,55% dan yang tidak menggunakan fiber optic sebanyak 6,45%. Hasil Persentase dapat dilihat pada Gambar 4.17.

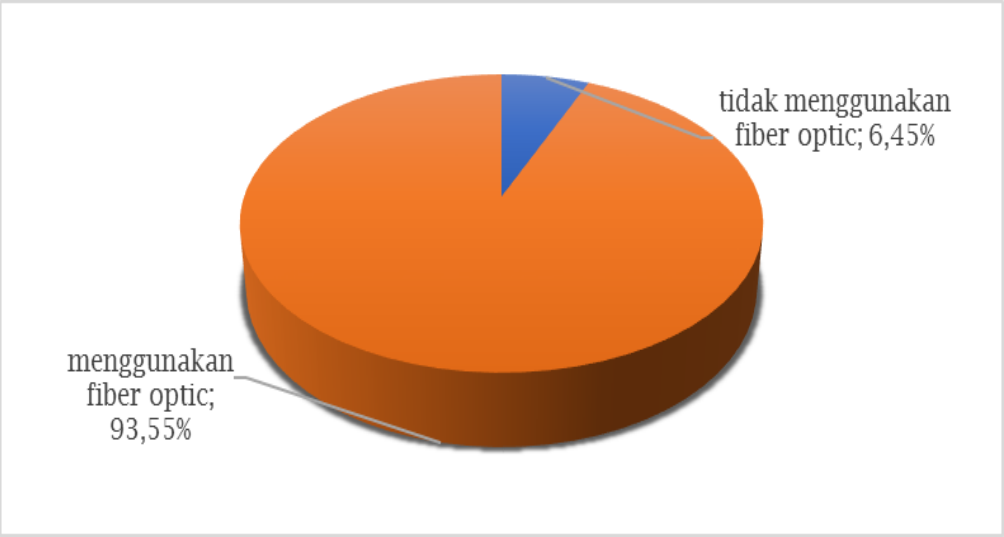

Gambar 4.17: Fiber Optic

Unsur kelima yaitu Satelit. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh OPD tidak ada yang menggunakan koneksi internet berupa Satelit dengan persentase sebesar 100%. Hasil Persentase dapat dilihat pada Gambar 4.18.

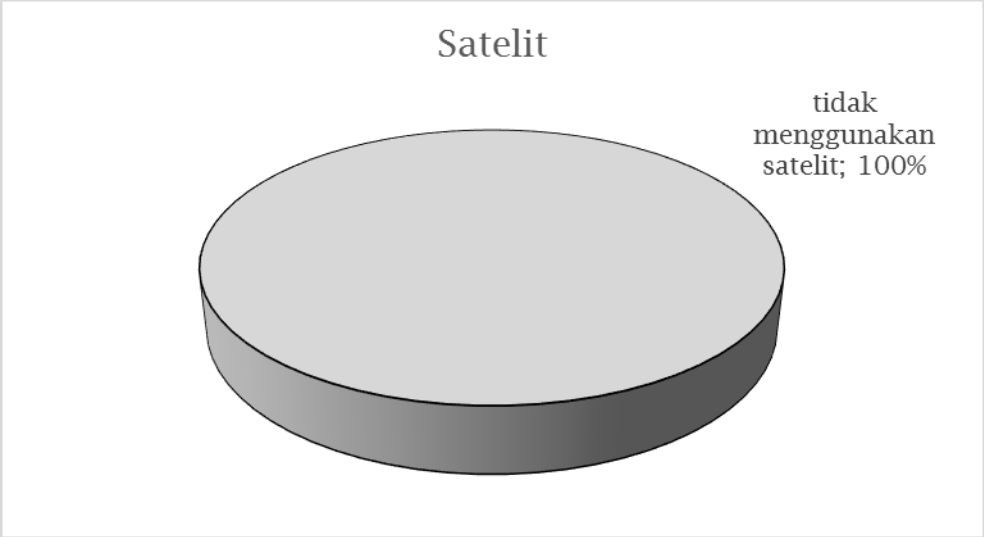

Gambar 4.18: Satelit

4.2 Ketersediaan Bandwidth Lokal

Ketersediaan fasilitas Bandwidth lokal pada OPD di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 tersebar 51 instansi yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 33 organisasi perangkat daerah, data tersebut dipaparkan dalam tabel frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.2: Ketersediaan Fasilitas Bandwidth Lokal Pada OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	OPD	Bandwidth Diskominfo	
		Lokal - Mbps	
		Download	Upload
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	584	769
2	Sekretariat DPRD	484	822
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	504	736
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	714	860
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	613	754
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	640	884
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga an Pariwisata	216	216
8	Dinas Perikanan	506	850
9	Dinas Kesehatan	383	635

Lanjutan Tabel 4.2

No	OPD	Bandwidth Diskominfo	
		Lokal - Mbps	
		Download	Upload
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	511	803
11	Kecamatan Sidoarjo	484	727
12	Kecamatan Buduran	372	756
13	Kecamatan Gedangan	540	788
14	Badan Kepegawaian Daerah	344	812
15	Dinas Perhubungan	366	700
16	Kecamatan Candi	125	164
17	Kecamatan Tanggulangin	506	791
18	Kecamatan Jabon	321	796
19	Kecamatan Porong	502	841
20	Kecamatan Krembung	545	850
21	Kecamatan Tulangan	441	786
22	Kecamatan Prambon	338	820
23	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	398	659
24	Dinas Pangan Dan Pertanian	317	544
25	Dinas Sosial	345	697
26	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	280	790
27	Dinas Tenaga Kerja	580	511
28	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	717	848
29	Dinas Perumahan, Permukiman, CK Dan TR	695	852
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	507	785
31	Tpa Jabon	459	780
32	Kecamatan Tarik	317	817
33	Kecamatan Balongbendo	335	704
34	Kecamatan Wonoayu	329	846
35	Kecamatan Krian	403	711
36	Kecamatan Waru	444	537
37	Kecamatan Sedati	491	621
38	Kecamatan Taman	114	136
39	Kecamatan Sukodono	364	487
40	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	487	649
41	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	545	850
42	Satuan Polisi Pamong Praja	559	709
43	Rumah Sakit Umum Daerah	559	669
44	Dinas Komunikasi Dan Informatika	549	854

Lanjutan Tabel 4.2

No	OPD	Bandwidth Diskominfo	
		Lokal - Mbps	
		Download	Upload
45	Inspektorat Daerah	417	505
46	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	309	223
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	349	469
48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	349	469
49	Badan Pelayanan Pajak Daerah	449	716
50	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	468	855
51	Mall Pelayanan Publik (MPP)	527	867
	Total	22.701	35.320
	Rata-rata	445,1176	692,549

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.2, pada tahun 2021 bandwidth lokal yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk download sebanyak 22.701 Mbps dan upload sebesar 35.320 Mbps. Rata-rata penggunaan internet untuk download di 51 OPD sebesar 445,1176 Mbps. Rata-rata penggunaan internet yang digunakan untuk upload di 51 OPD sebanyak 692,549 Mbps. Dari 51 instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, penggunaan internet untuk download tertinggi digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA, yaitu 714 Mbps. Sedangkan penggunaan internet untuk download terkecil digunakan oleh Kecamatan Taman sebesar 114 Mbps. Penggunaan internet untuk upload dengan jumlah tertinggi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu 884 Mbps. Penggunaan upload terkecil berada di Kacamatan Taman sebesar 136 Mbps.

4.3 Ketersediaan Bandwidth Internet

Ketersediaan fasilitas Bandwidth internet pada OPD di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 tersebar 51 instansi yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 33 organisasi perangkat daerah, data tersebut dipaparkan dalam tabel frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.3: Ketersediaan Fasilitas Bandwidth Internet Pada OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	OPD	Bandwith Diskominfo Internet – Mbps	
		Download	Upload
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	624	441
2	Sekretariat DPRD	239	440
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	307	303
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	629	575
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	439	405
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	587	379
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	145	127
8	Dinas Perikanan	467	560
9	Dinas Kesehatan	274	432
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	385	411
11	Kecamatan Sidoarjo	397	438
12	Kecamatan Buduran	244	395
13	Kecamatan Gedangan	471	516
14	Badan Kepegawaian Daerah	108	288
15	Dinas Perhubungan	229	392
16	Kecamatan Candi	82	126
17	Kecamatan Tanggulangin	410	544
18	Kecamatan Jabon	289	446

Lanjutan Tabel 4.3

No	OPD	Bandwith Diskominfo	
		Internet – Mbps	
		Download	Upload
19	Kecamatan Porong	507	360
20	Kecamatan Krembung	274	266
21	Kecamatan Tulangan	229	327
22	Kecamatan Prambon	282	352
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	426	403
24	Dinas Pangan dan Pertanian	276	365
25	Dinas Sosial	359	328
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	304	391
27	Dinas Tenaga Kerja	320	196
28	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	494	369
29	Dinas Perumahan, Permukiman, Ck Dan Tr	559	630
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	291	241
31	TPA Jabon	336	263
32	Kecamatan Tarik	384	273
33	Kecamatan Balongbendo	357	325
34	Kecamatan Wonoayu	203	363
35	Kecamatan Krian	379	313
36	Kecamatan Waru	461	194
37	Kecamatan Sedati	404	139
38	Kecamatan Taman	138	41
39	Kecamatan Sukodono	322	148
40	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	428	381
41	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	195	451
42	Satuan Polisi Pamong Praja	303	401
43	Rumah Sakit Umum Daerah	232	221
44	Dinas Komunikasi Dan Informatika	355	565
45	Inspektorat Daerah	340	397

Lanjutan Tabel 4.3

No	OPD	Bandwith Diskominfo	
		Internet – Mbps	
		Download	Upload
46	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	136	87
47	Disnas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	362	158
48	Dinas Pppa Dan Kb	362	158
49	Badan Pelayanan Pajak Daerah	605	339
50	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	354	483
51	Mall Pelayanan Publik (MPP)	540	538
	Total	17.843	17.684
	Rata-rata	349,8627	346,745

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan tabel 4.3, pada Tahun 2021 Bandwidth Lokal yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk download adalah 17.843 Mbps dan upload 17.684 Mbps dengan tingkat rata-rata jumlah download 349,827 Mbps dan rata-rata tingkat upload 346,745 Mbps. Dari 51 instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, penggunaan internet untuk download tertinggi digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, yaitu 629 Mbps. Sedangkan penggunaan internet untuk download terkecil digunakan oleh Kecamatan Candi sebesar 82 Mbps. Penggunaan internet untuk upload dengan jumlah penggunaan tertinggi digunakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Ck Dan Tr, yaitu 630 Mbps dan penggunaan upload terkecil berada di Kacamatan Taman sebesar 41 Mbps.

4.4 Ketersediaan Internet Lainnya

4.4.1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki tambahan internet, yaitu Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps di Ruang Asisten 1 dan Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps di Ruang Kepala Bagian Umum. Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ada 5 Akses Telkom Indihome dengan masing-masing kapasitas yaitu sebesar 30 Mbps, 20 Mbps, 20 Mbps, 20 Mbps, 10 Mbps, dan 20 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.4: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Linksys EA9300	R. Setda - 43/118 Mbps
Ruckus R510	Delta Wicaksana - 80/87 Mbps
Ruckus R600	Delta Graha - 83/91 Mbps
Linksys EA9300	Delta Karya - 57/98 Mbps
Linksys EA9300	R. Perlengkapan Umum - 49/32 Mbps
Alcatel Lucent	R. Bupati - 25/27 Mbps
TP Link WR841N	R. Rumah Tangga - 19/34 Mbps
ZTE F609	R. Kesra - 20/35 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki tambahan internet yaitu, Jatayu dengan kapasitas 20 Mbps di Ruang Keuangan; Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps di Ruang Wakil 1; Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps di Ruang Wakil 2; dan Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps di Ruang Wakil 3. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.5: Penempatan Access Point (AP) yang Digunakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Lobi - 91/88 Mbps
TP Link	TU - 196/153 Mbps
TP Link	R. Risalah - 90/94 Mbps
Unifi	Koridor - 5/21 Mbp
Unifi	Lobi - 27/28 Mbps
Unifi	R. Ketua - 23/9 Mbps
Unifi	R. Paripurna - 35/47 Mbps
Netgear	R. Paripurna - 52/81 Mbps
Tenda	R. Rapat Komisi - 166/138 Mbps
TP Link	R. Komisi A - 92/98 Mbps
TP Link	R. Komisi B - 91/99 Mbps
TP Link	R. Komisi C - 87/76 Mbps
TP Link	R. Komisi D- 93/96 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 4.6: Penempatan Access Point (AP) yang Digunakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ubiquiti	R. Sekretariat - 54/67 Mbps
Netgear	R. R. Pembangunan - 57/71 Mbps
Ubiquiti	R. Infrastruktur - 48/63 Mbps
Netgear	R. Pemsosbud - 37/35 Mbps
Ubiquiti	R. R Pembangunan 4 - 51/66 Mbps
Ubiquiti	R. R Pembangunan 3 - 23/53 Mbps
TP Link WA901	R. Kaban - 22/42 Mbps
Ubiquiti	R. Ekonomi - 48/35 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.7: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Tenda	R. Sekretariat - 38/40 Mbps
Ubiquiti	R. Sekretariat
Ubiquiti	R. Perencanaan - 18/21 Mbps
Tenda	R. Bidang Jalan - 35/57 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Astinet masing -masing kapasitas 5 Mbps dan 10 Mbps dan Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.8: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Ruang Sekretariat - 2/3 Mbps
TP Link	R. Rapat - 1 Mbps
Tenda	R. Cekal - 5/10 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tambahan internet yaitu, Jatayu dengan kapasitas 25 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.9: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ubiquiti	R. Back Office - 59/60 Mbps
Ubiquiti	R. Front Office - 56/72 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.7 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.10: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Lorong Gedung A - 14/7 Mbps
Nokia	Lorong Gedung A - 34/31 Mbps
Unifi	Lorong Gedung A - 20/19 Mbps
Nokia	Lobi Gedung B - 31/25 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.8 Dinas Perikanan

Dinas Perikanan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 9 Akses dengan masing-masing kapasitas yaitu sebesar 50 Mbps, 50 Mbps , 50 Mbps, 50 Mbps, 50 Mbps, 50 Mbps 40 Mbps, 40 Mbps, dan 40 Mbps yang berlangganan dengan 9 nomor indihome. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.11: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Huwaei	R. Usaha Perikanan - 37/8 Mbps
Huwaei	R. Sekretariat - 28/4 Mbps
Huwaei	R. Produksi Perikanan - 14/1 Mbps
ZTE	Aula - 28/5 Mbps
Huwaei	R. Keuangan - 38/6 Mbps
ZTE	R. Kadin - 17/10 Mbps
Huwaei	R. Tangkap - 13/5 Mbps
Huwaei	R. Posikandu - 4/2 Mbps
ZTE	R. Penyuluh - 17/12 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.9 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Astinet Lite dengan kapasitas 40 Mbps untuk server dan Telkom Indihome dengan kapasitas 20 Mbps untuk di Ruang Kepala Dinas. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.12: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Huwaei	R. Usaha Perikanan - 37/8 Mbps
Huwaei	R. Sekretariat - 28/4 Mbps
Huwaei	R. Produksi Perikanan - 14/1 Mbps
ZTE	Aula - 28/5 Mbps
Huwaei	R. Keuangan - 38/6 Mbps
ZTE	R. Kadin - 17/10 Mbps
Huwaei	R. Tangkap - 13/5 Mbps
Huwaei	R. Posikandu - 4/2 Mbps
ZTE	R. Penyuluh - 17/12 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.13: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Unifi	TU - 20/11 Mbps
Unifi	Lobby - 20/11 Mbps
Unifi	R. PJU - 34/24 Mbps
Unifi	R. PPKLH - 36/35 Mbps
Unifi	R. Kebersihan - 18/17 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.11 Kecamatan Sidoarjo

Kecamatan Sidoarjo memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps dan Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps.

4.4.12 Kecamatan Buduran

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.14: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Mikrotik	Sekretariat - 18/9 Mbps
Mikrotik	R. Camat - 22/19 Mbps
Mikrotik	R. PKK - 36/28 Mbps
Mikrotik	R. Pelayanan - 16/21 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.13 Kecamatan Gedangan

Kecamatan Gedangan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.15: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Mikrotik	R. Pelayanan - 10/5 Mbps
Mikrotik	R. Perencanaan - 27/8 Mbps
Mikrotik	Pendopo - 14/8 Mbps
Mikrotik	Aula - 3/8 Mbps
TP Link TL-WR9	R. Rapat - 33/28 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.14 Badan Kepegawaian Daerah

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.16: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Linksys	R. Pengembangan - 7/9 Mbps
Linksys	R. Pengembangan
TP Link	R. Mutasi - 22/11 Mbps
Cisco Linksys	R. Mutasi
TP Link	R. Kabid Pengembangan - 15/42 Mbps
Ruckus	Kelas Delta Wibawa - 107/28 Mbps
Ruckus	Aula Majapahit - 107/28 Mbps
TP Link	R. Keuangan - 38/34 Mbps
TP Link	R. Keuangan - 25/25 Mbps
TP Link	R. Diklat - 28/18 Mbps
Asus	R. Sekretariat - 7/23 Mbps
TP Link	Kelas Delta Wibawa - 16/12 Mbps

Lanjutan Tabel 4.16

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Netgear	Asrama lt. 1 - 30/65 Mbps
Netgear	Asrama lt. 2 - 30/66 Mbps
Asus	R. UPT - 19/21 Mbps
Netgear	Gedung CBT lt. 2 - 75/107 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.15 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perhubungan.

Tabel 4.17: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perhubungan

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	R. Perencanaan - 7/8 Mbps
TP Link	R. Kadin - 23/41 Mbps
TP Link	R. Parkir - 15/3 Mbps
TP Link	R. Terminal - 2/25 Mbps
TP Link	R. Manrek - 14/9 Mbps
ZTE	R. Sarpras - 24/41 Mbps
TP Link	R. Dal Ops - 22/46 Mbps
TP Link	R. Angkutan - 29/44 Mbps
TP Link	R. PKB - 17/43 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.16 Kecamatan Candi

Kecamatan Candi memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 40 Mbps dan Telkom Astinet dengan kapasitas 15 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Candi.

Tabel 4.18: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Candi

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Tenda	R. Sekretariat - 23/34 Mbps
Tenda	R. Penyuluh Pertanian - 25/49 Mbps
TP Link	Pendopo - 25/43 Mbps
Toto Link	Pos Penjagaan - 29/49 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.17 Kecamatan Tanggulangin

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tanggulangin.

Tabel 4.19: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tanggulangin

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Rukcus	Pendopo - 297/409 Mbps
ZTE	R. Pelayanan - 49/21 Mbps
TP Link	R. Sekcam - 72/38 Mbps
TP Link	Pemerintahan - 47/8 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.18 Kecamatan Jabon

Kecamatan Jabon memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Jabon.

Tabel 4.20: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Jabon

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Pendopo - 46/59 Mbps
ZTE	R. Pelayanan Umum - 36/31 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.19 Kecamatan Porong

Kecamatan Porong memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps dan Telkom Indihome dengan kapasitas 75 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Porong.

Tabel 4.21: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Porong

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	R. Rapat - 53/36 Mbps
Ruckus	Pendopo - 216/234 Mbps
Ruckus	Ruang Dalam - 343/326 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.20 Kecamatan Krembung

Kecamatan Krembung memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Krembung.

Tabel 4.22: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Krembung

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ruckus	Rumah Dinas - 181/170 Mbps
TP Link WR642	R. Perekonomina - 22/25 Mbps

Lanjutan Tabel 4.22

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ruckus	Pendopo - 222/126 Mbps
TP Link TL ER604W	Sekretariat - 30/38 Mbps
Tenda	R. Rapat - 38/55 Mbps
Huwaei	R. Satpol PP - 34/1 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.21 Kecamatan Tulangan

Kecamatan Tulangan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tulangan.

Tabel 4.23: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tulangan

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
ZTE	R. Umum Kepegawaian - 20/5 Mbps
Ruckus	R. Rapat - 217/135 Mbps
Ruckus	Pendopo - 223/118 Mbps
ZTE F609	R. Pertanian KKB - 45/46 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.22 Kecamatan Prambon

Kecamatan Prambon memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan.

Tabel 4.24: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link TL WR940N	R. Rapat - 31/30 Mbps
Ruckus	Pendopo Tengah - 182/174 Mbps
TP Link TL WR940N	R. Keuangan - 37/42 Mbps
TP Link WR840	R. Pelayanan - 34/37 Mbps
Alcatel Lucent	R. Pelayanan - 22/5 Mbps
Ruckus	Pendopo Depan - 151/122 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.23 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki tambahan internet yaitu, PLN – Icon + - dengan kapasitas 40 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Tabel 4.25: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ubiquity	Bid Perijinan dan Non Perijinan - 7/9 Mbps
Ubiquity	Pengembangan - 12/28 Mbps
Unifi	R. Keuangan - 12/40 Mbps
Ubiquity	R. Rapat - 12/14 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.24 Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pangan dan Pertanian.

Tabel 4.26: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pangan dan Pertanian

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
ZTE	Sekretariat - 26/7 Mbps
Ruckus	Koridor - 88/114 Mbps
TP Link	R. Ketpong - 19/23 Mbps
TP Link	R. KJF - 22/23 Mbps
Zyxel	Lab - 7/4 Mbps
ZTE	Keswan - 15/4 Mbps
D Link	Pronak - 10/4 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.25 Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Astinet dengan kapasitas 10 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Sosial.

Tabel 4.27: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Sosial

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Sekretariat - 9/20 Mbps
TP Link	R. Server - 8/3 Mbps
Netgear	R. PKH - 39/64 Mbps
TP Link	R. Bid Lin dan Jamsos - 26/36 Mbps
TP Link	R. Dayasos - 11/7 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.26 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Astinet dengan kapasitas 10 Mbps dan Telkom Indihome dengan kapasitas 20 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 4.28: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Tenda	R. Bid. Kebudayaan - 12/19 Mbps
ZTE	R. Kabid Kebudayaan - 23/31 Mbps
Ruckus	R. Perencanaan Dikdas - 53/51 Mbps
Cisco	R. Dikdas - 27/35 Mbps
Unifi	R. Paud - 19/29 Mbps
Unifi	R. Guru dan TK - 22/34 Mbps
ZTE	R. Gaji - 14/15 Mbps
Unifi	R. Pengawas - 28/42 Mbps
ZTE	R. Perencanaan - 30/12 Mbps
ZTE	R. Sub Bag Perencanaan - 26/38 Mbps
ZTE	R. Keuangan - 10/1 Mbps

Lanjutan Tabel 4.28

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Unifi	R. Dikmen - 17/37 Mbps
ZTE	R. Sekretariat 2 - 23/23 Mbps
ZTE	R. Kadin - 19/4 Mbps
Unifi	R. Pelayanan - 29/37 Mbps
Cisco	Aula - 29/37 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.27 Dinas Tenaga Kerja

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 4.29: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Tenaga Kerja

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Sekretariat - 25/4 Mbps
TP Link	R. Hi Syaker - 15/13 Mbps
TP Link	Resepsionis - 25/20 Mbps
TP Link	R. Lattas - 20/23 Mbps
TP Link	R. Penta - 17/24 Mbps
Unifi	R. Rapat - 51/69 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.28 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum memiliki tambahan internet yaitu Telkom Indihome. Adapun blank spot adalah Semua Ruangan belum menggunakan internet Diskominfo dan juga kendala lainnya adalah Internet Telkom Lemot.

4.4.29 Dinas Perumahan, Permukiman, CK Dan TR

Dinas Perumahan, Permukiman, CK Dan TR memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50

Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perumahan, Permukiman, CK Dan TR.

Tabel 4.30: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perumahan, Permukiman, CK Dan TR

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Tata Ruang - 16/21 Mbps
TP Link	Pengawas Bangunan - 1/1 Mbps
TP Link	Permukiman - 6/4 Mbps
ZTE	Tata Bangunan - 15/14 Mbps
TP Link	Sekretariat - 23/20 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.30 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps.

4.4.31 TPA Jabon

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di TPA Jabon.

Tabel 4.31: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di TPA Jabon

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Gedung A - 71/87 Mbps
TP Link	Gedung B - 85/88 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.32 Kecamatan Tarik

Kecamatan Tarik memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Astinet dengan kapasitas 5 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tarik.

Tabel 4.32: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Tarik

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Mikrotik	R. Administrasi - 7/7 Mbps
TP Link	R. Camat - 8/2 Mbps
TP Link	Pos Depan - 25/39 Mbps
Netis	Gedung Selatan - 24/34 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.33 Kecamatan Balongbendo

Kecamatan Balongbendo memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps dan Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Balongbendo.

Tabel 4.33: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Balongbendo

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	R. Pelayanan - 7/18 Mbps
ZTE	R. Perekaman - 10/1 Mbps
TP Link	R. Trantib - 20/24 Mbps
TP Link	R. Serbaguna - 29/36 Mbps
Tenda	Pendopo - 35/29 Mbps
ZTE	R. Perencanaan - 66/31 Mbps
TP Link	R. Pemerintahan - 29/4 Mbps
TP Link	R. Kessos - 1/1 Mbps
TP Link	R. Pemerintahan - 6/2 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.34 Kecamatan Wonoayu

Kecamatan Wonoayu memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps dan Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Wonoayu.

Tabel 4.34: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Wonoayu

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
ZTE	R. Pelayanan, Kesos, Sekcam - 27/5 Mbps
TP Link	R. Dinas - 26/42 Mbps
ZTE	R. Pemerintahan - 14/1 Mbps
ZTE	R. Perekonomian - 9/2 Mbps
TP Link	Aula - 6/11 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.35 Kecamatan Krian

Kecamatan Krian memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 20 Mbps dan Telkom Indihome dengan kapasitas 10 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Krian.

Tabel 4.35: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Krian

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	R. Pelayanan - 21/34 Mbps
TP Link	R. Sekcam - 24/43 Mbps
Mikrotik RB	Pendopo - 37/38 Mbps
TP Link	R. Kasi Pemerintahan -
TP Link	R. Sekretariat - 9/4 Mbps
TP Link	R. Kessos - 25/38 Mbps
TP Link	R. Pembangunan - 18/33 Mbps
TP Link	R. Pertemuan -
TP Link	R. Perencanaan - 22/10 Mbps
TP Link	R. Keuangan -
Huwaei	R. Trantib - 8/8 Mbps
TP Link	R. Rumdin Camat - 23/46 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.36 Kecamatan Waru

Kecamatan Waru memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Waru.

Tabel 4.36: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Waru

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
ZTE	R. Pelayanan - 23/6 Mbps
ZTE	R. Pelayanan - 25/25 Mbps
Huwaei	R. Pelayanan - 20/4 Mbps
ZTE	Depan R. Pembangunan - 29/15 Mbps
TP Link	R. Camat - 38/49 Mbps
ZTE	Rumah Dinas - 37/7 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.37 Kecamatan Sedati

Kecamatan Sedati memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Sedati.

Tabel 4.37: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Sedati

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
ZTE	R. Sekretariat - 18/4 Mbps
Mikrotik	R. Sekretariat - 12/8 Mbps
TP Link	R. Rapat - 50/42 Mbps
Mikrotik	Depan Trantib - 14/8 Mbps
Mikrotik	R. Dinas - 14/8 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.38 Kecamatan Taman

Kecamatan Taman memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 50 Mbps dan Jatayu dengan

kapasitas 10 Mpbs. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Taman.

Tabel 4.38: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Taman

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ruckus	Pendopo - 39/50 Mbps
TP Link	R. Pembangunan - 7/12 Mbps
ZTE	R. Camat - 32/4 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.39 Kecamatan Sukodono

Kecamatan Sukodono memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Sukodono.

Tabel 4.39: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Kecamatan Sukodono

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Tenda	R. Server - 1/14 Mbps
Netgear	R. MPP Pelayanan - 39/37 Mbps
Netgear	R. Sekretariat - 38/34 Mbps
Tenda	Lobby Kecamatan - 31/1 Mbps
Tenda	Lantai 2 - 38/16 Mbps
TP Link	R. Staff - 19/10 Mbps
ZTE	R. Rapat 1 - 41/19 Mbps

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.40 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 4.40: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Lynksys E1200	R. Dalwas - 7/33 Mbps
TP Link WR941	R. Kadin - 10/79 Mbps
TP Link WR941	R. Kelembagaan - 9/83 Mbps
Lynksys E1200	R. Usaha Mikro - 41/34 Mbps
Lynksys E1200	Lobby Bawah - 19/23 Mbps
Lynksys E1200	R. Pembayaran - 32/42 Mbps

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.41 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 4.41: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ubiquiti	R. Rapat - 152/265 Mbps
Ubiquiti	R. Dinas Pasar - 78/111 Mbps
Ubiquiti	R. Perdagangan - 97/117 Mbps
Ubiquiti	R. Perindustrian - 134/120 Mbps
Ubiquiti	R. Kadin - 19/4 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.42 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tambahan internet yaitu, First Media dengan kapasitas 25 Mbps Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 4.42: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
D Link	R. Sekretariat 21/23 Mbps
Unifi	Parkiran - 65/68 Mbps
Unifi	Parkiran - 129/236 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.43 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Rumah Sakit Umum Daerah memiliki tambahan internet yaitu, Biznet dengan kapasitas 100 Mbps dan Hypernet dengan kapasitas 100 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Tabel 4.43: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ruijie	R. Tunggu VK Bersalin - 51/38 Mbps
Ruijie	R. Tunggu IPIT - 36/36 Mbps
Ruijie	Poli Eksekutif - 43/47 Mbps
Ruijie	R. Tunggu Kelas 3 - 40/40 Mbps
Ruckus	R. Tunggu IGD - 147/103 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.44 Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 4.44: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Dinas Komunikasi dan Informatika

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ruckus	TIK - 241/227 Mbps
Netgear	TIK lt. 2 - 34/40 Mbps
ZTE	Lobby - 13/21 Mbps
TP Link	P3M - 34/15 Mbps
Netgear	Sekretariat - 65/89 Mbps
Linksys	TKI - 213/201 Mbps
Huwaei	Pikom - 1/9 Mbps
Linksys	TKI - 46/59 Mbps
Toto Link	Statistik - 44/40 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.45 Inspektorat Daerah

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Inspektorat Daerah.

Tabel 4.45: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan di Inspektorat Daerah

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ruckus	Irban 3 - 107/124 Mbps
TP Link WR820	Irban 4 - 15/34 Mbps
TP Link WR820	Irban 2 - 28/39 Mbps
Ruckus	Inspektur - 111/121 Mbps
TP Link EA8110	Irban 1 - 36/40 Mbps
Ruckus	sekretariat - 149/134 Mbps
TP LinkEAP110	Evlap - 40/38 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas dengan 20 Mbps.

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

Tabel 4.46: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Ubiquiti	Lobby - 50/58 Mbps
TP Link WR741	R. Pengolahan Perpus - 33/49 Mbps
TP Link WR820	R. Arsip - 23/42 Mbps
Ubiquiti -	Depan Café Baca - 46/61 Mbps
TP Link	R. Rapat lt. 2 - 35/29 Mbps
Ruckus	Gazebo - 130/80 Mbps
Ruckus	R. Baca Atas - 141/55 Mbps
Huawei	R. Baca Atas - 18/6 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.47 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 4.47: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	Sekretariat - 37/35 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.48 Dinas PPPA dan KB

Dinas PPPA dan KB memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Indihome dengan kapasitas dengan 10 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas PPPA dan KB.

Tabel 4.48: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Dinas PPPA dan KB

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
TP Link	R. Rapat - 24/24 Mbps
TP Link	R. Pengendalian Penduduk - 7/5 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.49 Badan Pelayanan Pajak Daerah

Badan Pelayanan Pajak Daerah memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Astinet dengan 30 Mbps dan Telkom Astinet dengan kapasitas 10 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Tabel 4.49: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pelayanan Pajak Daerah

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Unifi	Server - 48/52 Mbps
Azus	Sekretariat - 1/3 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.50 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tambahan internet yaitu, Telkom Astinet dengan 30 Mbps. Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 4.50: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Tenda -	R. Aset - 1/3 Mbps
D Link	R. Sekretariat - 3/27 Mbps
Netgear	R. Rapat 2 - 30/28 Mbps
TP Link	R. Rapat 3 - 30/63 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.4.51 Mall Pelayanan Publik (MPP)

Berikut adalah Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 4.51: Penempatan Access Point (AP) yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Merk Access Point (AP)	Penempatan-Kapasitas
Netgear	Kantin - 71/45 Mbps
Netgear	Lobby - 71/114 Mbps
Netgear	R. Pelayanan - 50/70 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

4.5 Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022

Berikut merupakan data Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 dan data Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada periode Januari s.d. Desember Tahun 2022. Data tersebut dipaparkan dalam data tabel frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.52: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari 2021

No	OPD/Lokasi FO	JANUARI	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	221.7	290.94
2	Sekretariat DPRD	40.03	67.57
3	Inspektorat	63.21	62.86
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.3	72.62
5	Dinas Kesehatan	40.94	75.08
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	54.04	97.51
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	16.12	26.02
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	77.12	76.34
9	Dinas Sosial	29.18	55.53
10	Dinas Tenaga Kerja	14.93	27.26
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	66.82	112.58
12	Dinas Pangan dan Pertanian	18.48	31.97
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	57.87	99.94
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.91	108.18
15	Dinas Perhubungan	201.13	200.45
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.22	192.3
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80.85	80.83
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.44	1.42
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	40.12	59.91
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42.05	73.19
21	Dinas Perikanan	32.39	64.12

Lanjutan Tabel 4.52

No	OPD/Lokasi FO	JANUARI	
		Max	
		In	Out
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	230.7	391.5
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	41.89	70.12
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.29	2.27
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	2.29	2.27
26	Badan Kepegawaian Daerah	200.23	130.34
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88.69	161.26
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.78	106.84
29	Rumah Sakit Umum Daerah	41.95	41.77
30	Kecamatan Sidoarjo	1.59	2.14
31	Kecamatan Candi	12.81	12.73
32	Kecamatan Buduran	21.99	21.91
33	Kecamatan Tanggulangin	34.7	34.62
34	Kecamatan Wonoayu	5.92	11.37
35	Kecamatan Tarik	62.78	62.57
36	Kecamatan Gedangan	16.03	15.91
37	Kecamatan Krian	35.02	61.74
38	Kecamatan Prambon	76.2	129.1
39	Kecamatan Porong	32.87	32.73
40	Kecamatan Sedati	4.7	7.69
41	Kecamatan Waru	24.47	35
42	Kecamatan Krembung	37.55	37.41
43	Kecamatan Balongbendo	13.2	12.26
44	Kecamatan Taman	30.56	31.23
45	Kecamatan Tulangan	30.02	29.98
46	Kecamatan Jabon	54.03	53.87
47	Puskesmas Sidoarjo	15.89	19.96
48	MPP Sukodono	46.93	81.52
49	PASEBAN	615.65	615.55
50	Mall Pelayanan Publik	106.15	107.65
51	Sidoarjo Command Center	110.41	96.94
52	GOR Delta	24.54	19.23
53	Wifi Alun-alun	127.95	102.32
54	Kejaksaan Negeri	34.71	42.89

Lanjutan Tabel 4.52

No	OPD/Lokasi FO	JANUARI	
		Max	
		In	Out
55	KPU	15.13	28.72
56	SMPN 4 Sidoarjo	0	0
57	SMPN 5 Sidoarjo	139.26	194.95
	Total	3813.73	4684.98
	Rata-rata	66,9075	82,1926

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Januari tahun 2021, untuk In adalah 3813.73 Mbps dan out 4684,98 Mbps. Dari 57 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di PASEBAN dengan nilai 615.65 dan terkecil berada di SMPN 4 Sidoarjo dengan nilai 0 yang berarti tidak menggunakan bandwitch dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidaorjo. Sedangkan untuk Out terbesar berada PASEBAN dengan nilai 615.55 dan terkecil untuk Out adalah SMPN 4 Sidoarjo dengan nilai Out 0.

Tabel 4.53: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Februari 2021

No	OPD/Lokasi FO	FEBRUARI	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	255,36	276,16
2	Sekretariat DPRD	84,77	159,6
3	Inspektorat	79,83	79,11
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63,18	62,81
5	Dinas Kesehatan	31,16	52,23
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PU dan PR)	64,34	118,86
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	34,64	40,74
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	70	51,44

Lanjutan Tabel 4.53

No	OPD/Lokasi FO	FEBRUARI	
		Max	
		In	**Out**
9	Dinas Sosial	31,43	59,99
10	Dinas Tenaga Kerja	17,39	29,77
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	31,3	30,58
12	Dinas Pangan dan Pertanian	21,15	35,81
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47,58	84,53
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108,55	422,34
15	Dinas Perhubungan	316,64	314,69
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	115,85	180,32
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20,61	20,57
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,91	0,89
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	20,88	36,9
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,34	108,04
21	Dinas Perikanan	1,86	2,47
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	19,5	34,64
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	39,42	60,1
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,07	2,06
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	21,09	38,29
26	Badan Kepegawaian Daerah	116,37	204,13
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18,26	34,55
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30,77	57,99
29	Rumah Sakit Umum Daerah	70,13	69,97
30	Kecamatan Sidoarjo	7,72	7,34
31	Kecamatan Candi	14,37	13,87
32	Kecamatan Buduran	30,1	29,99
33	Kecamatan Tanggulangin	46,2	45,32
34	Kecamatan Wonoayu	6,96	7,92
35	Kecamatan Tarik	58,15	58,32
36	Kecamatan Gedangan	14,15	14,15
37	Kecamatan Krian	13,22	25,2
38	Kecamatan Prambon	31,53	55,59
39	Kecamatan Porong	48,6	48,35

Lanjutan Tabel 4.53

No	OPD/Lokasi FO	FEBRUARI	
		Max	
		In	**Out**
40	Kecamatan Sedati	14,42	22,79
41	Kecamatan Waru	31,86	54,35
42	Kecamatan Krembung	37,18	37,01
43	Kecamatan Balongbendo	10,68	10,61
44	Kecamatan Taman	32,73	32,56
45	Kecamatan Tulangan	25,26	26,78
46	Kecamatan Jabon	34,6	34,39
47	Puskesmas Sidoarjo	16,17	30,8
48	MPP Sukodono	56,4	98,77
49	PASEBAN	162,2	160,93
50	Mall Pelayanan Publik	374,89	377,64
51	Sidoarjo Command Center	49,99	34,74
52	GOR Delta	43,85	62,05
53	Wifi Alun-alun	127,63	81,25
54	Kejaksaan Negeri	26,52	49,59
55	KPU	74,89	144,46
56	SMPN 4 Sidoarjo	0	0
57	SMPN 5 Sidoarjo	12,57	20,74
	Total	3196,22	4255,09
	Rata-rata	56,07404	74,6507

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Februari tahun 2021, untuk In adalah 3196,22 Mbps dan out 4255,09 Mbps. Dari 57 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Mall Pelayanan Publik dengan nilai 374,89 dan terkecil berada di SMPN 4 Sidoarjo dengan nilai 0 yang berarti tidak menggunakan bandwitch dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidaorjo. Sedangkan untuk Out terbesar berada Mall Pelayanan Publik dengan nilai 377,64 dan terkecil untuk Out adalah SMPN 4 Sidoarjo dengan nilai Out 0.

Tabel 4.54: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Maret 2021

No	OPD/Lokasi FO	MARET	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	124,61	126,95
2	Sekretariat DPRD	109,46	115,73
3	Inspektorat	201,4	200,05
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47,89	79,75
5	Dinas Kesehatan	51,25	81,61
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	143,44	215,74
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	58,64	117,16
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	54,66	54,52
9	Dinas Sosial	53,01	99,04
10	Dinas Tenaga Kerja	52,98	79,33
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	527,46	980,05
12	Dinas Pangan dan Pertanian	243,9	436,02
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	508,57	300,52
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	139,05	132,65
15	Dinas Perhubungan	246,78	245,91
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	135,85	154,06
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	70,63	67,87
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,84	2,72
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	55,4	81,44
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	285,1	424,22
21	Dinas Perikanan	3,59	3,86
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	14,68	26,75
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	191,38	332,26
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38,19	19,07
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	71,69	120,39
26	Badan Kepegawaian Daerah	59,09	86,52
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,66	16,42
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	381,69	665,1

Lanjutan Tabel 4.54

No	OPD/Lokasi FO	MARET	
		Max	
		In	**Out**
29	Rumah Sakit Umum Daerah	856,7	891,92
30	Kecamatan Sidoarjo	10,49	20,37
31	Kecamatan Candi	15,05	15,01
32	Kecamatan Buduran	29,06	28,92
33	Kecamatan Tanggulangin	177,26	172,18
34	Kecamatan Wonoayu	63,1	108,15
35	Kecamatan Tarik	48,68	48,54
36	Kecamatan Gedangan	354,35	354,22
37	Kecamatan Krian	24,02	41,29
38	Kecamatan Prambon	26,51	43,09
39	Kecamatan Porong	38,06	37,9
40	Kecamatan Sedati	12,92	22,56
41	Kecamatan Waru	103,94	121,82
42	Kecamatan Krembung	50,41	50,1
43	Kecamatan Balongbendo	28,37	28,14
44	Kecamatan Taman	33,21	32,91
45	Kecamatan Tulangan	164,5	164,42
46	Kecamatan Jabon	39,32	39,06
47	Puskesmas Sidoarjo	15,73	30,1
48	MPP Sukodono	21,955	33,715
49	PASEBAN	85,95	85,49
50	Mall Pelayanan Publik	476,74	480,98
51	Sidoarjo Command Center	655,08	344,15
52	GOR Delta	110,56	63,67
53	Wifi Alun-alun	307,84	250,55
54	Kejaksaan RI	23,69	41,38
55	KPU	8,94	16,49
56	SMPN 4 Sidoarjo	1,74	3,07
57	SMPN 5 Sidoarjo	16,95	15,57
	Total	7683	8851,5
	Rata-rata	134,79	155,29

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret tahun 2021, untuk In adalah 7683 Mbps dan out 8851,5 Mbps. Dari 57 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Sidoarjo Command Center dengan nilai 655,08 dan terkecil berada di SMPN 4 Sidoarjo dengan nilai 1,74. Sedangkan untuk Out terbesar berada Dinas PMD, P3A, dan KB dengan nilai 980,05 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai Out 2,72.

Tabel 4.55: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2021

No	OPD/Lokasi FO	APRIL	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	96,94	93,58
2	Sekretariat DPRD	72,57	122,89
3	Inspektorat	14,44	252,24
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	319,94	548,64
5	Dinas Kesehatan	63,86	115,2
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	47,6	88,11
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	17,22	32,1
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	54,49	54,08
9	Dinas Sosial	70,24	123,68
10	Dinas Tenaga Kerja	45,1	78,66
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	34,4	64,11
12	Dinas Pangan dan Pertanian	39,05	66,96
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	311,84	515,66
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320,47	325,38
15	Dinas Perhubungan	265,92	256,54
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	241,19	240,21
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	38,25	38,12
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,1	2,08
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	141,02	265,15

Lanjutan Tabel 4.55

No	OPD/Lokasi FO	APRIL	
		Max	
		In	**Out**
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49,31	69,02
21	Dinas Perikanan	1,88	2,42
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	61,27	105,38
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	81,69	81,03
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10,38	10,2
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	27,06	44,94
26	Badan Kepegawaian Daerah	70,07	117,69
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22,89	38,68
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27,4	36,89
29	Rumah Sakit Umum Daerah	15,99	15,88
30	Kecamatan Sidoarjo	85,52	133,61
31	Kecamatan Candi	30,54	30,42
32	Kecamatan Buduran	31,51	31,37
33	Kecamatan Tanggulangin	628,65	628,63
34	Kecamatan Wonoayu	34,06	62,44
35	Kecamatan Tarik	257,82	241,75
36	Kecamatan Gedangan	92,79	91,71
37	Kecamatan Krian	125,71	239,7
38	Kecamatan Prambon	18,76	166,46
39	Kecamatan Porong	44,53	44,35
40	Kecamatan Sedati	4,22	7,52
41	Kecamatan Waru	20,27	28,16
42	Kecamatan Krembung	90,57	94,26
43	Kecamatan Balongbendo	24,89	24,87
44	Kecamatan Taman	12,8	12,72
45	Kecamatan Tulangan	35,45	35,3
46	Kecamatan Jabon	20,95	20,85
47	Puskesmas Sidoarjo	12,47	13,11
48	MPP Sukodono	48,3	87,57
49	PASEBAN	119,02	118,46
50	Mall Pelayanan Publik	220,69	223,97
51	Sidoarjo Command Center	36,02	36,05
52	GOR Delta	20,03	18,33

Lanjutan Tabel 4.55

No	OPD/Lokasi FO	APRIL	
		Max	
		In	**Out**
53	Wifi Alun-alun	113,56	68,04
54	Kejaksaan RI	22,87	955,74
55	KPU	80,1	135,54
56	SMPN 4 Sidoarjo	6,87	11,88
57	SMPN 5 Sidoarjo	36,56	36,41
	Total	4840,11	7404,74
	Rata-rata	84,9142	129,908

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan April tahun 2021, untuk In adalah 4840,11 Mbps dan out 7404,74 Mbps. Dari 57 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Kecamatan Tanggulangin dengan nilai 628,65 dan terkecil berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 2,1. Sedangkan untuk Out terbesar berada Kejaksaan RI dengan nilai 955,74 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai Out 2,08.

Tabel 4.56: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Mei 2021

No	OPD/Lokasi FO	MEI	
		Max	
		In	**Out**
1	Sekretariat Daerah	97,04	116,12
2	Sekretariat DPRD	57,4	95,46
3	Inspektorat	83,97	83,27
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85,86	116,51
5	Dinas Kesehatan	51,87	91,48
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	65,43	120,56
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	20,24	33,71

Lanjutan Tabel 4.56

No	OPD/Lokasi FO	MEI	
		Max	
		In	**Out**
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	43,44	43,29
9	Dinas Sosial	136,31	240,36
10	Dinas Tenaga Kerja	495,62	862,32
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	32,58	59,22
12	Dinas Pangan dan Pertanian	22,61	41,65
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	41,76	71,09
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	733,01	721,57
15	Dinas Perhubungan	260,78	260,09
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	134,05	228,55
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	41,55	41,36
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,449	0,415
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	41,85	70,71
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13,29	21,18
21	Dinas Perikanan	2,01	2,63
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	18,57	25,03
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	80,11	77,68
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,04	1,01
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	65,35	96,7
26	Badan Kepegawaian Daerah	83,08	149,83
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	138,27	247,78
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31,3	54,96
29	Rumah Sakit Umum Daerah	30,31	30,17
30	Kecamatan Sidoarjo	31,46	60,47
31	Kecamatan Candi	6,2	6,16
32	Kecamatan Buduran	9,24	9,2
33	Kecamatan Tanggulangin	41,41	41,27
34	Kecamatan Wonoayu	3	5,77
35	Kecamatan Tarik	33,6	33,31
36	Kecamatan Gedangan	136,54	130,88
37	Kecamatan Krian	16,42	156,47
38	Kecamatan Prambon	18,51	32,21
39	Kecamatan Porong	32,17	32,05

Lanjutan Tabel 4.56

No	OPD/Lokasi FO	MEI	
		Max	
		In	**Out**
40	Kecamatan Sedati	15,23	2,96
41	Kecamatan Waru	10,05	18,44
42	Kecamatan Krembung	30,22	1310
43	Kecamatan Balongbendo	37,85	37,12
44	Kecamatan Taman	31,08	30,87
45	Kecamatan Tulangan	23,25	23,17
46	Kecamatan Jabon	20,82	20,73
47	Puskesmas Sidoarjo	57,91	71,68
48	MPP Sukodono	310,24	312,41
49	PASEBAN	128,56	127,58
50	Mall Pelayanan Publik	310,24	312,41
51	Sidoarjo Command Center	35,33	35,33
52	GOR Delta	25,1	15,12
53	Wifi Alun-alun	90,79	55,15
54	Kejaksaan RI	34,6	59,75
55	KPU	6,65	11,95
56	SMPN 4 Sidoarjo	7,56	13,23
57	SMPN 5 Sidoarjo	7,62	10,14
58	POLRES	121,91	154,28
	Total	4542,71	7134,82
	Rata-rata	78,3226	123,014

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Mei tahun 2021, untuk In adalah 4542,71 Mbps dan out 7134,82 Mbps. Dari 58 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 733,01 dan terkecil berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 0,449. Sedangkan untuk Out terbesar berada Dinas Tenaga Kerja dengan nilai 862,32 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai Out 0,415.

Tabel 4.57: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Juni 2021

No	OPD/Lokasi FO	JUNI	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	204,02	287,48
2	Sekretariat DPRD	69,69	126,98
3	Inspektorat	81,65	81,12
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56,34	83,48
5	Dinas Kesehatan	32,42	11,38
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	65,79	120,08
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	20,6	38,7
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	79,41	79,18
9	Dinas Sosial	53,74	53,3
10	Dinas Tenaga Kerja	21,42	40,11
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	27,81	475,82
12	Dinas Pangan dan Pertanian	14,53	26,33
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	79,04	142,59
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28,16	27,95
15	Dinas Perhubungan	256,1	254,62
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	245	437,76
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	24,38	24,33
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,77	0,74
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	24,43	42,67
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45,38	81,87
21	Dinas Perikanan	1,33	1,85
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	20,85	39,78
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	52,89	69,38

Lanjutan Tabel 4.57

No	OPD/Lokasi FO	JUNI	
		Max	
		In	**Out**
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5,47	5,45
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	57,76	57,37
26	Badan Kepegawaian Daerah	71,83	120,17
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,83	209,41
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49,76	91,07
29	Rumah Sakit Umum Daerah	18,95	18,88
30	Kecamatan Sidoarjo	10,23	15,8
31	Kecamatan Candi	30,36	29,14
32	Kecamatan Buduran	31,37	31,33
33	Kecamatan Tanggulangin	41,56	41,42
34	Kecamatan Wonoayu	2,71	4,95
35	Kecamatan Tarik	71,99	71,16
36	Kecamatan Gedangan	12,66	12,6
37	Kecamatan Krian	21,9	38,62
38	Kecamatan Prambon	15,02	27,56
39	Kecamatan Porong	42,52	42,42
40	Kecamatan Sedati	22,91	32,41
41	Kecamatan Waru	10,58	20,25
42	Kecamatan Krembung	38,24	37,98
43	Kecamatan Balongbendo	33	32,62
44	Kecamatan Taman	26,37	26,2
45	Kecamatan Tulangan	21,17	21,09
46	Kecamatan Jabon	79,03	78,58
47	Puskesmas Sidoarjo	30,15	31,1
48	MPP Sukodono	41,53	73,45
49	PASEBAN	135,21	134,11
50	Mall Pelayanan Publik	154,78	155,73
51	Sidoarjo Command Center	33,86	33,9
52	GOR Delta	32,45	32,81
53	Wifi Alun-alun	116,57	101,21
54	Kejaksaan RI	23,97	36,1
55	KPU	10,9	19,61
56	SMPN 4 Sidoarjo	2,41	4,23

Lanjutan Tabel 4.57

No	OPD/Lokasi FO	JUNI	
		Max	
		In	**Out**
57	SMPN 5 Sidoarjo	5,34	9,73
58	POLRES	123,84	156,57
59	Desa Lebo	7,32	14,09
60	Desa Pabean	8,03	14
	Total	2952,33	4430,62
	Rata-rata	49,2055	73,8437

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Juni tahun 2021, untuk In adalah 2952,33 Mbps dan out 4430,62 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Dinas Perhubungandengan nilai 256,1 dan terkecil berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 0,77. Sedangkan untuk Out terbesar berada Dinas PMD, P3A, dan KB dengan nilai 475,82 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai Out 0,74.

Tabel 4.58: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Juli 2021

No	OPD/Lokasi FO	JULI	
		Max	
		In	**Out**
1	Sekretariat Daerah	150,39	185,84
2	Sekretariat DPRD	62,47	106,15
3	Inspektorat	47,91	47,57
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37,98	60,76
5	Dinas Kesehatan	33,28	61,09
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	58,38	106,31
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	12,02	21,58
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	44,07	43,86
9	Dinas Sosial	34,69	34,45

Lanjutan Tabel 4.58

No	OPD/Lokasi FO	JULI	
		Max	
		In	**Out**
10	Dinas Tenaga Kerja	16,42	29,08
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	44,89	64,08
12	Dinas Pangan dan Pertanian	17,42	33,72
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	50,41	87,38
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66,95	66,92
15	Dinas Perhubungan	250,39	254,64
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	135,25	129,81
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	21,77	21,73
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,61	0,61
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	52,89	99,74
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41,64	68,48
21	Dinas Perikanan	1,95	1,93
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	27,74	51,73
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	17,39	32,06
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,83	4,8
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	53,97	53,54
26	Badan Kepegawaian Daerah	38,27	65,63
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17,39	32,06
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35,96	53,21
29	Rumah Sakit Umum Daerah	140,5	140,19
30	Kecamatan Sidoarjo	24,84	47,7
31	Kecamatan Candi	13,09	13,04
32	Kecamatan Buduran	29,37	29,24
33	Kecamatan Tanggulangin	49,22	49,06
34	Kecamatan Wonoayu	5,28	5,18
35	Kecamatan Tarik	50,8	50,34
36	Kecamatan Gedangan	17,93	17,72
37	Kecamatan Krian	23,02	38,1
38	Kecamatan Prambon	23,05	42,28
39	Kecamatan Porong	32,39	32,24

Lanjutan Tabel 4.58

No	OPD/Lokasi FO	JULI	
		Max	
		In	**Out**
40	Kecamatan Sedati	42,71	80,5
41	Kecamatan Waru	19,46	29,31
42	Kecamatan Krembung	30,23	30,04
43	Kecamatan Balongbendo	30,39	30,38
44	Kecamatan Taman	82,43	81,24
45	Kecamatan Tulangan	18,24	18,13
46	Kecamatan Jabon	58,91	58,57
47	Puskesmas Sidoarjo	12,73	24,12
48	MPP Sukodono	39,52	67,68
49	PASEBAN	123	122,11
50	Mall Pelayanan Publik	168	169,45
51	Sidoarjo Command Center	43,78	43,84
52	GOR Delta	74,39	64,42
53	Wifi Alun-alun	139,94	97,1
54	Kejaksaan RI	52,83	40,45
55	KPU	10	18,14
56	SMPN 4 Sidoarjo	8,85	14,88
57	SMPN 5 Sidoarjo	10,87	13,88
58	POLRES	164,99	144,7
59	Desa Lebo	7,33	14,02
60	Desa Pabean	40,82	77,74
	Total	2966,24	3524,55
	Rata-rata	49,4373	58,7425

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Juli tahun 2021, untuk In adalah 2966,24 Mbps dan out 3524,55 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Dinas Perhubungan dengan nilai 250,39 dan terkecil berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 0,61. Sedangkan untuk Out terbesar berada

Dinas Perhubungan dengan nilai 254,64 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai Out 0,61.

Tabel 4.59: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Agustus Tahun 2021

No	OPD/Lokasi FO	AGUSTUS	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	166,63	208,98
2	Sekretariat DPRD	68,25	95,08
3	Inspektorat	67,12	66,82
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42,58	62,95
5	Dinas Kesehatan	39,65	67,8
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	50,78	89,61
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	15,95	28,02
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	47,86	47,68
9	Dinas Sosial	41,77	38,89
10	Dinas Tenaga Kerja	19,59	31,83
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	21,82	37,4
12	Dinas Pangan dan Pertanian	25,1	49,17
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	42,28	67,61
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135,85	135,66
15	Dinas Perhubungan	200,94	200,62
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	112,88	106,68
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	22,78	22,68
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4,91	5,58
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	20,11	28,07
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49,82	81,83

Lanjutan Tabel 4.59

No	OPD/Lokasi FO	AGUSTUS	
		Max	
		In	**Out**
21	Dinas Perikanan	6,9	4,6
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	21,27	37,57
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	27,15	46,2
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12,95	13,61
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	47,5	47,12
26	Badan Kepegawaian Daerah	38,58	58,62
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,29	17,63
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44,32	82,83
29	Rumah Sakit Umum Daerah	177,15	176,49
30	Kecamatan Sidoarjo	15,75	22,84
31	Kecamatan Candi	21,56	21,47
32	Kecamatan Buduran	42,08	41,78
33	Kecamatan Tanggulangin	49,22	49,07
34	Kecamatan Wonoayu	5,69	6,94
35	Kecamatan Tarik	85,23	84,39
36	Kecamatan Gedangan	30,85	30,6
37	Kecamatan Krian	13,49	24,24
38	Kecamatan Prambon	35,62	64,43
39	Kecamatan Porong	51,24	51,05
40	Kecamatan Sedati	19,7	33,39
41	Kecamatan Waru	21,97	35,9
42	Kecamatan Krembung	45,86	46,35
43	Kecamatan Balongbendo	54,92	54,5
44	Kecamatan Taman	41,98	41,25
45	Kecamatan Tulangan	15,67	15,49
46	Kecamatan Jabon	55,08	54,89
47	Puskesmas Sidoarjo	19,45	37,28
48	MPP Sukodono	54,47	89,97
49	PASEBAN	84,29	83,73
50	Mall Pelayanan Publik	254,93	257,07
51	Sidoarjo Command Center	40,3	40,34

Lanjutan Tabel 4.59

No	OPD/Lokasi FO	AGUSTUS	
		Max	
		In	**Out**
52	GOR Delta	48,39	37,64
53	Wifi Alun-alun	107,27	63,56
54	Kejaksaan RI	24,84	32,53
55	KPU	18,83	36,21
56	SMPN 4 Sidoarjo	8,28	15,01
57	SMPN 5 Sidoarjo	9,59	12,95
58	POLRES	112,12	117,97
59	Desa Lebo	6,71	12,48
60	Desa Pabean	13,75	22,91
	Total	2993,91	3495,86
	Rata-rata	49,8985	58,26433

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Agustus tahun 2021, untuk In adalah 2993,91 Mbps dan out 3495,86 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Mall Pelayanan Publik dengan nilai 254,93 dan terkecil berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 4,91. Sedangkan untuk Out terbesar berada Mall Pelayanan Publik dengan nilai 257,07 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Perikanan dengan nilai Out 4,6.

Tabel 4.60: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan September 2021

No	OPD/Lokasi FO	SEPTEMBER	
		Max	
		In	**Out**
1	Sekretariat Daerah	177,08	247,36
2	Sekretariat DPRD	51,39	92,59
3	Inspektorat	82,51	82,52
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384,89	659,82

Lanjutan Tabel 4.60

No	OPD/Lokasi FO	SEPTEMBER	
		Max	
		In	**Out**
5	Dinas Kesehatan	53,94	93,47
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	68,74	119,29
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	29,72	37,66
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	52,17	52,04
9	Dinas Sosial	686,74	42,48
10	Dinas Tenaga Kerja	30,42	55,49
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	32,83	60,33
12	Dinas Pangan dan Pertanian	27,01	34,77
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48,71	86,78
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130,81	130,6
15	Dinas Perhubungan	290,65	289,86
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	123,42	199,64
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	21,86	33,49
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	492,57	446,2
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	189,05	308,49
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37,05	61,93
21	Dinas Perikanan	27,25	14,72
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	21,9	41,51
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	47,27	78,56
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14,29	14,27
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	99,35	92,43
26	Badan Kepegawaian Daerah	330,31	475,94
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,98	29,6
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54,8	90,04
29	Rumah Sakit Umum Daerah	210,26	209,42
30	Kecamatan Sidoarjo	21,27	40,37
31	Kecamatan Candi	19,04	18,91
32	Kecamatan Buduran	59,48	59,3
33	Kecamatan Tanggulangin	53,7	53,92
34	Kecamatan Wonoayu	5,68	10,57

Lanjutan Tabel 4.60

No	OPD/Lokasi FO	SEPTEMBER	
		Max	
		In	**Out**
35	Kecamatan Tarik	56,2	55,76
36	Kecamatan Gedangan	16,94	27,74
37	Kecamatan Krian	15,26	27,02
38	Kecamatan Prambon	21,13	38,81
39	Kecamatan Porong	33,77	33,32
40	Kecamatan Sedati	27,01	42,94
41	Kecamatan Waru	19,42	23,88
42	Kecamatan Krembung	40,71	40,46
43	Kecamatan Balongbendo	47,75	47,85
44	Kecamatan Taman	38,48	38,13
45	Kecamatan Tulangan	33,37	33,17
46	Kecamatan Jabon	49,76	48,54
47	Puskesmas Sidoarjo	14,01	26,57
48	MPP Sukodono	49,88	91,13
49	PASEBAN	169,72	168,44
50	Mall Pelayanan Publik	207,67	209,1
51	Sidoarjo Command Center	109,9	110,06
52	GOR Delta	55,28	54,54
53	Wifi Alun-alun	103,35	58,77
54	Kejaksaan RI	19,98	33,97
55	KPU	6,09	11,78
56	SMPN 4 Sidoarjo	6,89	10,1
57	SMPN 5 Sidoarjo	22,44	37,23
58	POLRES	109,87	117,09
59	Desa Lebo	620	11,66
60	Desa Pabean	22,23	34,56
	Total	5909,25	5796,99
	Rata-rata	98,4875	96,6165

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan September tahun 2021, untuk In adalah 5909,25 Mbps dan out 5796,99 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo,

Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Dinas Sosial dengan nilai 686,74 dan terkecil berada di KPU dengan nilai 6,08. Sedangkan untuk Out terbesar berada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 659,82 dan terkecil untuk Out adalah SMPN 4 Sidoarjo dengan nilai Out 10,1.

Tabel 4.61: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Oktober Tahun 2021

No	**OPD/Lokasi FO**	**OKTOBER**	
		Max	
		In	**Out**
1	Sekretariat Daerah	228,08	306,9
2	Sekretariat DPRD	75,86	65,27
3	Inspektorat	103,26	102,22
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63,59	84,93
5	Dinas Kesehatan	41,34	60,34
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	78,09	138,85
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	29,55	53,12
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	56,62	56,42
9	Dinas Sosial	1,92	3,83
10	Dinas Tenaga Kerja	26,04	32,77
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	49,83	46,71
12	Dinas Pangan dan Pertanian	26,35	45,31
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48,59	88,53
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57,67	57,6
15	Dinas Perhubungan	206,11	205,8
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	186,24	158,82
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	38,32	55,17

Lanjutan Tabel 4.61

No	OPD/Lokasi FO	OKTOBER	
		Max	
		In	**Out**
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63,96	46,51
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	38,32	55,17
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,82	75,8
21	Dinas Perikanan	27,78	13,91
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	14,39	25,22
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	52,48	79,19
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8,32	8,33
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	43,04	42,5
26	Badan Kepegawaian Daerah	91,22	148,32
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19,07	35,94
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51,37	96,87
29	Rumah Sakit Umum Daerah	235,93	234,72
30	Kecamatan Sidoarjo	27,68	39,63
31	Kecamatan Candi	14,39	14,38
32	Kecamatan Buduran	33,64	33,41
33	Kecamatan Tanggulangin	51,04	50,92
34	Kecamatan Wonoayu	2,17	3,74
35	Kecamatan Tarik	61,17	60,65
36	Kecamatan Gedangan	17,12	32,5
37	Kecamatan Krian	31,39	138,58
38	Kecamatan Prambon	27,57	31,61
39	Kecamatan Porong	34,91	34,74
40	Kecamatan Sedati	15,99	24,73
41	Kecamatan Waru	25,95	42,41
42	Kecamatan Krembung	35,26	35,04
43	Kecamatan Balongbendo	38,21	37,88
44	Kecamatan Taman	33,95	33,36
45	Kecamatan Tulangan	26,11	25,9

Lanjutan Tabel 4.61

No	OPD/Lokasi FO	OKTOBER	
		Max	
		In	**Out**
46	Kecamatan Jabon	42,79	43,24
47	Puskesmas Sidoarjo	27,68	39,63
48	MPP Sukodono	54,4	102,16
49	PASEBAN	83,77	83,29
50	Mall Pelayanan Publik	175,38	176,85
51	Sidoarjo Command Center	105,62	105,83
52	GOR Delta	60,88	57,5
53	Wifi Alun-alun	136,79	82,35
54	Kejaksaan RI	18,54	32,82
55	KPU	5,99	11,48
56	SMPN 4 Sidoarjo	15,35	28,05
57	SMPN 5 Sidoarjo	17	30,46
58	POLRES	114,47	113,18
59	Desa Lebo	5,45	10,19
60	Desa Pabean	11,42	14,01
	Total	3374,24	3995,59
	Rata-rata	56,23733	66,59317

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Oktober tahun 2021, untuk In adalah 3374,24 Mbps dan out 3995,59 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 235,93 dan terkecil berada di Kecamatan Wonoayu dengan nilai 2,13. Sedangkan untuk Out terbesar berada Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 234,72 dan terkecil untuk Out adalah Kecamatan Wonoayu dengan nilai Out 3,74.

Tabel 4.62: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo
Bulan November 2021

No	OPD/Lokasi FO	NOVEMBER	
		Max	
		In	**Out**
1	Sekretariat Daerah	199,81	232,51
2	Sekretariat DPRD	50,43	72,87
3	Inspektorat	123,9	122,81
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75,49	93,23
5	Dinas Kesehatan	44,99	74,41
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	75,68	113,48
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	45,19	44,21
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	48,2	51,5
9	Dinas Sosial	42,91	42,71
10	Dinas Tenaga Kerja	27,96	33,73
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	43,76	80,35
12	Dinas Pangan dan Pertanian	24,42	44,04
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	118,71	219,96
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,58	87,36
15	Dinas Perhubungan	367,49	364,27
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	141,04	207,79
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	28,75	48,79
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,2	3,18
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	19,91	33,43
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83,4	110,29
21	Dinas Perikanan	29,6	15
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	28,15	53,13
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	55,24	80,6

Lanjutan Tabel 4.62

No	OPD/Lokasi FO	NOVEMBER	
		Max	
		In	**Out**
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13,48	13,41
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	57,73	57,27
26	Badan Kepegawaian Daerah	174,68	220,61
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,47	19,72
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26,89	49,69
29	Rumah Sakit Umum Daerah	369,38	367,46
30	Kecamatan Sidoarjo	38,3	72,49
31	Kecamatan Candi	27,61	27,49
32	Kecamatan Buduran	40,25	39,2
33	Kecamatan Tanggulangin	41,54	41,43
34	Kecamatan Wonoayu	7,57	13,46
35	Kecamatan Tarik	44,14	44,03
36	Kecamatan Gedangan	14,64	20,11
37	Kecamatan Krian	26,95	37,99
38	Kecamatan Prambon	29,01	53,65
39	Kecamatan Porong	24,28	24,17
40	Kecamatan Sedati	19,75	30,36
41	Kecamatan Waru	18,36	23,16
42	Kecamatan Krembung	34,83	34,67
43	Kecamatan Balongbendo	47,14	46,97
44	Kecamatan Taman	30,29	30,24
45	Kecamatan Tulangan	20,42	20,33
46	Kecamatan Jabon	59,24	57,69
47	Puskesmas Sidoarjo	16,9	18,09
48	MPP Sukodono	51,83	65,68
49	PASEBAN	77	76,67
50	Mall Pelayanan Publik	88,49	89,35
51	Sidoarjo Command Center	110,22	110,37
52	GOR Delta	57,9	69,07
53	Wifi Alun-alun	140,48	110,32
54	Kejaksaan RI	19,17	35,65
55	KPU	13,44	26,03
56	SMPN 4 Sidoarjo	108,72	204,18

Lanjutan Tabel 4.62

No	OPD/Lokasi FO	NOVEMBER	
		Max	
		In	**Out**
57	SMPN 5 Sidoarjo	14,41	26,45
58	POLRES	106	109,34
59	Desa Lebo	5,95	11,5
60	Desa Pabean	15,57	24,42
	Total	3768,84	4552,37
	Rata-rata	62,814	75,87283

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan November tahun 2021, untuk In adalah 3768,84 Mbps dan out 4552,37 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 369,38 dan terkecil berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 3,2. Sedangkan untuk Out terbesar berada Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 367,46 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai Out 3,18.

Tabel 4.63: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Desember Tahun 2021

No	OPD/Lokasi FO	DESEMBER	
		Max	
		In	**Out**
1	Sekretariat Daerah	161,27	210,95
2	Sekretariat DPRD	67,52	99,38
3	Inspektorat	107,69	106,58
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40,91	41,72
5	Dinas Kesehatan	65,22	76,47
6	Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air	66,58	111,32

Lanjutan Tabel 4.63

No	OPD/Lokasi FO	DESEMBER	
		Max	
		In	**Out**
7	Dinas PU Perkim & Cipta Karya	63,24	44,53
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	20,77	39,06
9	Dinas Sosial	666,68	635,45
10	Dinas Tenaga Kerja	24,17	41,88
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	475,66	817,74
12	Dinas Pangan dan Pertanian	26,16	37,25
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	87,62	145,57
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	161,18	150,13
15	Dinas Perhubungan	307,02	306,69
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	117,61	175,37
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25,3	41,46
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,25	2,21
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	39,14	56,23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53,45	101,02
21	Dinas Perikanan	27,14	14,75
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	23,23	33,44
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	30,08	52,08
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11,02	10,96
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	35,16	35,03
26	Badan Kepegawaian Daerah	86,67	147,86
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,01	11,51
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28,12	51,84
29	Rumah Sakit Umum Daerah	533,81	527,7
30	Kecamatan Sidoarjo	7	12,05
31	Kecamatan Candi	19,24	19,19
32	Kecamatan Buduran	31,74	31,5
33	Kecamatan Tanggulangin	47,62	47,55
34	Kecamatan Wonoayu	8,17	6,47

Lanjutan Tabel 4.63

No	OPD/Lokasi FO	DESEMBER	
		Max	
		In	**Out**
35	Kecamatan Tarik	45,07	44,65
36	Kecamatan Gedangan	14,06	26,24
37	Kecamatan Krian	17,13	24,35
38	Kecamatan Prambon	17,81	32,55
39	Kecamatan Porong	28,89	28,71
40	Kecamatan Sedati	11,71	20,83
41	Kecamatan Waru	16,46	26,79
42	Kecamatan Krembung	51,14	50,87
43	Kecamatan Balongbendo	19,66	19,7
44	Kecamatan Taman	37,62	37,52
45	Kecamatan Tulangan	32,43	32,26
46	Kecamatan Jabon	57,27	57
47	Kecamatan Sukodono & MPP Sukodono	32,33	53,42
48	Mall Pelayanan Publik	80,19	80,98
49	Puskesmas Sidoarjo	12,6	22,61
50	PASEBAN	82,26	81,85
51	Sidoarjo Command Center	70,66	70,84
52	GOR Delta	32,64	42,42
53	Wifi Alun-alun	144,86	127,82
54	Kejaksaan RI	19,86	34,26
55	KPU	16,91	32,77
56	SMPN 4 Sidoarjo	2,19	3,72
57	SMPN 5 Sidoarjo	3,5	6,58
58	POLRES	79,95	44,15
59	Desa Lebo	5,36	7,57
60	Desa Pabean	4,41	6,58
	Total	4412,42	5259,98
	Rata-rata	73,54033	87,66633

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Desember tahun 2021, untuk In adalah 4412,42 Mbps dan out 5259,98 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo,

Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Dinas PMD, P3A, dan KB dengan nilai 666,68 dan terkecil berada di SMPN 4 Sidoarjo dengan nilai 2,19. Sedangkan untuk Out terbesar berada Dinas PMD, P3A, dan KB dengan nilai 817,74 dan terkecil untuk Out adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai Out 2,21.

Tabel 4.64: Rata-Rata Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Bulan	In	Out
Januari	3813.73	4684.98
Februari	3196.22	4255.09
Maret	7683.015	8851.475
April	4840.11	7404.74
Mei	4542.709	7134.815
Juni	2952.33	4430.62
Juli	2966.24	3524.55
Agustus	2993.91	3495.86
September	5909.25	5796.99
Oktober	3374.24	3995.59
November	3768.84	4552.37
Desember	4412.42	5259.98
Total	**50453.014**	**63387.06**
Rata-rata	**4204.417833**	**5282.255**

Sumber : Hasil Olah (2022)

Total dari penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 untuk In sebesar 50453,014 Mbps. Sedangkan untuk rata-rata dari penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 untuk In sebesar 4204,417833 Mbps. Penggunaan bandwith untuk in paling banyak adalah pada bulan Maret sebesar 7683.015 Mbps, dan penggunaan terkecil pada bulan Juni sebesar 2952.33 Mbps.

Total dari penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 untuk Out sebesar 63387,06 Mbps. Sedangkan rata-rata dari penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun

2021 untuk Out sebesar 5282,255 Mbps. Penggunaan bandwith untuk out paling banyak adalah pada bulan Maret sebesar 8851.475 Mbps, dan penggunaan terkecil pada bulan Agustus sebesar 3495.86 Mbps.

Tabel 4.65: Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	OPD/Lokasi FO	In	
		Total	Rata-rata
1	Sekretariat Daerah	2082.93	173.5775
2	Sekretariat DPRD	809.84	67.48667
3	Inspektorat	1056.89	88.07417
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1260.95	105.0792
5	Dinas Kesehatan	549.92	45.82667
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	838.89	69.9075
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	363.13	30.26083
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	648.81	54.0675
9	Dinas Sosial	1848.62	154.0517
10	Dinas Tenaga Kerja	792.04	66.00333
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	1389.16	115.7633
12	Dinas Pangan dan Pertanian	506.18	42.18167
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1442.98	120.2483
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2078.19	173.1825
15	Dinas Perhubungan	3169.95	264.1625
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1824.6	152.05
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	435.05	36.25417
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	576.009	48.00075
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	683.12	56.92667

Lanjutan Tabel 4.65

No	OPD/Lokasi FO	In	
		Total	Rata-rata
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	817.65	68.1375
21	Dinas Perikanan	163.68	13.64
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	502.25	41.85417
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	716.99	59.74917
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	124.33	10.36083
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	581.99	48.49917
26	Badan Kepegawaian Daerah	1360.4	113.3667
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	363.81	30.3175
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	851.16	70.93
29	Rumah Sakit Umum Daerah	2701.06	225.0883
30	Kecamatan Sidoarjo	281.85	23.4875
31	Kecamatan Candi	224.26	18.68833
32	Kecamatan Buduran	389.83	32.48583
33	Kecamatan Tanggulangin	1262.12	105.1767
34	Kecamatan Wonoayu	150.31	12.52583
35	Kecamatan Tarik	875.63	72.96917
36	Kecamatan Gedangan	738.06	61.505
37	Kecamatan Krian	363.53	30.29417
38	Kecamatan Prambon	340.72	28.39333
39	Kecamatan Porong	444.23	37.01917
40	Kecamatan Sedati	211.27	17.60583
41	Kecamatan Waru	322.79	26.89917
42	Kecamatan Krembung	522.2	43.51667
43	Kecamatan Balongbendo	386.06	32.17167
44	Kecamatan Taman	431.5	35.95833
45	Kecamatan Tulangan	445.89	37.1575
46	Kecamatan Jabon	571.8	47.65
47	Puskesmas Sidoarjo	271.42	22.61833
48	MPP Sukodono	855.645	71.30375
49	PASEBAN	1796.97	149.7475
50	Mall Pelayanan Publik	2620.22	218.3517
51	Sidoarjo Command Center	1401.17	116.7642

Lanjutan Tabel 4.65

No	OPD/Lokasi FO	In	
		Total	Rata-rata
52	GOR Delta	586.01	48.83417
53	Wifi Alun-alun	1657.03	138.0858
54	Kejaksaan Negeri	321.58	26.79833
55	KPU	267.87	22.3225
56	SMPN 4 Sidoarjo	168.86	14.07167
57	SMPN 5 Sidoarjo	296.11	24.67583
58	Polres	933.15	77.7625
59	Desa Lebo	658.12	54.84333
60	Desa Pabean	116.23	9.685833
	Jumlah	50453.01	4204.418

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah 50453.01 Mbps untuk in dengan rata-rata 4204.418 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, intansi terbesar dalam penggunaan bandwith untuk in adalah Dinas Perhubungan dengan nilai total 3169.95 Mbps dan rata-rata 264.1625 Mbps. Penggunaan bandwith terkecil adalah Desa Pabean dengan nilai total 116.23 Mbps dan rata-rata 9.685833 Mbps.

Tabel 4.66: Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	OPD/Lokasi FO	Out	
		Total	Rata-rata
1	Sekretariat Daerah	2583.77	215.3142
2	Sekretariat DPRD	1219.57	101.6308
3	Inspektorat	1287.17	107.2642
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1967.22	163.935
5	Dinas Kesehatan	860.56	71.71333

Lanjutan Tabel 4.66

No	OPD/Lokasi FO	Out	
		Total	Rata-rata
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PU dan PR)	1439.72	119.9767
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	517.55	43.12917
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	649.41	54.1175
9	Dinas Sosial	1429.71	119.1425
10	Dinas Tenaga Kerja	1342.23	111.8525
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	2828.97	235.7475
12	Dinas Pangan dan Pertanian	883	73.58333
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1910.16	159.18
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2366.34	197.195
15	Dinas Perhubungan	3154.18	262.8483
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2411.31	200.9425
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	496.4	41.36667
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	512.555	42.71292
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	1137.91	94.82583
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1276.87	106.4058
21	Dinas Perikanan	142.26	11.855
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	865.68	72.14
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1059.26	88.27167
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	105.44	8.786667
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	687.85	57.32083
26	Badan Kepegawaian Daerah	1925.66	160.4717
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	854.56	71.21333
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1437.33	119.7775
29	Rumah Sakit Umum Daerah	2724.57	227.0475
30	Kecamatan Sidoarjo	474.81	39.5675
31	Kecamatan Candi	221.81	18.48417

Lanjutan Tabel 4.66

No	OPD/Lokasi FO	Out	
		Total	Rata-rata
32	Kecamatan Buduran	387.15	32.2625
33	Kecamatan Tanggulangin	1255.39	104.6158
34	Kecamatan Wonoayu	246.96	20.58
35	Kecamatan Tarik	855.47	71.28917
36	Kecamatan Gedangan	774.38	64.53167
37	Kecamatan Krian	853.3	71.10833
38	Kecamatan Prambon	717.34	59.77833
39	Kecamatan Porong	442.03	36.83583
40	Kecamatan Sedati	328.68	27.39
41	Kecamatan Waru	459.47	38.28917
42	Kecamatan Krembung	1804.19	150.3492
43	Kecamatan Balongbendo	382.9	31.90833
44	Kecamatan Taman	428.23	35.68583
45	Kecamatan Tulangan	446.02	37.16833
46	Kecamatan Jabon	567.41	47.28417
47	Puskesmas Sidoarjo	395.86	32.98833
48	MPP Sukodono	1185.035	98.75292
49	PASEBAN	1798.97	149.9142
50	Mall Pelayanan Publik	2642.05	220.1708
51	Sidoarjo Command Center	1062.39	88.5325
52	GOR Delta	536.8	44.73333
53	Wifi Alun-alun	1198.44	99.87
54	Kejaksaan Negeri	1395.13	116.2608
55	KPU	493.18	41.09833
56	SMPN 4 Sidoarjo	308.35	25.69583
57	SMPN 5 Sidoarjo	415.09	34.59083
58	polres	957.28	79.77333
59	Desa Lebo	81.51	6.7925
60	Desa Pabean	194.22	16.185
	Jumlah	63387.06	5282.255

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah 63387.06 Mbps untuk out dengan rata-rata 5282.255 Mbps.

Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, intansi terbesar dalam penggunaan bandwith untuk out adalah Dinas Perhubungan dengan nilai total 3154.18 Mbps dan rata-rata 262.8483. Penggunaan bandwith terkecil adalah Desa Lebo dengan nilai total 81.51 Mbps dan rata-rata 6.7925 Mbps.

Tabel 4.67: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari Tahun 2022

No	OPD/Lokasi FO	JANUARI	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	184.31	201.57
2	Sekretariat DPRD	20.10	26.13
3	Inspektorat	80.97	80.09
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77.37	95.91
5	Dinas Kesehatan	48.00	85.67
6	Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air	63.28	104.95
7	Dinas PU Perkim & Cipta Karya	26.36	38.49
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	23.84	42.76
9	Dinas Sosial	28.19	27.99
10	Dinas Tenaga Kerja	31.78	48.31
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	57.51	57.52
12	Dinas Pangan dan Pertanian	25.85	41.06
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.40	66.32
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.22	69.07
15	Dinas Perhubungan	370.82	369.35
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	209.36	370.11
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	29.58	53.21
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	17.58	17.53
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	35.85	62.50
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.16	97.14
21	Dinas Perikanan	26.13	16.61

Lanjutan Tabel 4.67

No	OPD/Lokasi FO	JANUARI	
		Max	
		In	Out
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	20.38	32.67
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	59.16	67.29
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.66	8.63
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	45.35	45.24
26	Badan Kepegawaian Daerah	76.18	123.09
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.80	32.14
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.93	42.07
29	Rumah Sakit Umum Daerah	432.30	429.49
30	Kecamatan Sidoarjo	8.00	9.94
31	Kecamatan Candi	21.66	21.61
32	Kecamatan Buduran	33.62	33.39
33	Kecamatan Tanggulangin	51.52	51.09
34	Kecamatan Wonoayu	7.87	5.48
35	Kecamatan Tarik	50.70	50.60
36	Kecamatan Gedangan	206.29	324.43
37	Kecamatan Krian	12.79	22.28
38	Kecamatan Prambon	16.77	27.62
39	Kecamatan Porong	42.06	42.01
40	Kecamatan Sedati	12.91	22.95
41	Kecamatan Waru	54.70	54.40
42	Kecamatan Krembung	51.44	51.16
43	Kecamatan Balongbendo	83.12	83.02
44	Kecamatan Taman	42.67	42.52
45	Kecamatan Tulangan	33.39	33.20
46	Kecamatan Jabon	59.86	59.49
47	Kecamatan Sukodono & MPP Sukodono	3.26	4.65
48	Mall Pelayanan Publik	24.64	46.09
49	Puskesmas Sidoarjo	76.27	75.90
50	PASEBAN	113.26	150.69
51	Sidoarjo Command Center	96.82	96.92
52	GOR Delta	38.94	46.98
53	Wifi Alun-alun	0.00	0.00
54	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	28.98	40.28
55	KPU	6.17	9.61

Lanjutan Tabel 4.67

No	OPD/Lokasi FO	JANUARI	
		Max	
		In	Out
56	SMPN 4 Sidoarjo	47.35	86.96
57	SMPN 5 Sidoarjo	7.70	12.24
58	POLRES	120.44	67.31
59	Desa Lebo (Include Kec. Sidoarjo)	5.31	6.43
60	Desa Pabean (Include Kec. Sedati)	2.64	5.03
	Total	3594.57	4337.19
	Rata-rata	59,91	72,29

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Januari tahun 2022, untuk In adalah 3594.57 Mbps dan out 4337.19 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 432,30 dan terkecil berada di Wifi Alun-alun dengan nilai 0,00. Sedangkan untuk Out terbesar berada Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 429,49 dan terkecil untuk Out adalah Wifi Alun-alun dengan nilai Out 0,00.

Tabel 4.68: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Februari 2022

No	OPD/Lokasi FO	FEBRUARI	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	221.32	310.04
2	Sekretariat DPRD	22.67	29.94
3	Inspektorat	165.81	163.36
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.42	100.24
5	Dinas Kesehatan	73.49	126.75
6	Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air	147.68	277.32
7	Dinas PU Perkim & Cipta Karya	36.12	41.8

Lanjutan Tabel 4.68

No	OPD/Lokasi FO	FEBRUARI	
		Max	
		In	Out
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	43.49	79.56
9	Dinas Sosial	102.94	101.83
10	Dinas Tenaga Kerja	66.66	67.18
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	239.4	968.2
12	Dinas Pangan dan Pertanian	30.59	52.34
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	73.37	133.71
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	120.51	113.87
15	Dinas Perhubungan	278.32	314.07
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	239.84	417.26
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	201.24	108.11
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	54.21	53.97
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	32.64	46.32
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.96	119.52
21	Dinas Perikanan	26.77	13.56
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	16.67	25.38
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	80.75	139.94
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.34	0.32
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	219.55	219.2
26	Badan Kepegawaian Daerah	162.18	225.09
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.3	43.52
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.53	79.96
29	Rumah Sakit Umum Daerah	478.47	473.11
30	Kecamatan Sidoarjo	31.37	31.22
31	Kecamatan Candi	59.37	57.29
32	Kecamatan Buduran	63.95	63.54
33	Kecamatan Tanggulangin	48.17	47.89

Lanjutan Tabel 4.68

No	OPD/Lokasi FO	FEBRUARI	
		Max	
		In	Out
34	Kecamatan Wonoayu	40.93	50.44
35	Kecamatan Tarik	0	0
36	Kecamatan Gedangan	100.57	131.66
37	Kecamatan Krian	13.73	25.39
38	Kecamatan Prambon	30.68	54.3
39	Kecamatan Porong	54.59	54.2
40	Kecamatan Sedati	41.31	48.35
41	Kecamatan Waru	65.46	65.78
42	Kecamatan Krembung	89.1	88.42
43	Kecamatan Balongbendo	0	0
44	Kecamatan Taman	63.32	62.64
45	Kecamatan Tulangan	34.04	33.86
46	Kecamatan Jabon	72.06	71.65
47	Kecamatan Sukodono & MPP Sukodono	64.12	63.69
48	Mall Pelayanan Publik	150.67	151.83
49	Puskesmas Sidoarjo	13.72	18.71
50	PASEBAN	124.43	123.51
51	Sidoarjo Command Center	97.16	97.32
52	GOR Delta	56.91	76.19
53	Wifi Alun-alun	0	0
54	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	46.73	57.42
55	KPU	21.19	18.9
56	SMPN 4 Sidoarjo	75.8	142.92
57	SMPN 5 Sidoarjo	13.94	23.88
58	POLRES	58.72	39.88
59	Desa Lebo (Include Kec. Sidoarjo)	14.59	25.55
60	Desa Pabean (Include Kec. Sedati)	20.83	24.99
	Total	4918.7	6596.89
	Rata-rata	81,97833	109,9482

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Februari tahun 2022, untuk In adalah 4918.7 Mbps dan out 6596.89

Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 478,47 dan terkecil berada di Kecamatan Tarik, Kecamatan Balongbendo dan Wifi Alun-alun dengan nilai 0. Sedangkan untuk Out terbesar berada Dinas PMD, P3A, dan KB dengan nilai 968,2 dan terkecil untuk Out adalah Kecamatan Tarik, Kecamatan Balongbendo dan Wifi Alun-alun dengan nilai Out 0.

Tabel 4.69: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan Maret Tahun 2022

No	OPD/Lokasi FO	MARET	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	157.37	229.74
2	Sekretariat DPRD	4.29	4.56
3	Inspektorat	89.88	88.98
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.01	78
5	Dinas Kesehatan	40.79	68.58
6	Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air	73.24	132.75
7	Dinas PU Perkim & Cipta Karya	19.76	34.06
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	38.98	70.8
9	Dinas Sosial	53.35	51.57
10	Dinas Tenaga Kerja	53.79	54.2
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	31.67	40.44
12	Dinas Pangan dan Pertanian	23.9	35.49
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	37.4	64.85
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.23	92.05
15	Dinas Perhubungan	360.73	367.74
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	163.2	257.59
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	26.33	45.19
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25.18	25.07
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	19.45	30.66

Lanjutan Tabel 4.69

No	OPD/Lokasi FO	MARET	
		Max	
		In	Out
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	72.8	108.99
21	Dinas Perikanan	25.94	16.09
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	21.01	31.48
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	47.88	83.02
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.91	1.88
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	72.03	71.78
26	Badan Kepegawaian Daerah	99.2	121.34
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.1	18.95
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.19	40.46
29	Rumah Sakit Umum Daerah	599.56	592.96
30	Kecamatan Sidoarjo	16.44	16.34
31	Kecamatan Candi	45.85	45.1
32	Kecamatan Buduran	29.63	29.46
33	Kecamatan Tanggulangin	40.97	40.89
34	Kecamatan Wonoayu	18.43	18.3
35	Kecamatan Tarik	0	0
36	Kecamatan Gedangan	28.47	28.36
37	Kecamatan Krian	13.76	24.91
38	Kecamatan Prambon	21.31	36.02
39	Kecamatan Porong	44.57	44.32
40	Kecamatan Sedati	35.12	34.82
41	Kecamatan Waru	28.26	28.2
42	Kecamatan Krembung	46.21	45.96
43	Kecamatan Balongbendo	0	0
44	Kecamatan Taman	66.41	65.74
45	Kecamatan Tulangan	19.55	19.36
46	Kecamatan Jabon	65.61	65.26
47	Kecamatan Sukodono & MPP Sukodono	44.42	44, 05
48	Mall Pelayanan Publik	124.77	119.7
49	Puskesmas Sidoarjo	14.19	21.13
50	PASEBAN	73.68	73.28
51	Sidoarjo Command Center	74.91	74.99
52	GOR Delta Sidoarjo	67.28	105.3
53	Wifi Alun-alun	125.3	84.14

Lanjutan Tabel 4.69

No	OPD/Lokasi FO	MARET	
		Max	
		In	Out
54	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	28.52	60.33
55	KPU	16.48	30.21
56	SMPN 4 Sidoarjo	12.6	21.58
57	SMPN 5 Sidoarjo	13.28	23.24
58	POLRES	61.65	48.59
59	Desa Lebo (Include Kec. Sidoarjo)	9.04	11.77
60	Desa Pabean (Include Kec. Sedati)	11.6	11.39
	Total	3540.48	4087.96
	Rata-rata	59,008	69,28746

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret tahun 2022, untuk In adalah 3540.48 Mbps dan out 4087.96 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 599,56 dan terkecil berada di Kecamatan Tarik dan Kecamatan Balongbendo dengan nilai 0. Sedangkan untuk Out terbesar berada Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 592,96 dan terkecil untuk Out adalah Kecamatan Tarik dan Kecamatan Balongbendo dengan nilai Out 0.

Tabel 4.70: Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Bulan April Tahun 2022

No	OPD/Lokasi FO	APRIL	
		Max	
		In	Out
1	Sekretariat Daerah	177.46	259.17
2	Sekretariat DPRD	24.21	37.76
3	Inspektorat	205.16	203.03
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.57	62.01
5	Dinas Kesehatan	55.87	97.08

Lanjutan Tabel 4.70

No	OPD/Lokasi FO	APRIL	
		Max	
		In	Out
6	Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air	61.73	111.41
7	Dinas PU Perkim & Cipta Karya	15.61	28.53
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	46.18	84.36
9	Dinas Sosial	41.84	40.62
10	Dinas Tenaga Kerja	46.68	47.14
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	41.03	64.81
12	Dinas Pangan dan Pertanian	22.12	40.17
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	41.07	61.46
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.49	90.69
15	Dinas Perhubungan	384.64	394.62
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	160.53	275.22
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	110.72	189.74
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	43.86	42.86
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	30.7	32.5
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83.05	115.85
21	Dinas Perikanan	25.8	13.44
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	17.56	31.02
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	50.98	72.82
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.41	0.39
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	104.08	103.78
26	Badan Kepegawaian Daerah	89.47	110.41
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.36	230.57
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.93	173.64
29	Rumah Sakit Umum Daerah	549.64	544.36
30	Kecamatan Sidoarjo	27.33	27.17
31	Kecamatan Candi	44.33	203.09
32	Kecamatan Buduran	30.2	30.04
33	Kecamatan Tanggulangin	43.15	42.93
34	Kecamatan Wonoayu	37.05	36.77
35	Kecamatan Tarik	0	0

Lanjutan Tabel 4.70

No	OPD/Lokasi FO	APRIL	
		Max	
		In	Out
36	Kecamatan Gedangan	21.9	21.82
37	Kecamatan Krian	0	0
38	Kecamatan Prambon	27.96	50.43
39	Kecamatan Porong	40.39	40.24
40	Kecamatan Sedati	31.11	30.91
41	Kecamatan Waru	55.83	55.25
42	Kecamatan Krembung	50.66	50.29
43	Kecamatan Balongbendo	0	0
44	Kecamatan Taman	27.76	27.5
45	Kecamatan Tulangan	32.3	31.9
46	Kecamatan Jabon	62.9	60.57
47	Kecamatan Sukodono & MPP Sukodono	23.86	23.75
48	Mall Pelayanan Publik	123.89	123.91
49	Puskesmas Sidoarjo	0	0
50	PASEBAN	87.67	87.21
51	Sidoarjo Command Center	70.56	70.62
52	GOR Delta Sidoarjo	40.75	56.7
53	Wifi Alun-alun	111.01	73.67
54	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	31.23	54.26
55	KPU	21.31	35.45
56	SMPN 4 Sidoarjo	18.21	33.54
57	SMPN 5 Sidoarjo	11.08	18.63
58	POLRES	37.98	26.71
59	Desa Lebo (Include Kec. Sidoarjo)	6.16	8.98
60	Desa Pabean (Include Kec. Sedati)	7.11	13.75
	Total	3815.44	4895.55
	Rata-rata	63,59067	81,5925

Sumber : Hasil Olah (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan April tahun 2022, untuk In adalah 3540.48 Mbps dan out 4895.55 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Intansi terbesar bandwith untuk In berada di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 549,64 dan terkecil berada di Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo dan Puskesmas Sidoarjo dengan nilai 0. Sedangkan untuk Out terbesar berada Rumah Sakit

Umum Daerah dengan nilai 544,36 dan terkecil untuk Out adalah Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo dan Puskesmas Sidoarjo dengan nilai Out 0.

Tabel 4.71: Rata-Rata Penggunaan Badwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Per April)

Januari-April 2022		
Bulan	In	Out
Januari	3594.57	4337.19
Februari	4918.7	6596.89
Maret	3540.48	4087.96
April	3815.44	4895.55
Total	15869.19	19917.59
Rata-rata	3967.298	4979.398

Sumber : Hasil Olah (2022)

Rata-rata Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Per April) untuk In adalah 3967.298 Mbps. sedangkan Total Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Per April) untuk In adalah 15869.19 Mbps. Penggunaan bandwith paling banyak untuk in adalah pada bulan Februari sebesar 4918.7 Mbps, dan penggunaan terkecil pada bulan Maret sebesar 3540.48 Mbps.

Rata-rata Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Per April) untuk Out adalah 4979.398 Mbps. sedangkan total Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Per April) untuk Out adalah 19917.59 Mbps. Penggunaan bandwith paling banyak untuk out adalah pada bulan Februari sebesar 6596.89 Mbps, dan penggunaan terkecil pada bulan Maret sebesar 4087.96 Mbps.

Tabel 4.72: Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No	OPD/Lokasi FO	In	
		Total	Rata-rata
1	Sekretariat Daerah	740.46	185.12
2	Sekretariat DPRD	71.27	17.82
3	Inspektorat	541.82	135.46
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.37	67.09
5	Dinas Kesehatan	218.15	54.54
6	Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air	345.93	86.48
7	Dinas PU Perkim & Cipta Karya	97.85	24.46
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	152.49	38.12
9	Dinas Sosial	226.32	56.58
10	Dinas Tenaga Kerja	198.91	49.73
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	369.61	92.40
12	Dinas Pangan dan Pertanian	102.46	25.62
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	191.24	47.81
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	367.45	91.86
15	Dinas Perhubungan	1394.51	348.63
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	772.93	193.23
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	367.87	91.97
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	140.83	35.21
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	118.64	29.66
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	297.97	74.49
21	Dinas Perikanan	104.64	26.16
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	75.62	18.91
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	238.77	59.69
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.32	2.83
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	441.01	110.25
26	Badan Kepegawaian Daerah	427.03	106.76
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.56	20.14

Lanjutan Tabel 4.72

No	OPD/Lokasi FO	In	
		Total	Rata-rata
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.58	48.65
29	Rumah Sakit Umum Daerah	2059.97	514.99
30	Kecamatan Sidoarjo	83.14	20.79
31	Kecamatan Candi	171.21	42.80
32	Kecamatan Buduran	157.40	39.35
33	Kecamatan Tanggulangin	183.81	45.95
34	Kecamatan Wonoayu	104.28	26.07
35	Kecamatan Tarik	50.70	12.68
36	Kecamatan Gedangan	357.23	89.31
37	Kecamatan Krian	40.28	10.07
38	Kecamatan Prambon	96.72	24.18
39	Kecamatan Porong	181.61	45.40
40	Kecamatan Sedati	120.45	30.11
41	Kecamatan Waru	204.25	51.06
42	Kecamatan Krembung	237.41	59.35
43	Kecamatan Balongbendo	83.12	20.78
44	Kecamatan Taman	200.16	50.04
45	Kecamatan Tulangan	119.28	29.82
46	Kecamatan Jabon	260.43	65.11
47	Kecamatan Sukodono & MPP Sukodono	135.66	33.92
48	Mall Pelayanan Publik	423.97	105.99
49	Puskesmas Sidoarjo	104.18	26.05
50	PASEBAN	399.04	99.76
51	Sidoarjo Command Center	339.45	84.86
52	GOR Delta	203.88	50.97
53	Wifi Alun-alun	236.31	59.08
54	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	135.46	33.87
55	KPU	65.15	16.29
56	SMPN 4 Sidoarjo	153.96	38.49
57	SMPN 5 Sidoarjo	46.00	11.50
58	POLRES	278.79	69.70
59	Desa Lebo (Include Kec. Sidoarjo)	35.10	8.78
60	Desa Pabean (Include Kec. Sedati)	42.18	10.55
	Jumlah	15869.19	3967.30

Sumber : Hasil Olah (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 hingga bulan April adalah 15869.19 Mbps untuk in dengan rata-rata 3967.30 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, intansi terbesar dalam penggunaan bandwith untuk in berada di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai total 2059.97 Mbps dan rata-rata 514.99 Mbps. Penggunaan bandwith terkecil adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai total 11.32 Mbps dan rata-rata 2.83 Mbps.

Tabel 4.73: Rincian Penggunaan Bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No	OPD/Lokasi FO	Out	
		Total	Rata-rata
1	Sekretariat Daerah	1000.52	250.13
2	Sekretariat DPRD	98.39	24.60
3	Inspektorat	535.46	133.87
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	336.16	84.04
5	Dinas Kesehatan	378.08	94.52
6	Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air	626.43	156.61
7	Dinas PU Perkim & Cipta Karya	142.88	35.72
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	277.48	69.37
9	Dinas Sosial	222.01	55.50
10	Dinas Tenaga Kerja	216.83	54.21
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	1130.97	282.74
12	Dinas Pangan dan Pertanian	169.06	42.27
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	326.34	81.59
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	365.68	91.42
15	Dinas Perhubungan	1445.78	361.45
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1320.18	330.05
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	396.25	99.06
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	139.43	34.86
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)	171.98	43.00

Lanjutan Tabel 4.73

No	OPD/Lokasi FO	Out	
		Total	**Rata-rata**
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	441.50	110.38
21	Dinas Perikanan	59.70	14.93
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	120.55	30.14
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	363.07	90.77
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.22	2.81
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	440.00	110.00
26	Badan Kepegawaian Daerah	579.93	144.98
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	325.18	81.30
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	336.13	84.03
29	Rumah Sakit Umum Daerah	2039.92	509.98
30	Kecamatan Sidoarjo	84.67	21.17
31	Kecamatan Candi	327.09	81.77
32	Kecamatan Buduran	156.43	39.11
33	Kecamatan Tanggulangin	182.80	45.70
34	Kecamatan Wonoayu	110.99	27.75
35	Kecamatan Tarik	50.60	12.65
36	Kecamatan Gedangan	506.27	126.57
37	Kecamatan Krian	72.58	18.15
38	Kecamatan Prambon	168.37	42.09
39	Kecamatan Porong	180.77	45.19
40	Kecamatan Sedati	137.03	34.26
41	Kecamatan Waru	203.63	50.91
42	Kecamatan Krembung	235.83	58.96
43	Kecamatan Balongbendo	83.02	20.76
44	Kecamatan Taman	198.40	49.60
45	Kecamatan Tulangan	118.32	29.58
46	Kecamatan Jabon	256.97	64.24
47	Kecamatan Sukodono & MPP Sukodono	92.09	30.70
48	Mall Pelayanan Publik	441.53	110.38
49	Puskesmas Sidoarjo	115.74	28.94
50	PASEBAN	434.69	108.67
51	Sidoarjo Command Center	339.85	84.96
52	GOR Delta	285.17	71.29

Lanjutan Tabel 4.73

No	OPD/Lokasi FO	Out	
		Total	Rata-rata
53	Wifi Alun-alun	157.81	39.45
54	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	212.29	53.07
55	KPU	94.17	23.54
56	SMPN 4 Sidoarjo	285.00	71.25
57	SMPN 5 Sidoarjo	77.99	19.50
58	POLRES	182.49	45.62
59	Desa Lebo (Include Kec. Sidoarjo)	52.73	13.18
60	Desa Pabean (Include Kec. Sedati)	55.16	13.79
	Total	19917.59	4979.40

Sumber : Hasil Olah (2022)

Penggunaan bandwidth OPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 hingga bulan April adalah 19917.59 Mbps untuk out dengan rata-rata 4979.40 Mbps. Dari 60 instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, intansi terbesar dalam penggunaan bandwith untuk out adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai total 2039.92 Mbps dan rata-rata 509.98 Mbps. Penggunaan bandwith terkecil adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai total 11.22 Mbps dan rata-rata 2.81 Mbps.

4.6 Pemanfaatan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Pemanfaatan internet dengan bandwidth pada masing-masing Dinas yang pemanfaatannya digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti: website dinas, youtube dinas, Instagram dinas, facebook dinas, tiktok dinas, kegiatan kerja dinas, kegiatan pelayanan publik, aplikasi pelayanan publik, wifi publik, streaming video, streaming musik, gaming, google meet, zoom, dan pencarian informasi/berita di koran on-line.

4.6.1 Website Dinas

Hasil dari analisis unsur pertama yaitu sebanyak 90,32% pemanfaatan bandwith dimanfaatkan untuk website dinas. Dan hanya 9,68% yang tidak dimanfaatkan untuk penggunaan website dinas. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

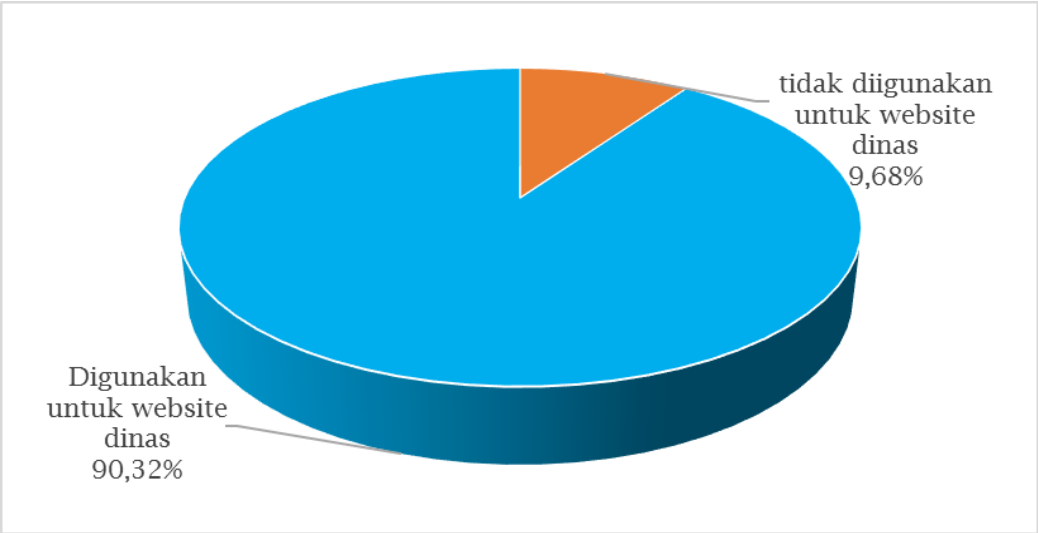

Gambar 4.19: Website Dinas

4.6.2 Youtube Dinas

Hasil dari analisis unsur yang kedua yaitu sebanyak 64,52% pemanfaatan bandwith dimanfaatkan untuk youtube dinas. Dan sebanyak 35,48% yang tidak dimanfaatkan untuk penggunaan youtube dinas. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

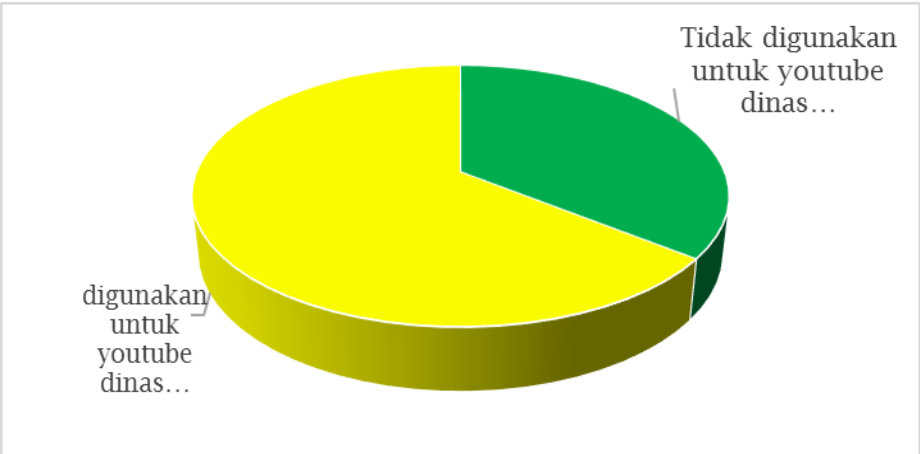

Gambar 4.20: Youtube Dinas

4.6.3 Instagram Dinas

Hasil dari analisis unsur yang ketiga yaitu sebanyak 77,42% pemanfaatan bandwith dimanfaatkan untuk instagram dinas. Dan sebanyak 22,58% tidak dimanfaatkan untuk penggunaan instagram dinas. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

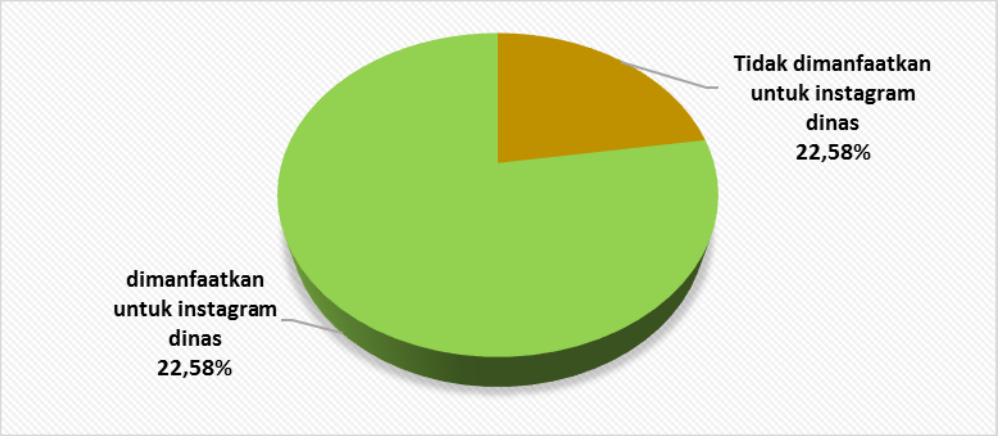

Gambar 4.21: Instagram Dinas

4.6.4 Facebook Dinas

Hasil dari analisis unsur yang keempat yaitu sebanyak 35,48% bandwith yang dimiliki dinas dimanfaatkan untuk facebook dinas. Dan sebanyak 64,52% tidak dimanfaatkan untuk penggunaan facebook dinas. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

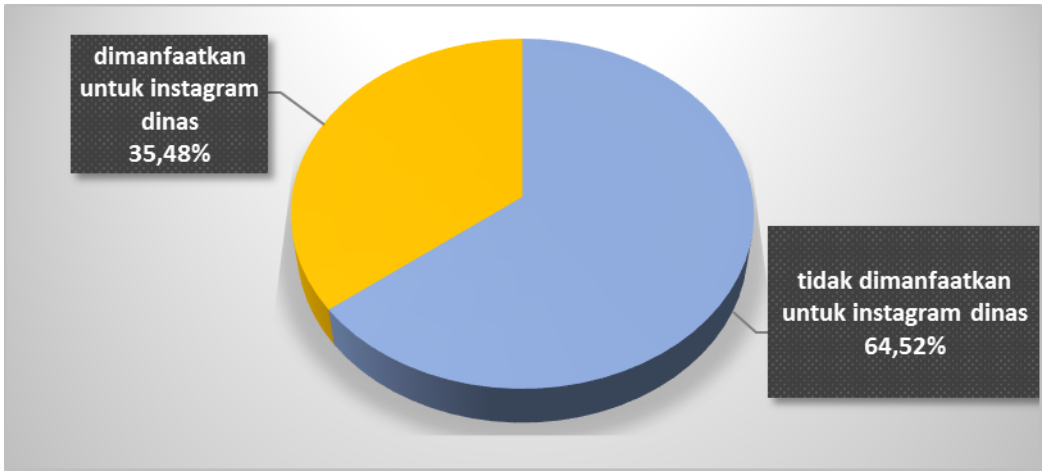

Gambar 4.22: Facebook Dinas

4.6.5 Tiktok Dinas

Hasil dari analisis unsur yang kelima yaitu sebanyak 12,90% bandwith yang dimiliki dinas dimanfaatkan untuk tiktok dinas. Dan sebanyak 87,10% tidak dimanfaatkan untuk penggunaan tiktok dinas. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

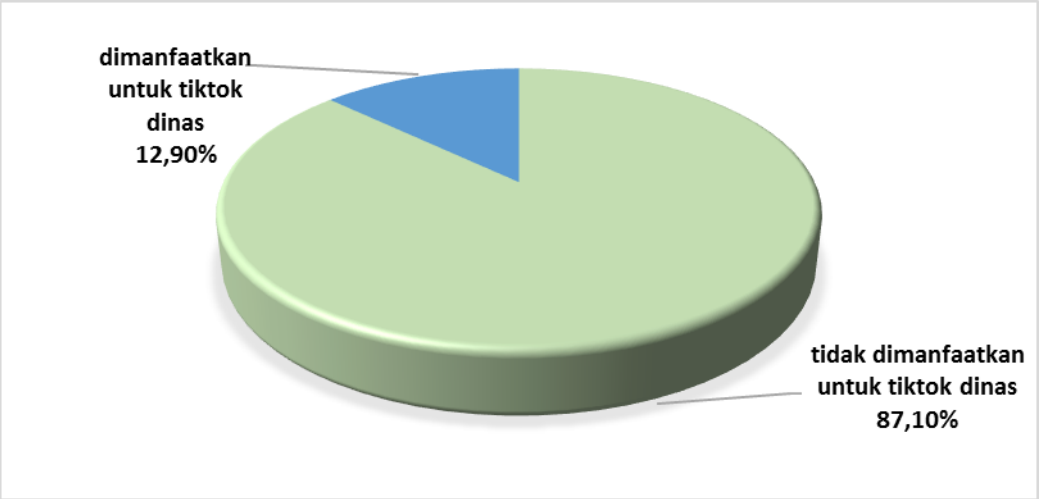

Gambar 4.23: Tiktok Dinas

4.6.6 Kegiatan Kerja Dinas

Hasil dari analisis unsur yang keenam tentang pemanfaatan bandwidth untuk kegiatan kerja, semua OPD memanfaatkan

penggunaan bandwith untuk kegiatan kerja dengan persentase sebesar 100%. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

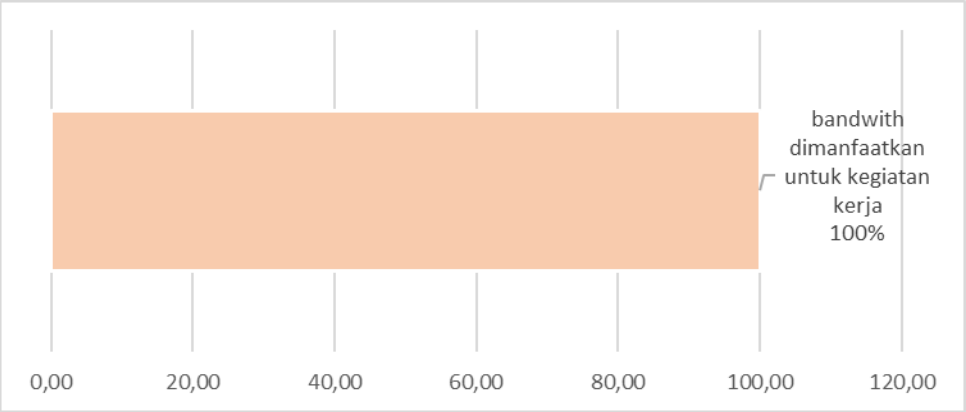

Gambar 4.24: Kegiatan Kerja

4.6.7 Kegiatan Pelayanan Publik

Hasil dari analisis unsur yang ketujuh tentang pemanfaatan bandwidth untuk kegiatan pelayanan, sebanyak 90,32% memanfaatkan bandwidth untuk kegiatan pelayanan dan sisanya dengan persentase sebanyak 9,68% tidak memanfaatkan bandwith untuk kegiatan pelayanan. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

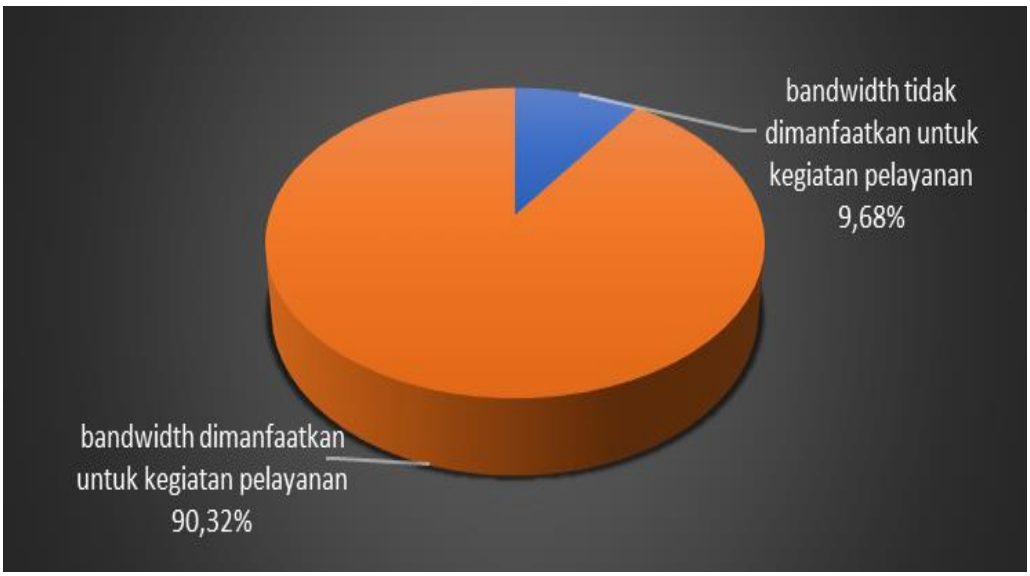

Gambar 4.25: Kegiatan Pelayanan Publik

4.6.8 Aplikasi Pelayanan Publik

Hasil dari analisis unsur yang kedelapan tentang pemanfaatan bandwidth untuk apikasi pelayanan, sebanyak 74,19% memanfaatkan bandwidth untuk aplikasi pelayanan dan dengan persentase sebanyak 25,81% tidak memanfaatkan bandwith untuk aplikasi pelayanan. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar di bawah ini.

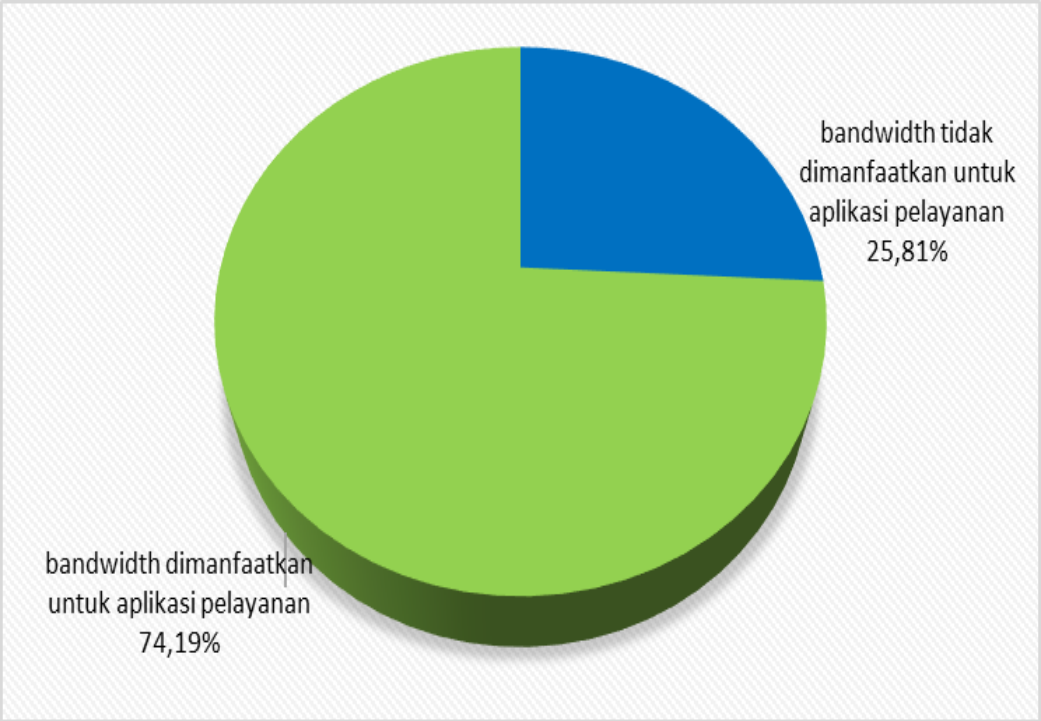

Gambar 4.26: Aplikasi Pelayanan

Tabel 4.74: Aplikasi Pada OPD Kabupaten Sidoarjo

No	OPD	Aplikasi	Aktif/Tidak
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	E-Consulting : fasilitas konsultasi online untuk OPD sampai dingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo	Aktif
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) : aplikasi yang memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk mengurus 16 jenis pelayanan yang diperlukan, mulai tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. 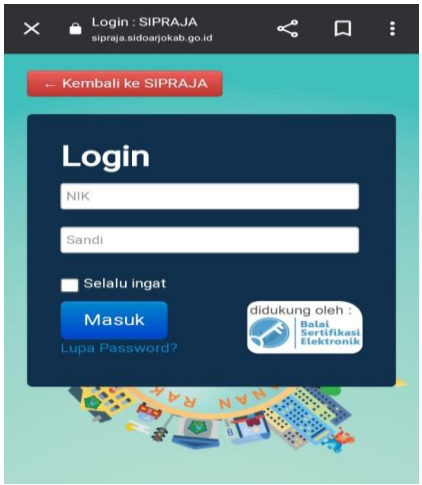	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

3	Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo	Tidak memiliki aplikasi	-
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	CSR : Aplikasi yang memfasilitasi forum pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan perencanaan 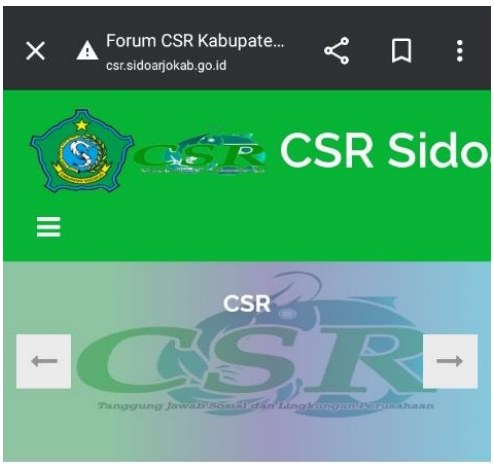	Aktif
5	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	E-Kinerja : Aplikasi berbasis web yang berguna untuk memfasilitasi ASN untuk menyusun dan melaporkan Sasaran Kerja, realisasi, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 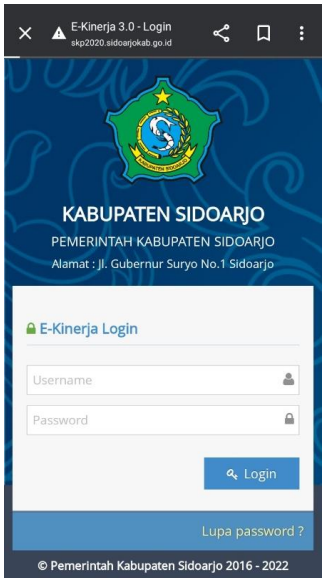	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

6	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo (APDS) : salah satu tool yang disediakan untuk memudahkan masyarakat/WP (Wajib Pajak) atau pengguna dalam melakukan aktivitas terkait Pajak 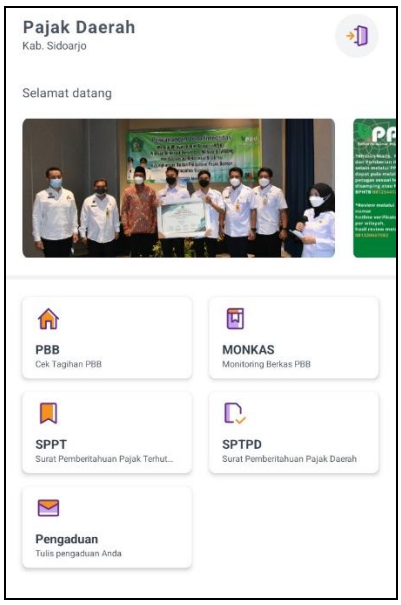	Aktif
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sistem Keuangan Daerah Sidoarjo (SIKSDA) : aplikasi berbasis web yang berguna untuk memberikan informasi keuangan daerah 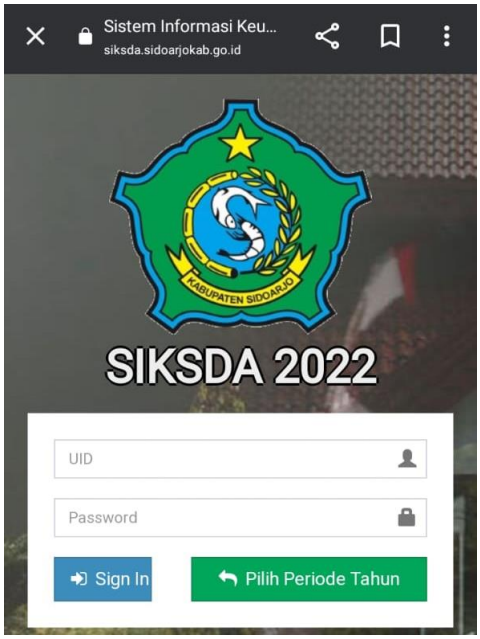	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sistem Rekomendasi Penelitian (SIDALI) : pelayanan perijinan penelitian berbasis online untuk memudahkan masyarakat 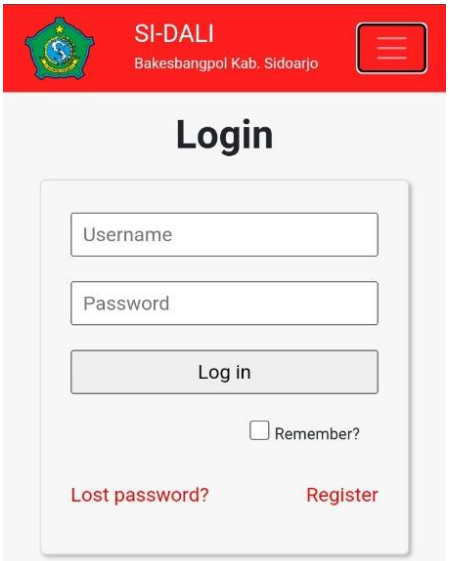	Aktif
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidoarjo Tanggap (SIGAP) : aplikasi yang mendukung percepatan dalam menangani dan mengantisipasi bencana.	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

10	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-Kliping : aplikasi berbasis web untuk mendistribusikan klipingan berita seputar kegiatan di Pemkab Sidoarjo pada para pejabatnya	Aktif
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Plavon Dukcapil (Pelayanan Via Online Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) : aplikasi berbasis internet (web) guna semakin mempermudah dan mempercepat proses pelayanan bidang administrasi kependudukan, baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil yang dapat dilakukan secara mendiri maupun melelui petugas pelayanan	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

		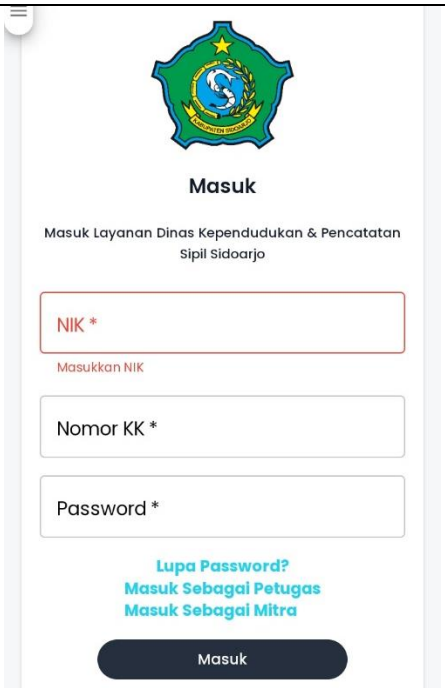	
12	Dinas Tenaga Kerja	Tidak memiliki aplikasi	-
13	Dinas Kesehatan	SIKDA : aplikasi elektronik yang dirancang untuk mampu menjembatani komunikasi data antar komponen dalam sistem kesehatan nasional yang meliputi puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan 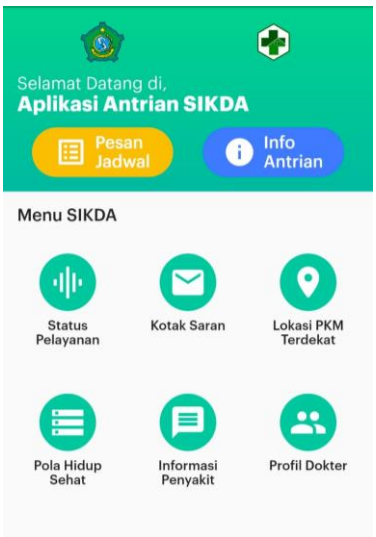	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB	Tidak memiliki aplikasi	-
15	Dinas Sosial	Tidak memiliki aplikasi	-
16	Dinas Perumahan, Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	Tidak memiliki aplikasi	-
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	SIPPADU (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) : sebuah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan perizinan secara elektronik. 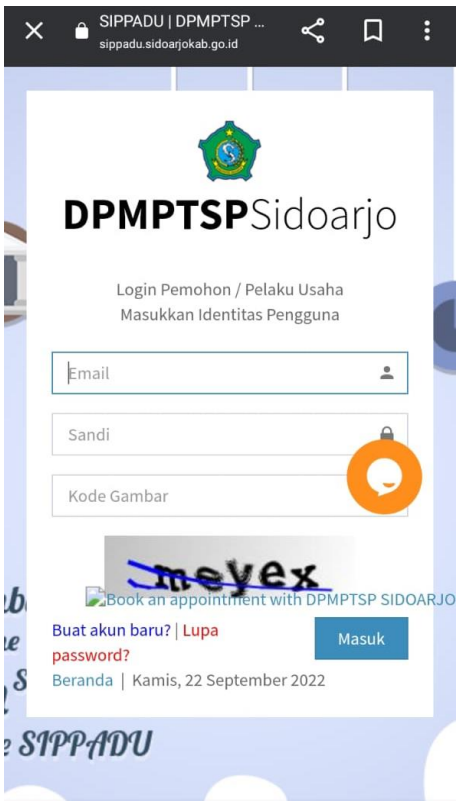	Aktif
18	Dinas Pangan dan Pertanian	SSC : aplikasi yang memudahkan dalam pembuatan SKKH (surat keterangan kesehatan hewan) dan SKKPH (surat keterangan kesehatan	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

		produk hewan) 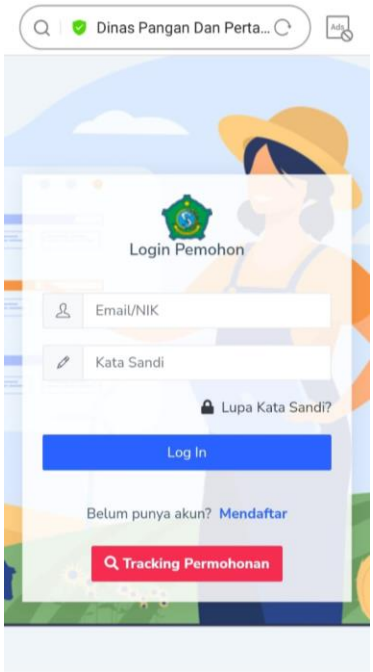 	
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Digital Data Koperasi dan Usaha Mikro (DITAKOPUM) : aplikasi yang berguna untuk memudahkan pelaku koperasi dalam melaporkan keuangan 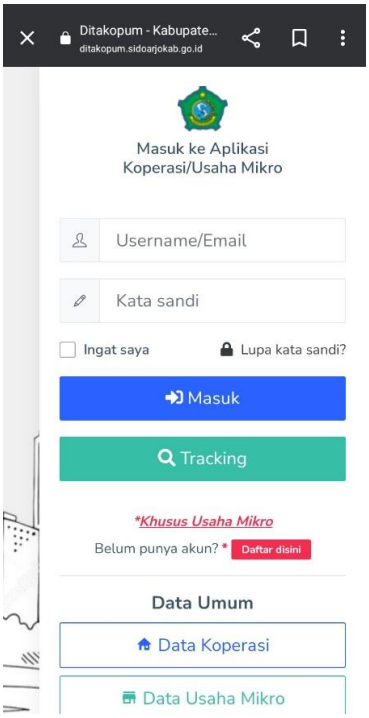 	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Pokok Pendidikan (Dapodik) : suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan.	Aktif
21	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Tidak memiliki aplikasi	-
22	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	M-Bonk : aplikasi yang memfasilitasi warga untuk melaporkan secara langsung jalanan yang rusak di wilayahnya atau tempat lain yang ditemuinya di Kabupaten Sidoarjo	Tidak

Lanjutan Tabel 4.74

23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Informasi Data Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (INDAGO): aplikasi pelayanan bidang perdagangan 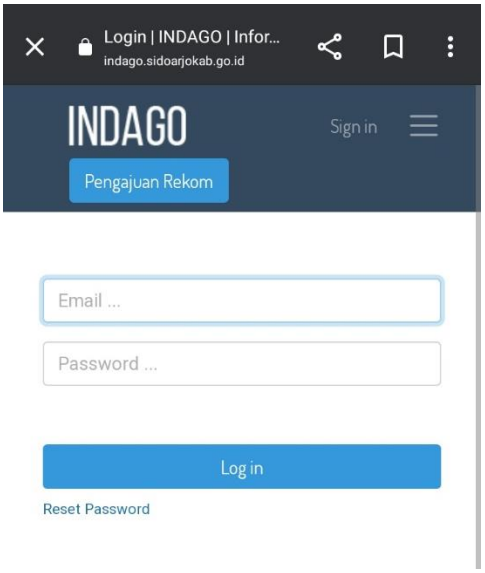	Aktif
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak memiliki aplikasi	-
25	Dinas Perhubungan	E-KIR : layanan pendaftaran pengujian kendaraan berkala secara online	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIDIRA : aplikasi yang digunakan sebagai pengelolaan data *digital library*	Aktif
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	SIKOLING : layanan kepada masyarakat berupa permohonan terkait dokumen lingkungan secara online	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

28	Dinas Perikanan	Tidak memiliki aplikasi	-
29	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) : aplikasi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mengenai pelayanan publik tertentu.	Aktif
30	Rumah Sakit Umum Daerah	SAntri RS (SMS Antrian Rumah Sakit): pengantrian pasien instalasi rawat jalan secara online 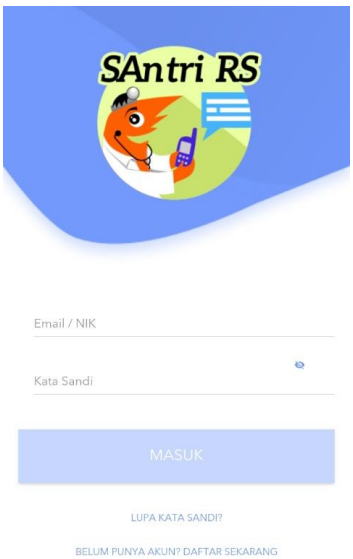	Aktif

Lanjutan Tabel 4.74

31	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta	Tidak memiliki aplikasi	-

Sumber: Hasil Observasi, 2022

4.6.9 Wifi Publik

Hasil dari analisis unsur kesembilan yaitu tentang pemanfaatan bandwidth untuk wifi publik, sebanyak 41,94% memanfaatkan bandwidth untuk wifi publik dan dengan persentase sebanyak 58,06% tidak memanfaatkan bandwith untuk wifi publik. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

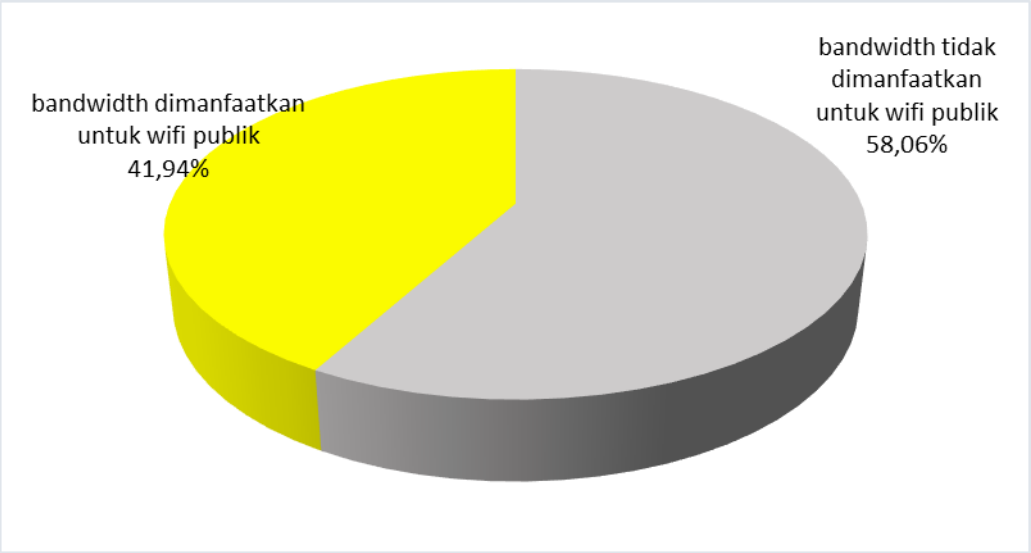

Gambar 4.27: Wifi Publik

4.6.10 Streaming Video

Hasil dari analisis unsur kesepuluh yaitu tentang pemanfaatan bandwidth untuk streaming video, sebanyak 70,97% memanfaatkan bandwidth untuk streaming video dan dengan persentase sebanyak 29,03% tidak memanfaatkan bandwith untuk streaming video. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

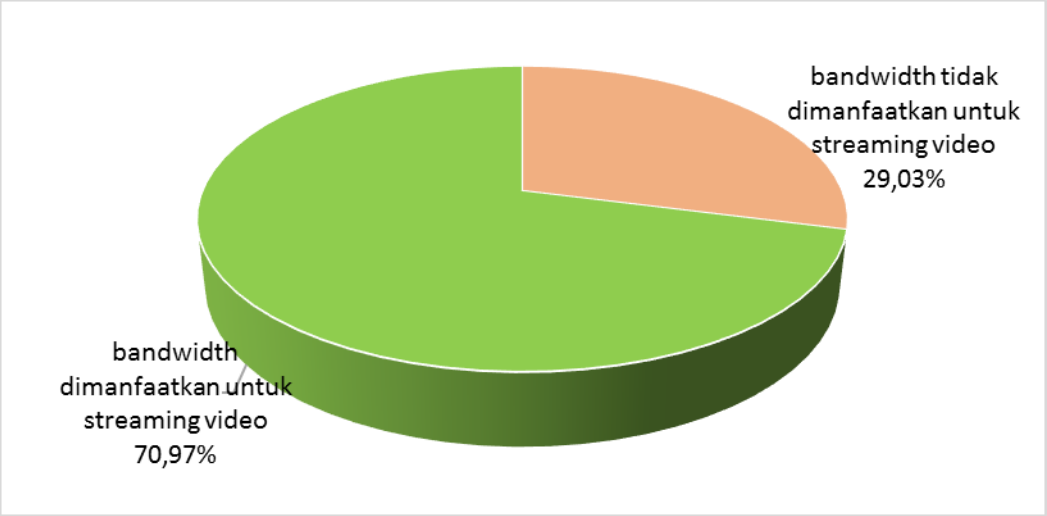

Gambar 4.28: Streaming Video

4.6.11 Streaming Musik

Hasil dari analisis unsur kesebelas yaitu tentang pemanfaatan bandwidth untuk streaming musik. Sebanyak 58,06% memanfaatkan bandwidth untuk streaming musik dan dengan persentase sebanyak 41,94% tidak memanfaatkan bandwith untuk streaming musik. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

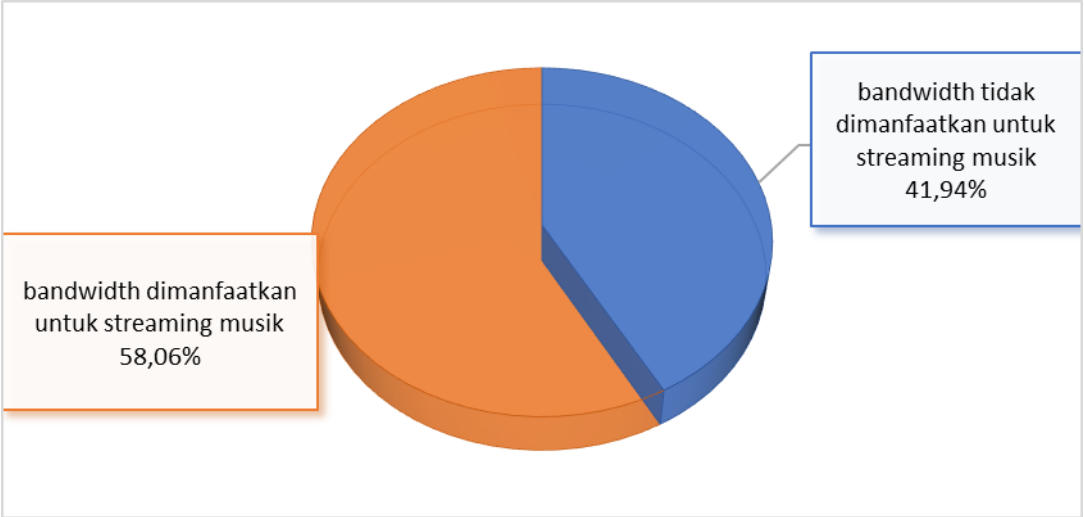

Gambar 4.29: Streaming Musik

4.6.12 Gaming

Hasil dari analisis unsur keduabelas yaitu tentang pemanfaatan bandwidth untuk gaming. Sebanyak 90,32% tidak memanfaatkan bandwidth untuk gaming dan sisanya sebanyak 9,68% memanfaatkan penggunaan bandwidth untuk gaming. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

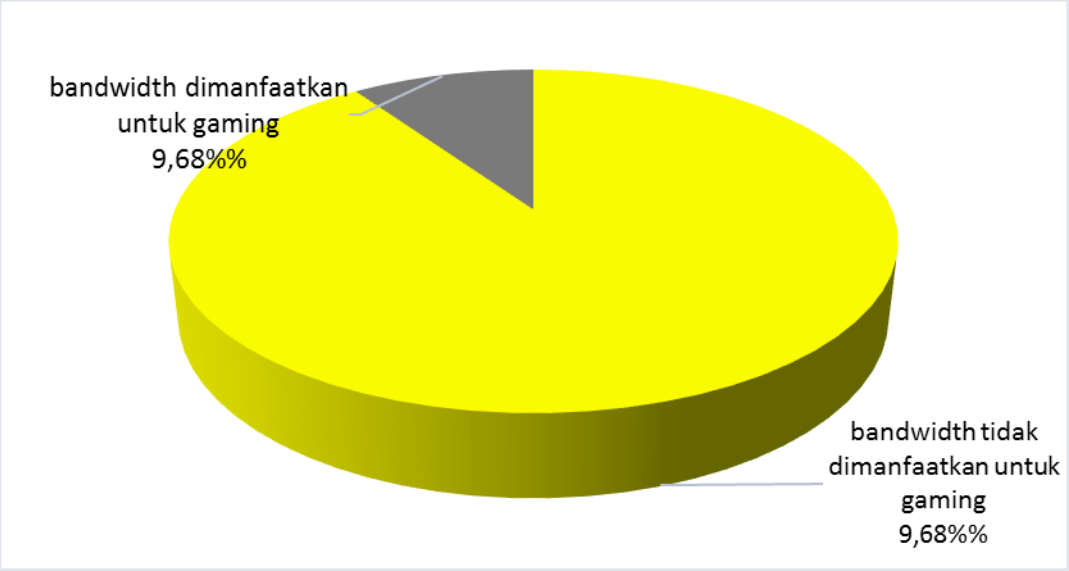

Gambar 4.30: Gaming

4.6.13 Google Meet

Hasil dari analisis unsur ketigabelas yaitu tentang pemanfaatan bandwidth untuk google meet. Sebanyak 80,65% memanfaatkan bandwidth untuk google meet dan sisanya sebanyak 19,35% tidak memanfaatkan penggunaan bandwidth untuk google meet. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

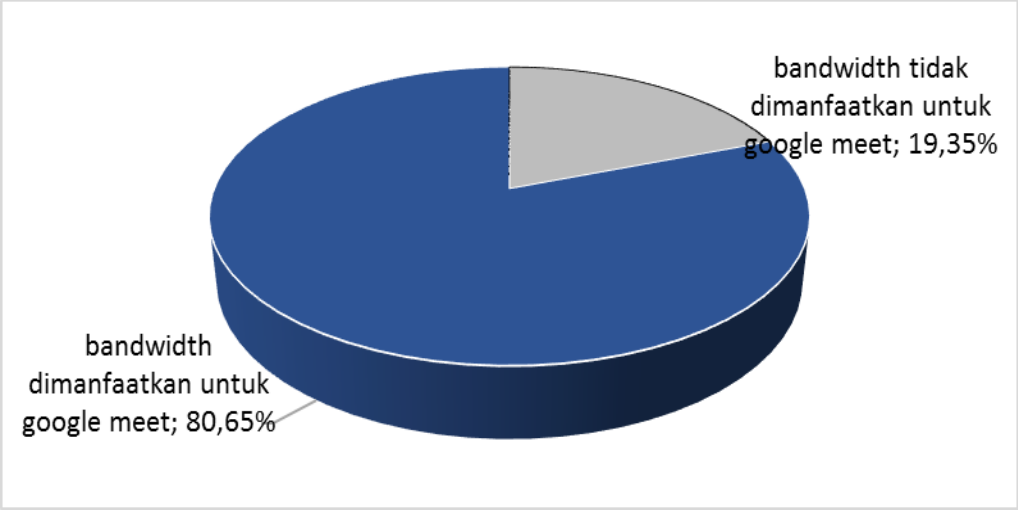

Gambar 4.31: Google Meet

4.6.14 Zoom

Hasil dari analisis unsur keempatbelas yaitu tentang pemanfaatan bandwidth untuk zoom. Seluruh OPD memanfaatkan penggunaan bandwith untuk aplikasi zoom. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

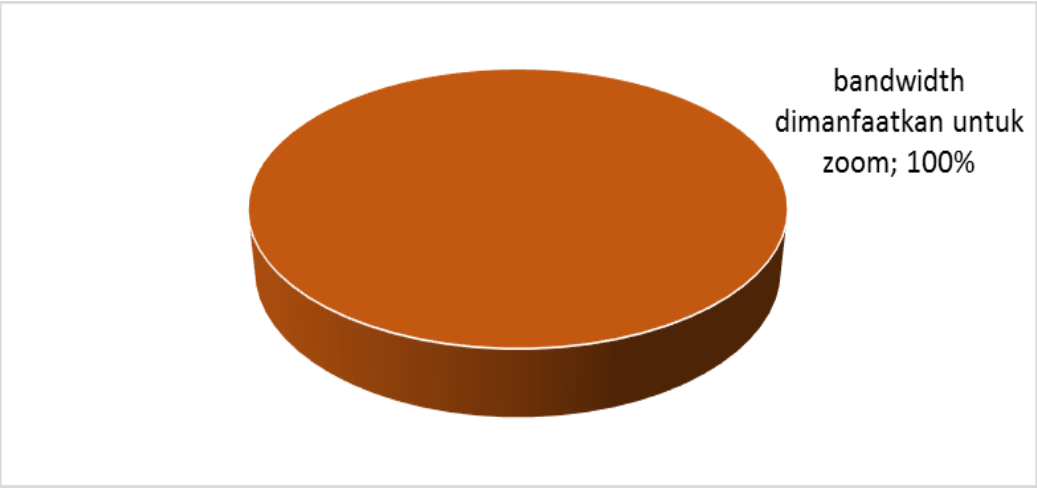

Gambar 4.32: Zoom

4.6.15 Pencarian Informasi/Berita di Koran Online

Hasil dari analisis unsur kelimabelas yaitu tentang pemanfaatan bandwidth untuk koran on-line. Sebanyak 67,74% memanfaatkan bandwidth untuk koran on-line dan sisanya sebanyak 32,26% tidak memanfaatkan penggunaan bandwidth untuk koran on-line. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

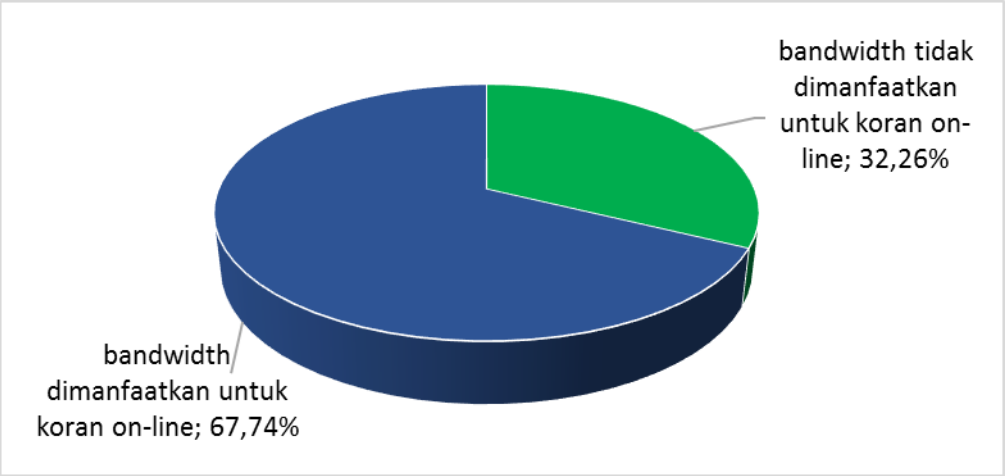

Gambar 4.33: Koran on-line

4.7 Analisis Penggunaan Televisi Sebagai Alat Bantu Kegiatan Kantor Ataupun Pelayanan Publik

Hasil analisis pada masing-masing dinas dalam menggunakan media televisi sebagai alat bantu untuk kegiatan kantor ataupun pelayanan publik. Diketahui sebanyak 70,97% menggunakan televisi sebagai alat bantu kegiatan atau pelayanan publik dan dengan persentase sebanyak 29,03% tidak menggunakan televisi. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

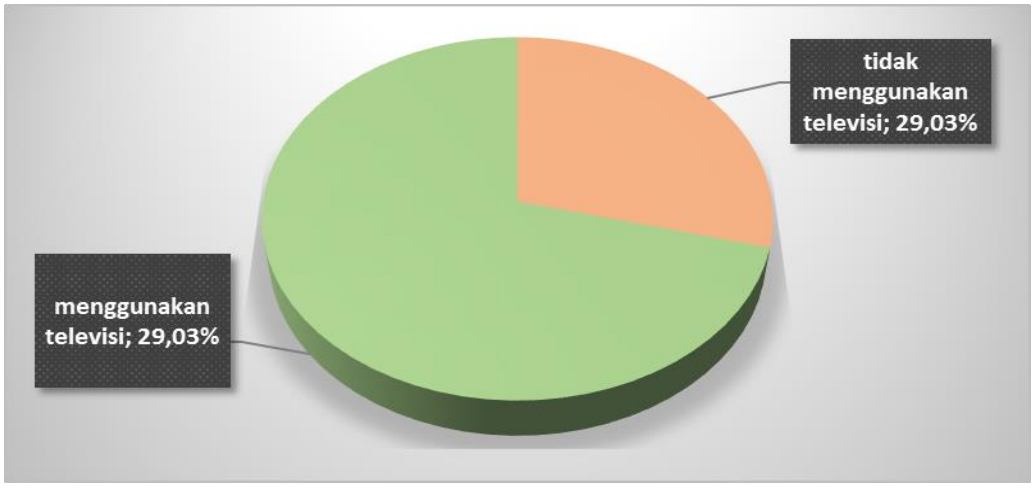

Gambar 4.34: Penggunaan Televisi Sebagai Alat Bantu Kegiatan Atau Pelayanan Publik

4.8 Analisis Penggunaan Radio Sebagai Alat Bantu Kegiatan Kantor Ataupun Pelayanan Publik

Hasil analisis pada masing-masing dinas dalam menggunakan media radio sebagai alat bantu untuk kegiatan kantor ataupun pelayanan publik. Diketahui sebanyak 25,81% menggunakan radio sebagai alat bantu kegiatan atau pelayanan publik dan dengan persentase sebanyak 74,19% tidak menggunakan radio sebagai alat bantu kegiatan atau pelayanan publik. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

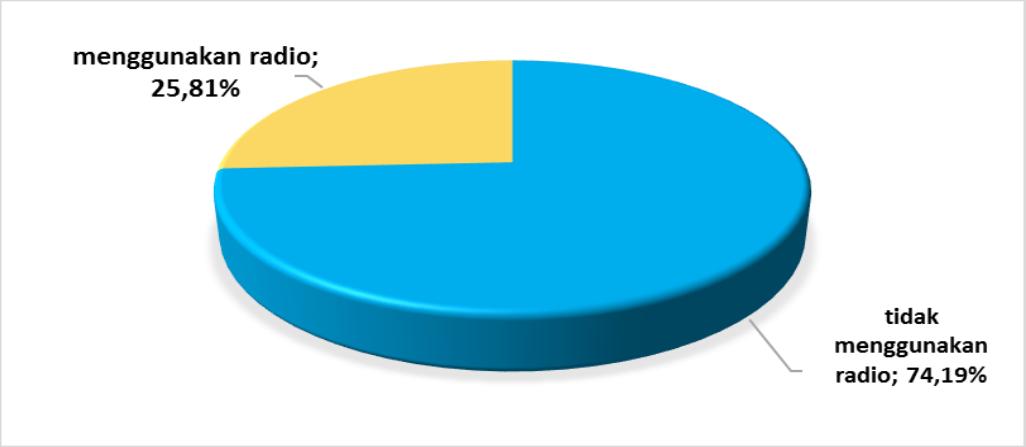

Gambar 4.35: Penggunaan Radio sebagai Alat Bantu Kegiatan atau Pelayanan Publik

4.9 Analisis Penggunaan Telepon Sebagai Alat Bantu Kegiatan Pekerjaan Dan Pelayanan

Hasil analisis pada masing-masing dinas dalam menggunakan media telepon sebagai alat bantu untuk kegiatan pekerjaan dan pelayanan. Diketahui sebanyak 96,77% menggunakan telepon sebagai alat bantu kegiatan pekerjaan dan pelayanan. Sebaliknya dengan persentase sebanyak 3,23% tidak menggunakan telepon sebagai alat bantu kegiatan pekerjaan dan pelayanan. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

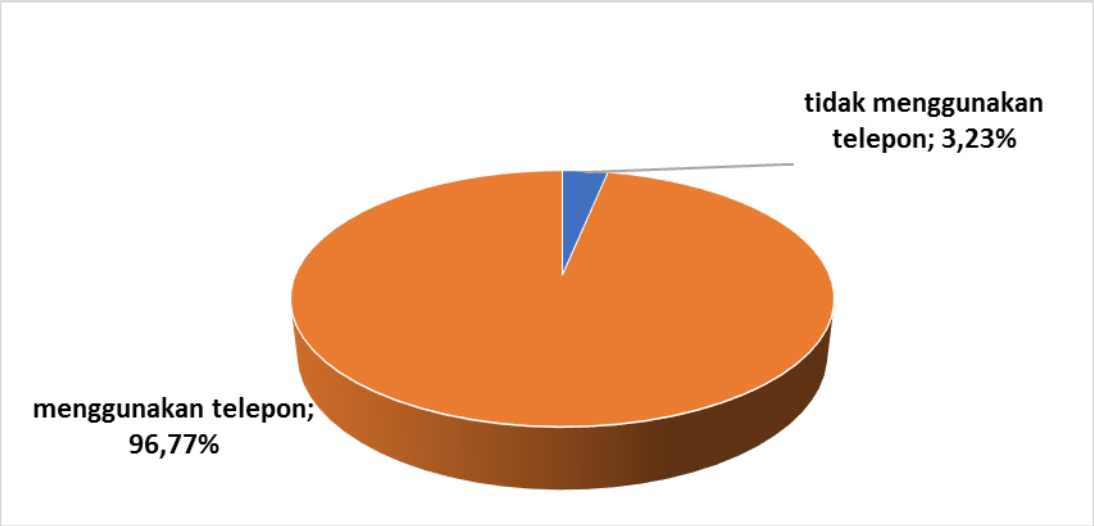

Gambar 4.36: Penggunaan Telepon sebagai Alat Bantu Kegiatan Pekerjaan dan Pelayanan

4.10 Analisis Penggunaan Komputer dan Internet Untuk Kegiatan Pekerjaan dan Pelayanan

Hasil analisis pada masing-masing dinas dalam menggunakan komputer dan internet untuk kegiatan pekerjaan dan pelayanan. Diketahui semua OPD menggunakan komputer dan internet untuk kegiatan pekerjaan dan pelayanan dengan persentase sebesar 100%. Untuk hasil persentase terdapat pada gambar dibawah ini.

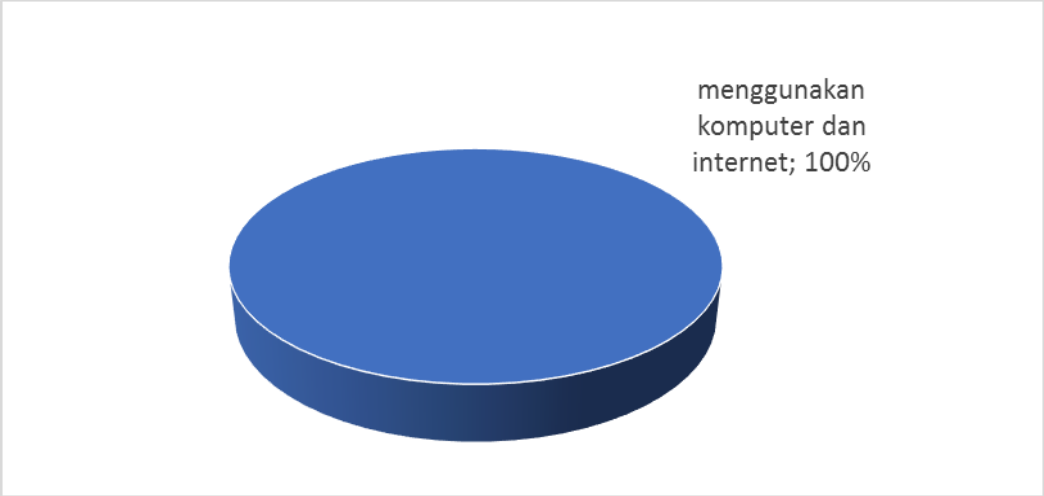

Gambar 4.37: Penggunaan komputer dan internet untuk Kegiatan Pekerjaan dan Pelayanan

4.11 Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet Untuk Kegiatan Kantor

Jumlah komputer yang terkoneksi internet untuk kegiatan kantor ada dua jenis yaitu Personal Computer (PC) dan laptop/netbook/tablet. Jumlah Personal Computer (PC) yang terkoneksi internet untuk kegiatan kantor paling banyak yaitu RSUD Sidoarjo sebesar 538 buah, sedangkan yang paling sedikit yaitu Dinas Tenaga Kerja sejumlah 8 buah. Sedangkan jumlah laptop yang terkoneksi internet untuk kegiatan kantor paling banyak yaitu RSUD Sidoarjo sebanyak 127 buah, sedangkan yang paling sedikit yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika karena tidak ada laptop yang terkoneksi internet untuk kegiatan kantor. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.75.

Tabel 4.75: Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet Untuk Kegiatan Kantor

No	NAMA OPD	PC	LAPTOP
1	Badan Kepegawaian Daerah	180	10
2	Dinas Kesehatan	124	7
3	Satuan Polisi Pamong Praja	13	8
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25	17
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45	25
6	Sekretariat Daerah	70	30
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	12	25
8	Dinas Perikanan	9	27
9	Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	30	40
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21	10
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60	25
12	Dinas Sosial	15	21
13	Dinas Perhubungan	40	82
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40	27
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	25
16	RSUD Sidoarjo	538	127
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	60	0
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97	82
19	Inspektorat Daerah	13	60
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40	20
21	Sekretariat DPRD	50	25
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	16	10

Lanjutan Tabel 4.75

No	NAMA OPD	PC	LAPTOP
23	PDAM Delta Tirta	194	36
24	Dinas Pangan dan Pertanian	102	99
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22	15
26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	68	17
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34	14
28	Dinas Tenaga Kerja	8	20
29	Badan Pelayanan Pajak Daerah	87	17
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	95	24
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	38	55

Sumber : Hasil Olah (2022)

4.12 Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet untuk Kegiatan Pelayanan Publik

Jumlah komputer yang terkoneksi internet untuk kegiatan Pelayanan Publik ada dua jenis yaitu Personal Computer (PC) dan laptop/netbook/tablet. Jumlah Personal Computer (PC) yang terkoneksi internet untuk kegiatan kantor paling banyak yaitu RSUD Sidoarjo sebesar 538 buah, sedangkan yang paling sedikit yaitu Dinas Tenaga Kerja sejumlah 8 buah. Sedangkan jumlah laptop yang terkoneksi internet untuk kegiatan kantor paling banyak yaitu RSUD Sidoarjo sebanyak 127 buah, sedangkan yang paling sedikit yaitu Satpol PP, Disporapar, Dinas Kominfo, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air karena tidak ada laptop yang terkoneksi internet untuk kegiatan kantor. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.76.

Tabel 4.76: Jumlah Komputer Yang Terkoneksi Internet Untuk Kegiatan Pelayanan Publik

No	Nama OPD	PC Pelayanan Publik	Laptop Pelayanan
1	Badan Kepegawaian Daerah	180	10
2	Dinas Kesehatan	3	4
3	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1	0
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25	17
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45	25
6	Sekretariat Daerah	70	30
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	3	0
8	Dinas Perikanan	9	27
9	Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	3	0
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	0	0
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25	10
12	Dinas Sosial	1	1
13	Dinas Perhubungan	40	82
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40	27
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	15
16	RSUD Sidoarjo	538	127
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	0
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	4
19	Inspektorat Daerah	13	60
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	2
21	Sekretariat DPRD	1	1
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	16	10

Lanjutan Tabel 4.76

No	Nama OPD	PC Pelayanan Publik	Laptop Pelayanan
	Anak dan Keluarga Berencana		
23	PDAM Delta Tirta	50	7
24	Dinas Pangan dan Pertanian	2	0
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	2
26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	0	0
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30	14
28	Dinas Tenaga Kerja	8	20
29	Badan Pelayanan Pajak Daerah	20	5
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	95	24
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	10	20

Sumber : Hasil Olah (2022)

4.13 Jumlah Laptop Yang Terkoneksi Internet

Laptop yang terkoneksi internet dengan jumlah tertinggi yaitu PDAM Delta Tirta sejumlah 194 buah, sedangkan jumlah terendah yaitu Dinas Kesehatan sebanyak 7 buah. Laptop yang tidak terkoneksi internet dengan jumlah tertinggi yaitu Inspektorat Daerah sebesar 60 buah. Sedangkan jumlah terendah yaitu sebanyak 26 dinas memiliki 0 buah laptop yang tidak terkoneksi, artinya pada 26 dinas tersebut tidak ada laptop yang tidak terkoneksi internet. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.77.

Tabel 4.77: Jumlah Laptop Yang Terkoneksi Internet

No	Nama OPD	Laptop Terkoneksi	Laptop Tidak Terkoneksi
1	Badan Kepegawaian Daerah	10	4
2	Dinas Kesehatan	7	0
3	Satuan Polisi Pamong Praja	8	0
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	17	0
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25	0
6	Sekretariat Daerah	24	0
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	37	0
8	Dinas Perikanan	27	0
9	Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	65	5
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	0
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	0
12	Dinas Sosial	21	0
13	Dinas Perhubungan	82	0
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45	0
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40	0
16	RSUD Sidoarjo	177	0
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	70	0
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86	0
19	Inspektorat Daerah	13	60
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40	0
21	Sekretariat DPRD	13	0

Lanjutan Tabel 4.77

No	Nama OPD	Laptop Terkoneksi	Laptop Tidak Terkoneksi
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	26	0
23	PDAM Delta Tirta	194	36
24	Dinas Pangan dan Pertanian	35	0
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22	0
26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	17	0
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	0
28	Dinas Tenaga Kerja	20	0
29	Badan Pelayanan Pajak Daerah	13	1
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	144	0
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	50	0

Sumber : Hasil Olah (2022)

4.14 Jumlah Handphone Terkoneksi Internet

Jumlah Handphone yang terkoneksi internet dengan jumlah tertinggi yaitu RSUD Sidoarjo sejumlah 586 buah, sedangkan jumlah terendah yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 0 buah. HP yang tidak terkoneksi internet dengan jumlah tertinggi yaitu Sekretariat Daerah sebesar 175 buah. Sedangkan jumlah terendah yaitu sebanyak 28 dinas memiliki 0 buah HP yang tidak terkoneksi, artinya pada 28 dinas tersebut tidak ada HP yang tidak terkoneksi internet. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.78.

Tabel 4.78: Jumlah Handphone Terkoneksi Internet

No	Nama OPD	HP Terkoneksi	HP Tidak Terkoneksi
1	Badan Kepegawaian Daerah	65	0
2	Dinas Kesehatan	34	0
3	Satuan Polisi Pamong Praja	42	0
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	42	0
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50	0
6	Sekretariat Daerah	0	175
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	31	0
8	Dinas Perikanan	45	0
9	Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	65	5
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45	0
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	73	0
12	Dinas Sosial	66	0
13	Dinas Perhubungan	132	0
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85	15
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92	0
16	RSUD Sidoarjo	586	0
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	50	0
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	134	0
19	Inspektorat Daerah	90	0
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40	0
21	Sekretariat DPRD	112	0
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0	0
23	PDAM Delta Tirta		
24	Dinas Pangan dan Pertanian	100	0
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33	0

Lanjutan Tabel 4.78

No	Nama OPD	HP Terkoneksi	HP Tidak Terkoneksi
26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	111	0
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	69	0
28	Dinas Tenaga Kerja	47	0
29	Badan Pelayanan Pajak Daerah	37	0
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	0
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	150	0

Sumber : Hasil Olah (2022)

4.15 Kebutuhan Bandwidth

Hasil analisis untuk kebutuhan bandwidth pada masing-masing OPD menunjukkan bahwa kebutuhan bandwidth di OPD selama ini mencukupi ditunjukkan dengan persentase sebesar 51,61% dan sisanya dengan persentase 48,39% menunjukkan bahwa kebutuhan bandwidth selama ini tidak mencukupi. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada Gambar 4.38.

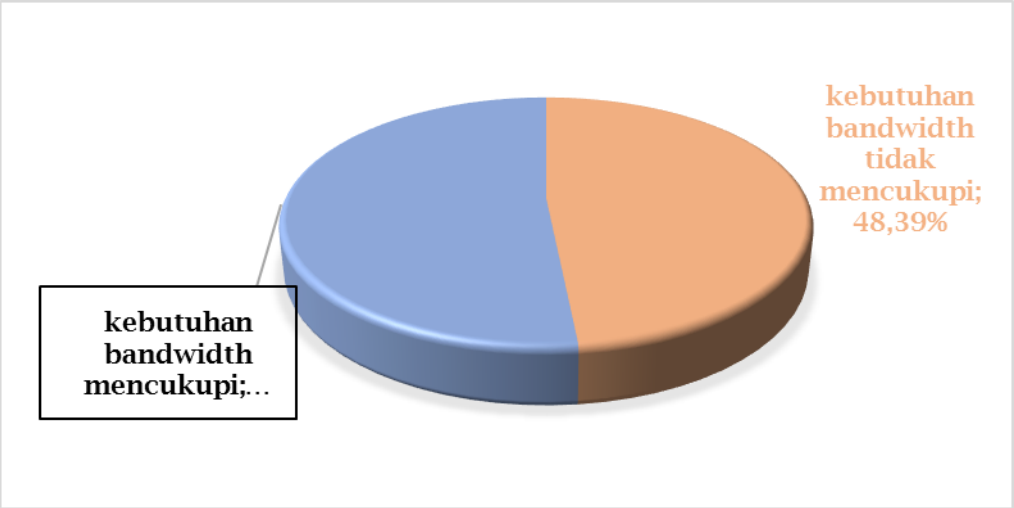

Gambar 4.38: Kebutuhan Bandwidth

4.16 Penggunaan Internet OPD untuk Membangun Masyarakat Informasi

Hasil analisis penggunaan internet OPD untuk membangun masyarakat informasi di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebanyak 96,77% dan sisanya dengan persentase 3,23% internet OPD tidak membangun masyarakat informasi. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut.

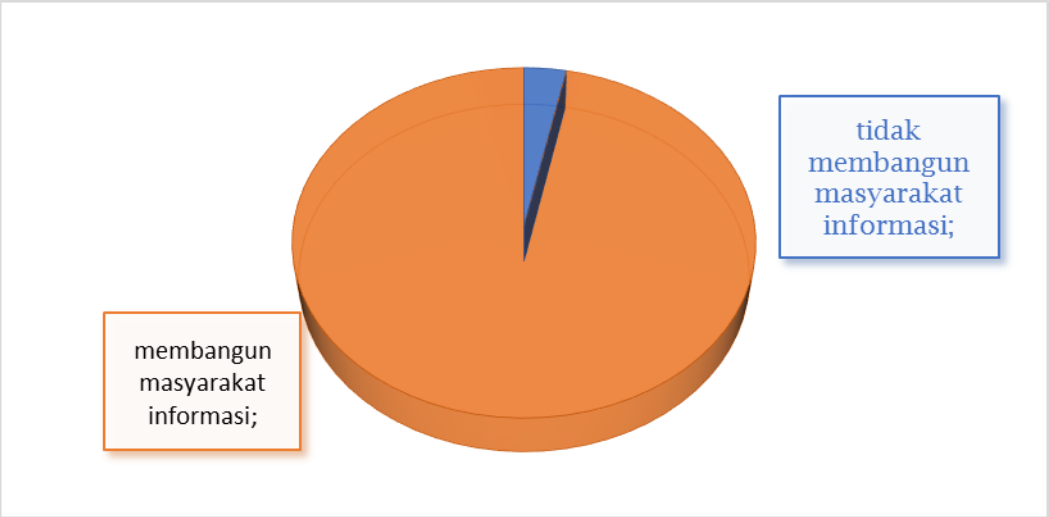

Gambar 4.39: Membangun Masyarakat Informasi

4.17 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Iklim Investasi dan Kompetisi

Hasil analisis penggunaan internet OPD untuk meningkatkan iklim investasi dan kompetisi di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebanyak 70,97% dan sisanya dengan persentase 29,03% internet OPD tidak meningkatkan iklim investasi dan kompetisi. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut.

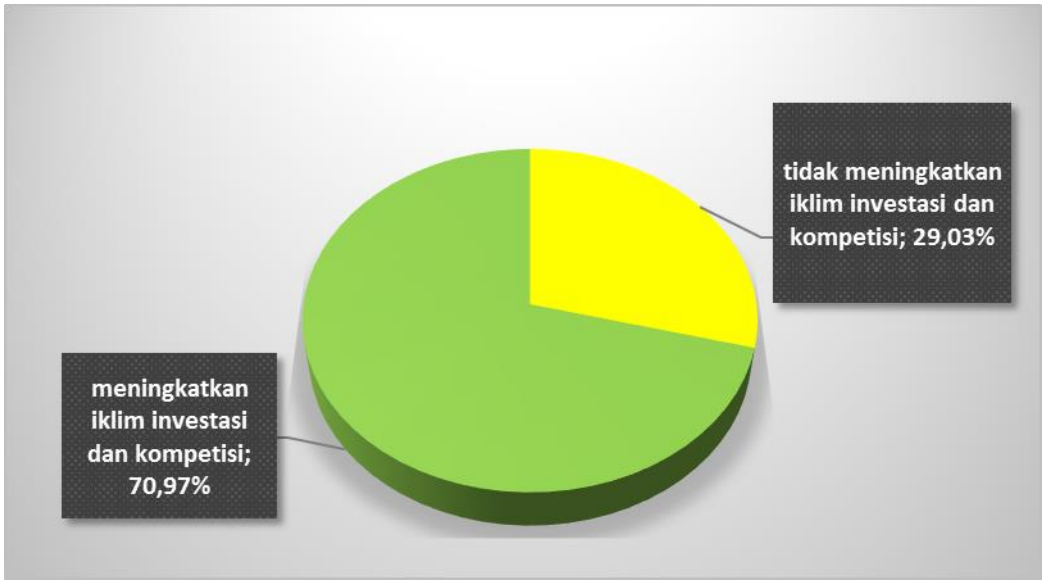

Gambar 4.40: Meningkatkan Iklim Investasi dan Kompetisi

4.18 Penggunaan Internet OPD untuk Transparansi, Akuntabilitas dan Good Governance

Hasil analisis penggunaan internet OPD untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan good governance di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebesar 100% yang artinya penggunaan internet sangat berpengaruh untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada Gambar 4.41.

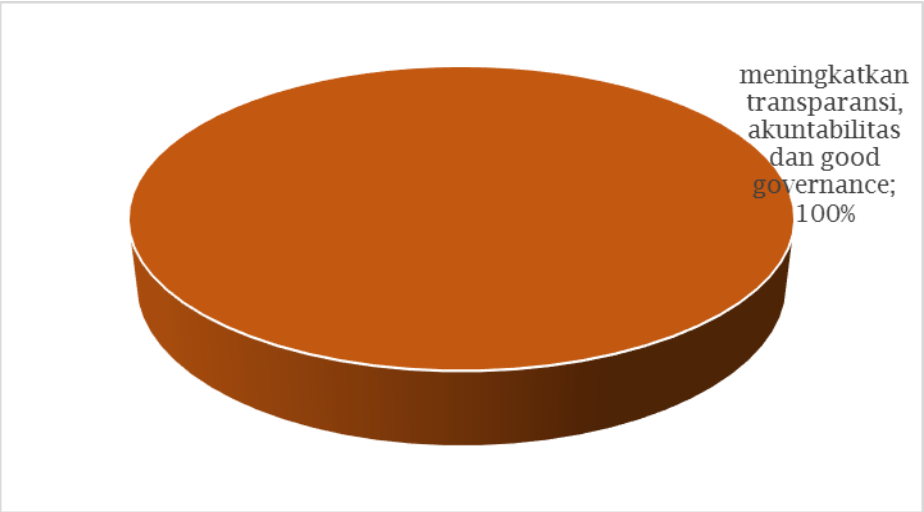

Gambar 4.41: Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance

4.19 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis penggunaan internet OPD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebesar 96,77% dan sisanya dengan persentase 3,23% internet OPD tidak meningkatkan partisipasi masyarakat di Sidoarjo. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada Gambar 4.42.

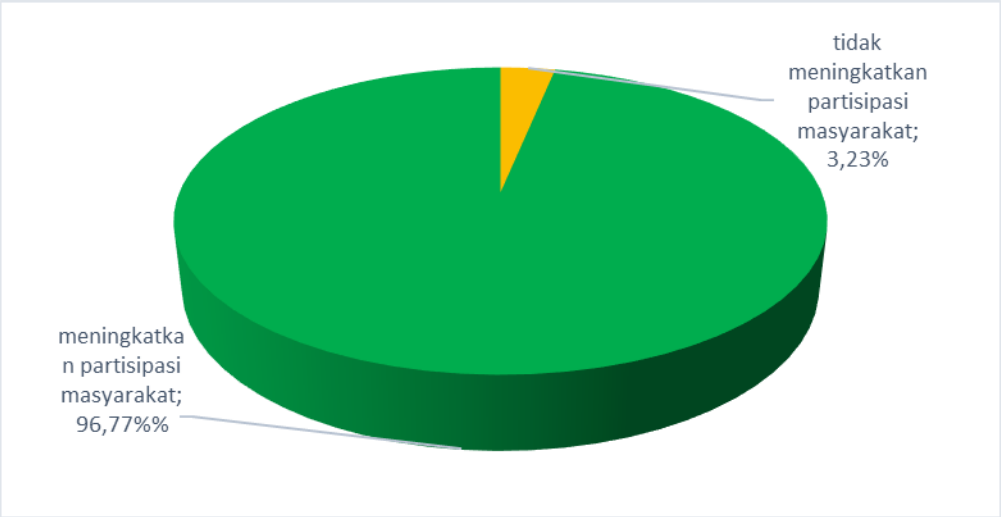

Gambar 4.42: Partisipasi Masyarakat

4.20 Penggunaan Internet OPD untuk Pembuatan Kebijakan dan Manajemen Pengetahuan

Hasil analisis penggunaan internet OPD digunakan untuk pembuatan kebijakan dan manajemen pengetahuan di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebesar 93,55% dan sisanya dengan persentase 6,45% internet OPD tidak digunakan untuk pembuatan kebijakan dan manajemen pengetahuan di Sidoarjo. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut.

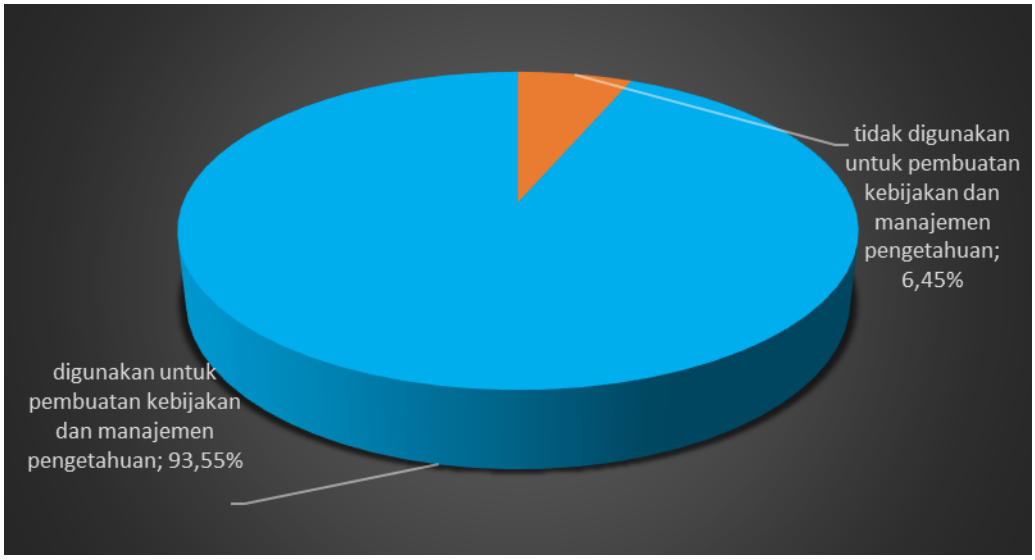

Gambar 4.43: Pembuatan Kebijakan dan Manajemen Pengetahuan

4.21 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Informasi Publik

Hasil analisis penggunaan internet OPD digunakan untuk meningkatkan informasi publik di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebesar 100% yang artinya internet OPD sangat berguna untuk meningkatkan informasi publik. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut.

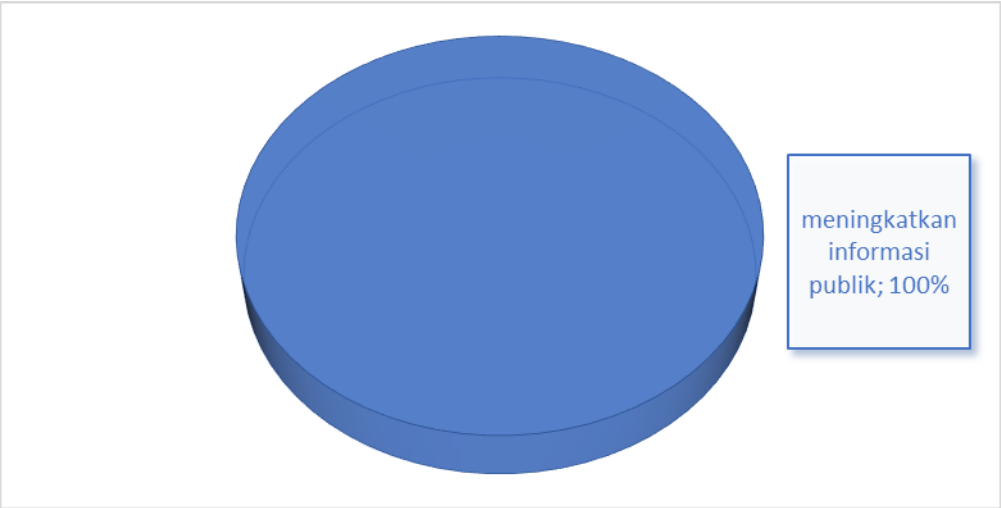

Gambar 4.44: Meningkatkan Informasi Publik

4.22 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Hasil analisis penggunaan internet OPD digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebesar 100% yang artinya penggunaan internet OPD sangat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di Sidoarjo. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut.

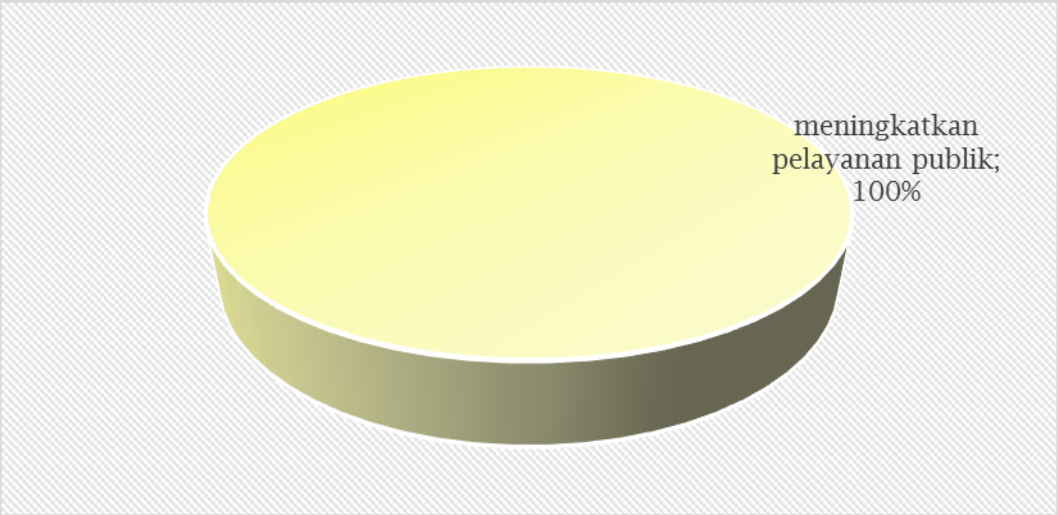

Gambar 4.45: Meningkatkan Pelayanan Publik

4.23 Penggunaan Internet OPD untuk Meningkatkan Efisiensi dan Manajemen Sumber

Hasil analisis penggunaan internet OPD digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan menajemen sumber di Sidoarjo ditunjukkan dengan persentase sebesar 100% yang artinya penggunaan internet OPD sangat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen sumber di Sidoarjo. Untuk hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut.

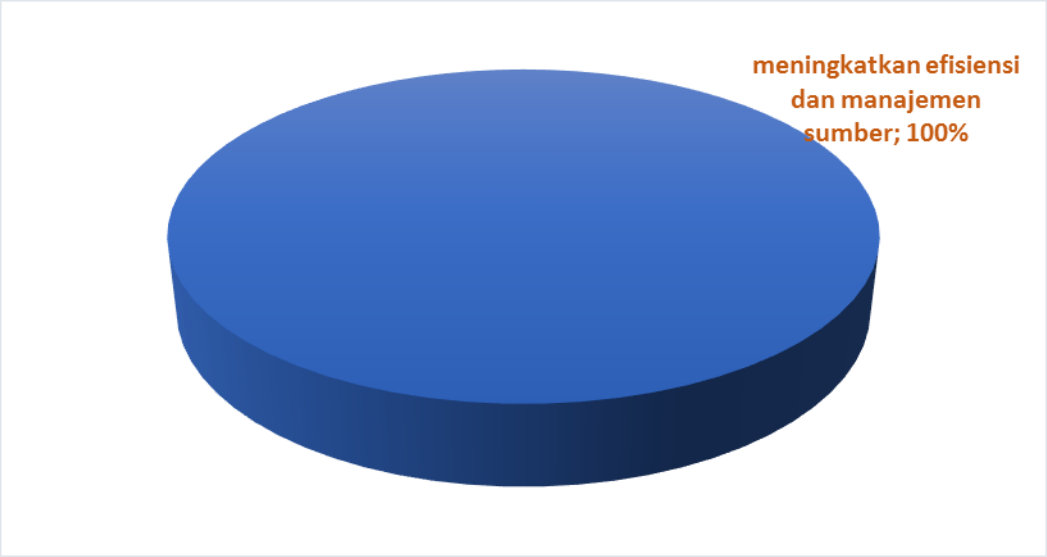

Gambar 4.46: Meningkatkan Efisiensi dan Manajemen Sumber

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey Pengukuran Pemanfaatan Internet Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 yang tersebar di 31 instansi, sebagai berikut:

1. Dari 31 OPD di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki bagian pengelolaan sistem informasi dan jaringan internet sebanyak 20 OPD (64,52%). Jumlah staf pengelola sistem informasi dan jaringan internet yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 76 (77,55%) dan perempuan sebanyak 22 (22,45%).
2. Infrastuktur jaringan OPD yang difasilitasi oleh Diskominfo diantaranya menara jaringan telekomunikasi (61,29%), pusat data dan pemulihan data (41,94%), jaringan intranet antar-OPD (58,06%), internet protokol public (61,29%), routing (70,97%), sistem pengamanan informasi (61,29%), bandwidth internet (96,77%), server sistem informasi (58,06%), dan repository data/informasi (45,16%).
3. Jenis bandwidth OPD yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo yaitu fiber optic (93,55%), fixed narrowband (6,45%), fixed broadband (9,68%), dan mobile broadband (3,23%). Bandwith yang disediakan dan digunakan di 51 OPD ada tiga macam, yaitu bandwidth lokal, bandwidth internet, dan internet lainnya. Jika terdapat kekurangan bandwith, masing-masing OPD menyediakan anggaran untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan.
4. Bandwith yang disediakan dan dimanfaatkan oleh OPD diantaranya website dinas (90,32%), youtube dinas (64,52%), Instagram dinas (77,42%), facebook dinas (35,48%), tiktok dinas (12,90%), kegiatan kerja dinas (100%), kegiatan pelayanan publik

(90,32%), aplikasi pelayanan publik (74,19%), wifi publik (41,94%), streaming video (70,97%), streaming musik (58,06%), gaming (9,68%), google meet (80,65%), zoom (100%), dan pencarian informasi/berita di koran on-line (67,74%).

5. Sebanyak 83,87% OPD di Kabupaten Sidoarjo mengalami gangguan jaringan internet. Penyebab terjadinya gangguan karena koneksi jaringan terputus dan kurang lancer (42,31%), gangguan dari provider (38,46%), dan kabel internet terputus (19,23%).

5.2 Rekomendasi

1. Diperlukan adanya peningkatan pelatihan dan pendampingan terhadap tenaga pranata komputer dalam meningkatkan kompetensi ilmu teknologi informatika.
2. Diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada masing-masing OPD untuk membangun pelayanan publik yang berbasis teknologi informatika.
3. Beberapa kendala dalam pengumpulan data di lapangan diantaranya belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai khususnya pada bidang teknologi informatika sebagai tenaga ahli di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung penggunaan internet di Kabupaten Sidoarjo.
4. Diperlukan adanya penguatan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pemanfaatan internet dalam pelayanan publik.
5. Perlu adanya penyusunan Master Plan SPBE dan keamanan SPBE di Kabupaten Sidoarjo.

6. Kajian terhadap pemanfaatan internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo khususnya sistem keamanan informasi harus dilakukan secara berkala mengingat adanya hacker yang sering merusak sistem informasi pemerintah.
7. Pengukuran Pemanfaatan Internet Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis *smart city* di Kabupaten Sidoarjo.

REFERENSI

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Coates, B.E. (2001) . Smart Government Online, Not Inline. Jounar of The public manager, Vol. Winter.

Cohen, B. (2012, 9 19). What Exactly Is A Smart City? Retrieved from CO.DESIGN: https://www.fastcodesign.com/1680538/what-exactly-is-a-smart-city

Eggers, W.D . 2005. Government 2.0: Using Technology to Improve Education. Cut Red Tape, Reduce Gridlock, and Enhance Democracy, Rowman & Littlefield, Plymouth, UK.

Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Giffinger, R., 2007. Smart cities – Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, pp. 1-25.

Haag dan Keen. 1996 .Information Technology: Tomorrow's Advantage Today. Hammond: Mcgraw-Hill College.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2005. Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek 2005-2009).

Laudon, Kenneth C. & Jane Price (2004). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 10th edition. Pearson Education, Inc., New Jersey

Martin, E.W., Brown, C.V., Dehayes, D.W., Hoffer, J.A., dan J.A. Perkins. 2005. Customer Relationship Management: Managing Information Technology. 5th ed., Pearson, Prentice Hall, US

Martin, E. Wainright. et.al. 1999. Managing Information Technology What Managers Need to Know. Pearson Educational International. New Jersey. Susanto, Azhar.2002. Sistem Informasi Manajemen, Edisi 2. Lingga Jaya Bandung

McKeown, Patrick G., (2001). Informastion Technology and The Networked.
Economy, Harcourt: Orlando

Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda

Nag Yeon Lie. (2010). "Penerapan E-government", Seri Modul 3, Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development.

Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, Sushil S. (2007). E-government and EGovernance: Definitions/Domain Framework and Status around the World. Di dalam Agarwal, Ashok, et al (eds.) Foundations of E-government. 5TH International Conference On EGovernance. Hyderabad, 2007.

Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., Rondonuwu, S. A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-government di Kominfo Kota Manado). e-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 3.

Pratama, I Putu Agus Eka. 2014. Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya + DVD. Bandung : Informatika.

Rianto, B., dan Lestari, T. (2012). Polri dan Aplikasi E-government dalam Pelayanan Publik. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Rusman, dkk. 2013. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

The World Bank, 2011. New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina.

Warsita, Bambang. (2008) Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya, Jakarta: Rineka.

Williams dan Sawyer. 2003.Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications.London: Career Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan Dan Strategi Nasional pengembangan E-Government

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo

PENGUKURAN PEMANFATAN INTERNET PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO